



EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

@Hak cipta milik IPB University

LUTHFI RIDHATUL IKHSAN



**PROGRAM STUDI SAINS AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2023**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Kawasan Wisata Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Oktober 2023

Luthfi Ridhatul Ikhsan
H35013211015

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

RINGKASAN

LUTHFI RIDHATUL IKHSAN. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Wisata Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dibimbing oleh WAHYU BUDI PRIATNA dan BURHANUDDIN.

Pembangunan di sektor desa ialah tindakan yang diambil pertama guna memutar roda perekonomian di Indonesia. Salah satu inisiatif dari program pembangunan pedesaan adalah dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berperan menjadi sebuah lembaga pada tingkat desa guna mengelola aset alamiah desa dan mengoptimalkan penggunaan dana pembangunan. BUMDes sendiri, di dalam menjalankan kegiatannya menggunakan modal yang berasal dari desa seperti industri berbasis masyarakat, kegiatan pertanian, ekstraksi pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan lainnya.

Kehadiran BUMDes diharapkan dapat menghasilkan transformasi yang mengangkat standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Konsep kesejahteraan masyarakat telah diuraikan melalui UU No. 11 Tahun 2009 dengan memiliki pengertian bahwa kesejahteraan melibatkan pemenuhan kebutuhan material, rohaniah, intelektual serta sosial dari warga negara agar dapat mencapai taraf hidup yang pantas.

Kabupaten Gunungkidul tergolong sebagai salah satu daerah penyangga dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dianugerahi dengan kekayaan dan potensi alam yang melimpah. Daerah ini turut andil dalam kontribusi ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama melalui sektor pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam. Melalui penetapan UU No. 6 Tahun 2014 dan beberapa Perda Kabupaten Gunungkidul, 144 desa tersebut mulai membentuk, mengembangkan, dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan, pengembangan, dan pengelolaan tersebut diperkuat melalui UU Cipta Kerja sehingga BUMDes dapat menjadi badan usaha yang berbadan hukum resmi dan dapat menjadi wadah guna menyerap angkatan kerja produktif yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul.

Mendasar kepada latar belakang, tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis efektivitas dari Badan Usaha Milik Desa yang telah mengelola unit usahanya. (2) menganalisis kesejahteraan masyarakat desa yang terdampak dari beroperasinya Badan Usaha Milik Desa. (3) menganalisis pengaruh yang terjadi antara efektivitas Badan Usaha Milik Desa dengan kesejahteraan masyarakat desa.

Penilaian efektivitas BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan metode-metode secara berurutan. Tahap pertama pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Desa Nglangeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan dalam mengatur BUMDes dan kesejahteraan masyarakat; mengidentifikasi tujuan dari BUMDes; mengidentifikasi program-program atau unit usaha BUMDes; mengidentifikasi sasaran dari program atau unit usaha yang beroperasi; mengidentifikasi hasil dari program atau unit usaha BUMDes.

Tahap kedua, analisis efektivitas program Badan Usaha Milik Desa menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan dibantu oleh tabel jumlah, tabulasi silang, grafik atau diagram. Analisis program Badan Usaha Milik Desa

menghasilkan pernyataan unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata memiliki efektivitas yang tinggi. Efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata tergolong dalam kategori tinggi dapat dibuktikan melalui indikator kebermanfaatan, indikator kesesuaian, indikator keberlanjutan, indikator signifikansi tingkat pemberdayaan dan indikator besaran tingkat partisipasi tergolong dalam kategori tinggi. Sementara itu, untuk indikator besaran dan luasan akibat positif berada pada kategori sedang. Unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata yang dibentuk oleh BUMDes sebagai sarana untuk memberikan lapangan pekerjaan baru, mengoptimalkan potensi desa serta sebagai sarana kepedulian sosial dan lingkungan disekitar wilayah desa sudah efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Hal tersebut dibuktikan melalui unit usaha yang berkolaborasi bersama desa dengan memberikan pelatihan, fasilitas umum, sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata. Secara keseluruhan unit usaha ini mampu untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan dari anggota dan masyarakat terdampak, selain itu juga unit usaha ini mampu untuk meningkatkan kreativitas, status sosial, ekonomi dan lingkungan.

Tahap ketiga, analisis kesejahteraan masyarakat menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan dibantu oleh tabel jumlah, tabulasi silang, grafik atau diagram. Selanjutnya untuk melihat adanya perubahan dari tingkat kesejahteraan masyarakat maka data yang diperoleh akan dilakukan uji beda, apabila sebaran data berdistribusi normal maka untuk uji beda dapat menggunakan *Paired Sample t Test* namun apabila sebaran data tidak berdistribusi normal maka untuk uji beda menggunakan *Wilcoxon Signed-Rank Test*. Analisis kesejahteraan masyarakat menghasilkan pernyataan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong dalam kategori tinggi. Hal tersebut dikarenakan hampir keseluruhan dari responden telah merasa memiliki hidup yang sejahtera serta telah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tahap keempat, analisis hubungan dan dampak efektivitas BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan dibantu oleh korelasi rank *Spearman* dan regresi. Analisis hubungan dan dampak efektivitas BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menghasilkan pernyataan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara efektivitas BUMDes dengan kesejahteraan masyarakat serta terdapat 4 indikator efektivitas BUMDes yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu indikator *sustainability*, *impact*, *empowerment* dan *participation*.

Kata kunci: analisis efektivitas BUMDes, analisis kesejahteraan masyarakat, BUMDes, kesejahteraan masyarakat

SUMMARY

LUTHFI RIDHATUL IKHSAN. The Effectivity of Village-Owned Enterprise's Tourism Area Management on Increasing the Villagers Prosperity. Supervised by WAHYU BUDI PRIATNA and BURHANUDDIN

Development that starts in the village sector is the first step to run the economy of Indonesia, one of the many development programmes are the formation of the Village-Owned Enterprise (BUMDes). BUMDes is an institution at the village level to manage village original wealth and maintain an optimal balance of development funds. BUMDes itself, in carrying out its activities, uses capital originating from villages such as community-based industries, agriculture, mining, plantations, trade, tourism and others.

The presence of BUMDes is expected to be able to improve the standard of living and community welfare. Community welfare itself has a meaning that has been stated in Indonesian Law (UU No. 11 of 2009) which states that welfare is a condition of fulfilling the material, spiritual and social needs of the Indonesian citizens in order to live properly and be able to develop themselves, so that they can carry out their social functions.

Gunungkidul Regency is one of the supporting regencies of The Special Region of Yogyakarta Province, the Province with the wealth potency on abundant of natural resources. Gunungkidul Regency has become one of the economic contributors to the Special Region of Yogyakarta through the tourism sector and the management of natural potential. Through the enactment of Law (UU No. 6/2014) and several local regulations of Gunungkidul Regency, 144 villages have begun to establish, develop and manage Village-Owned Enterprises (BUMDes). The establishment, development, and management are strengthened through the Job Creation Law (UU Cipta Kerja) so that BUMDes can become an official legal entity and can become a center to absorb the productive workforce owned by Gunungkidul Regency.

Based on the background of this thesis, the objectives of this study are (1) to analyze the effectiveness of Village-Owned Enterprises that have managed their business units. (2) to analyze the welfare of village communities affected by the operation of Village-Owned Enterprises. (3) to analyze the influence that occurs between the effectiveness of Village-Owned Enterprises and the welfare of village communities.

The effectiveness of Village-Owned enterprises in improving community welfare uses sequential methods. In the first stage, a descriptive qualitative approach was used to identify the policies issued by Nglanggeran Village, Banyusoco Village and Pulutan Village in regulating BUMDes and community welfare; identify the objectives of BUMDes; identify the programs or business units of BUMDes; identify the targets of the programs or business units in operation; identify the results of the programs or business units of BUMDes.

In the second stage, the effectiveness of the Village-Owned Enterprise program was analyzed using a descriptive quantitative approach assisted by count tables, cross tabulations, graphs or diagrams. Analysis of the Village-Owned Enterprises program resulted in a statement that the BUMDes business unit for

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

tourism area management has high effectiveness. The effectiveness of the BUMDes business unit for tourism area management is classified in the high category, which can be proven through indicators of usefulness, suitability indicators, sustainability indicators, indicators of the significance of the level of empowerment and indicators of the magnitude of the level of participation classified in the high category. Meanwhile, the indicators of the size and are of positive effects are in the medium category. The tourism area management BUMDes business unit formed by BUMDes to provide new jobs, optimize village potential and as a means of social and environmental care around the village area is effective and in accordance with the needs of the community. This is evidenced through business units that collaborate with the village by providing training, public facilities, facilities and infrastructure to support tourism activities. Overall, this business unit can improve the skills and abilities of members and affected communities, besides that this business unit is able to improve creativity, social, economic and environmental status.

In the third stage, the analysis of community welfare uses a descriptive quantitative approach with the help of count tables, cross tabulations, graphs or diagrams. Furthermore, to see any changes in the level of community welfare, the data obtained will be tested, if the data distribution is normally distributed then the Paired Sample t Test can be used, but if the data distribution is not normally distributed then the Wilcoxon Signed-Rank Test can be used. Analysis of community welfare resulted in a statement that the level of community welfare is classified as high. This is because almost all of the respondents have felt that they have a prosperous life and have been able to fulfill their daily needs.

The fourth stage, analyzing the relationship and impact of BUMDes effectiveness in improving community welfare, uses a descriptive quantitative approach assisted by Spearman rank correlation and regression. The analysis of the relationship and impact of BUMDes effectiveness in improving community welfare results in a statement that there is a positive and significant correlation between BUMDes effectiveness and community welfare and there are 4 indicators of BUMDes effectiveness that significantly affect community welfare, namely indicators of sustainability, impact, empowerment and participation.

Keywords: BUMDes, BUMDes effectiveness analysis, community welfare, community welfare analysis.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

LUTHFI RIDHATUL IKHSAN

Tesis
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Master pada
Program Studi Sains Agribisnis

**PROGRAM STUDI SAINS AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2023**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2023 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tim Penguji: 1. Dr. Nia Rosiana, SP., M. Si
2. Dr. Ir. Harmini, M. Si

Judul Tesis : Efektivitas Pengelolaan Kawasan Wisata Badan Usaha Milik
Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Nama : Luthfi Ridhatul Ikhsan
NIM : H3501211015

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Dr. Ir. Wahyu Budi Priatna, M. Si.



Pembimbing 2:
Dr. Ir. Burhanuddin, MM.



Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, M.S.
NIP. 19550713 198703 2 001



Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen:
Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec.
NIP. 19790422 200604 1 002



Tanggal Ujian: 25 September 2023

Tanggal Lulus:



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan limpahan karunia-Nya, tesis dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Kawasan Wisata Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" pada Program Studi Sains Agribisnis dapat diselesaikan dengan sukses. Tesis ini merupakan hasil dari perjalanan penelitian dan pengkajian yang mendalam mengenai peran dan dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat dalam konteks sektor agribisnis.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana BUMDes, sebagai salah satu instrumen ekonomi sosial yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan penguatan ekonomi lokal, dapat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Selama proses penelitian, penulis melakukan pengumpulan data, analisis, serta evaluasi keberhasilan implementasi BUMDes pada aspek-aspek yang berkaitan dengan sektor agribisnis.

Tidak lupa, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan dorongan dalam penulisan tesis ini. Terima kasih kepada Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan berharga untuk mengejar gelar akademik dan mendalami ilmu di bidang agribisnis.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Wahyu Budi Priatna, M.Si dan Dr. Ir. Burhanuddin, MM sebagai dosen pembimbing serta Dr. Nia Rosiana, M. Si dan Dr. Ir Harmini, M. Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan arahan, kritik, serta masukan berharga selama proses penyusunan tesis ini.

Tesis ini tentu saja tak lepas dari peran serta keluarga dan teman-teman tercinta, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa restu dalam setiap langkah perjalanan penulis. Keberadaan mereka menjadi inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha dan berkreasi dalam menghadapi setiap tantangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan manfaat tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima setiap kritik, saran, dan masukan yang membangun dari pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berarti bagi pengembangan sektor agribisnis dan penguatan peran BUMDes dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat aktif dalam upaya pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif.

Bogor, Oktober 2023

Luthfi Ridhatul Ikhsan



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	9
2.2 Efektivitas Badan Usaha Milik Desa	11
2.3 Unit Usaha Pengelolaan Kawasan Wisata	16
2.4 Kesejahteraan Masyarakat	18
2.5 Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat	21
III KERANGKA PEMIKIRAN	25
3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	25
3.1.1 Konsep Badan Usaha Milik Desa	25
3.1.2 Konsep Efektivitas Badan Usaha Milik Desa	27
3.1.3 Konsep Kesejahteraan Masyarakat	29
3.2 Kerangka Pemikiran Operasional	30
IV METODE PENELITIAN	33
4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
4.2 Jenis dan Sumber Data	33
4.3 Metode Penentuan Sampel	34
4.4 Metode Pengumpulan Data	34
4.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data	35
4.5.1 Analisis Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan	35
4.5.2 Analisis BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco, dan BUMDes Desa Pulutan	35
4.5.3 Analisis Efektivitas Badan Usaha Milik Desa	36
4.5.4 Analisis Kesejahteraan Masyarakat	36
4.5.5 Analisis Pengaruh Efektivitas BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan terhadap Kesejahteraan Masyarakat	37
V HASIL DAN PEMBAHASAN	41
5.1 Gambaran Umum	41
5.1.1 Profil Desa Nglanggeran	41
5.1.2 Profil BUMDes Desa Nglanggeran	43

5.1.3	Profil Desa Banyusoco	45
5.1.4	Profil BUMDes Desa Banyusoco	47
5.1.5	Profil Desa Pulutan	49
5.1.6	Profil BUMDes Pulutan	50
5.2	Karakteristik Responden Penelitian	52
5.2.1	Karakteristik Usia Responden	52
5.2.2	Karakteristik Jenis Kelamin Responden	54
5.2.3	Karakteristik Tingkat Pendidikan Responden	56
5.2.4	Karakteristik Pekerjaan Utama Responden	57
5.2.5	Karakteristik Status Perkawinan Responden	59
5.3	Efektivitas Unit Usaha BUMDes Pengelolaan Kawasan Wisata	60
5.3.1	Kebermanfaatan	61
5.3.2	Kesesuaian	63
5.3.3	Keberlanjutan	66
5.3.4	Besaran dan Luasan Geografis Akibat Positif	69
5.3.5	Signifikansi Tingkat Pemberdayaan	72
5.3.6	Tingkat Partisipasi	75
5.4	Tingkat Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat Terdampak Unit Usaha BUMDes Pengelolaan Kawasan Wisata	82
5.4.1	Pendapatan	85
5.4.2	Pengeluaran atau Konsumsi	87
5.4.3	Kesehatan Rumah Tangga	88
5.4.4	Kemampuan Mengakses Fasilitas Kesehatan	90
5.4.5	Kualitas Pendidikan	93
5.4.6	Kemampuan Mengakses Pendidikan	95
5.5	Hubungan dan Dampak Efektivitas Unit Usaha BUMDes Pengelolaan Kawasan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	97
5.6	Implikasi Manajerial	103
VISIMPULAN DAN SARAN		105
6.1	Simpulan	105
6.2	Saran	105
DAFTAR PUSTAKA		107
LAMPIRAN		115
RIWAYAT HIDUP		118

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR GAMBAR

1	Model penelitian efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan masyarakat di Desa Lenganeng, Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe	12
2	Model penelitian efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis ekonomi kerakyatan, di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa.	14
3	Model penelitian efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Masintan, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong	15
4	Kerangka Pemikiran	32
5	Desa Nglanggeran	42
6	Kawasan wisata Nglanggeran	44
7	Desa Banyusoco	45
8	Wisata edukasi Madu Bronto	48
9	Kawasan wisata Lembah Desa Pulutan	52
10	Persentase responden penelitian menurut usia	53
11	Persentase responden menurut jenis kelamin	55
12	Persentase responden menurut tingkat pendidikan	56
13	Persentase responden menurut pekerjaan utama	58
14	Persentase responden menurut status perkawinan	59
15	Persentase hasil kebermanfaatan unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	61
16	Persentasi hasil kesesuaian unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	63
17	Persentase hasil keberlanjutan unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	66
18	Persentase hasil besaran dan luasan geografis akibat positif unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	69
19	Persentase hasil signifikansi tingkat pemberdayaan unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	72
20	Persentase hasil besaran tingkat partisipasi unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	75
21	Persentase hasil efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	77
22	Persentase tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	83
23	<i>Scatterplot</i> antara kesejahteraan dengan <i>sustainability</i>	101
24	<i>Scatterplot</i> antara kesejahteraan dan <i>impact</i>	101

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR TABEL

1	Indeks Pembangunan Manusia 2019-2021	3
2	Data Badan Usaha Milik Desa dengan uni usaha pengelolaan kawasan wisata di Kabupaten Gunungkidul	4
3	Tingkat hubungan dalam analisis korelasi	38
4	Karakteristik usia responden Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan	54
5	Karakteristik jenis kelamin responden Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan	55
6	Karakteristik tingkat pendidikan responden Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan	57
7	Karakteristik pekerjaan utama responden Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan	58
8	Karakteristik status perkawinan responden Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan	59
9	Kebermanfaatan (effectivity) unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan	61
10	Kesesuaian (relevance) unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan	64
11	Keberlanjutan (sustainability) unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan	67
12	Besaran dan luasan geografis akibat positif (impact) unit usaha BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan	70
13	Signifikansi tingkat pemberdayaan (empowerment) unit usaha BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco, BUMDes Desa Pulutan	73
14	Besaran tingkat partisipasi (participation) unit usaha BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan	76
15	Besaran efektivitas unit usaha BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan	78
16	Jumlah dan persentase anggota dan masyarakat terdampak hadirnya unit usaha BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan	83
17	Jumlah dan rata-rata perbedaan pendapatan responden sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	85
18	Hasil uji beda Paired Sample T-test responden antara pendapatan sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	86

19	Jumlah dan rata-rata perbedaan pengeluaran atau konsumsi responden sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	87
20	Hasil uji beda Paired Sample T-test responden antara pengeluaran sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan Kawasan wisata	88
21	Jumlah dan rata-rata perbedaan kesehatan rumah tangga responden sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	89
22	Hasil uji beda Paired Sample T-test responden antara kesehatan rumah tangga sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	90
23	Data angka harapan hidup Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 - 2022	90
24	Jumlah dan rata-rata perbedaan kemampuan mengakses fasilitas kesehatan responden sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	91
25	Hasil uji beda Paired Sample T-test responden antara kemampuan mengakses fasilitas kesehatan sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	92
26	Jumlah dan rata-rata perbedaan kualitas pendidikan responden sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	93
27	Hasil uji beda Paired Sample T-test responden antara kualitas pendidikan sebelum dan sesudah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata	94
28	Rata-rata lama sekolah (tahun), 2020 – 2022 Kabupaten Gunungkidul	95
29	Jumlah dan rata-rata perbedaan kemampuan mengakses pendidikan responden sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	95
30	Hasil dan uji beda Paired Sample T-test responden antara kemampuan mengakses pendidikan sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata	96
31	Angka harapan lama sekolah (tahun), 2020 – 2022 Kabupaten Gunungkidul	97
32	Tabel silang jumlah dan persentase efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan tingkat kesejahteraan masyarakat	98
33	Koefisien korelasi efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan tingkat kesejahteraan masyarakat	99
34	Hasil uji regresi efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat	100



DAFTAR LAMPIRAN

1 Dokumentasi penelitian

117

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di sektor desa ialah tindakan yang diambil pertama guna memutar roda perekonomian di Indonesia. Salah satu inisiatif dari program pembangunan pedesaan adalah dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berperan menjadi sebuah lembaga pada tingkat desa guna mengelola aset alamiah desa dan mengoptimalkan penggunaan dana pembangunan. BUMDes sendiri, di dalam menjalankan kegiatannya menggunakan modal yang berasal dari desa seperti industri berbasis masyarakat, kegiatan pertanian, ekstraksi pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan lainnya. Upaya dalam mencapai tujuan ekonomi yang sesuai dengan semangat UUD 1945 dalam pembukaannya, oleh karena itu tuntutan bagi pemerintah sebagai pengurus masyarakat ialah untuk menerapkan perubahan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu guna mencapai perubahan tersebut ialah melalui implementasi program pengelolaan BUMDes (Arlan 2019).

Definisi BUMDes menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, merujuk kepada organisasi bisnis atau lembaga yang kepemilikannya secara keseluruhan atau mayoritas dipegang oleh Desa, yang bertujuan untuk mengelola aset, menyediakan layanan jasa dan menjalankan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pedoman Permendagri No. 39 Tahun 2010 menggarisbawahi peranan BUMDes sebagai entitas ekonomi yang transparan dan bertanggung jawab yang juga berfungsi sebagai pusat perkembangan ekonomi. Akan tetapi, pengembangan program ekonomi produktif melalui BUMDes masih sulit untuk diwujudkan oleh masyarakat desa.

Kehadiran BUMDes diharapkan dapat menghasilkan transformasi yang mengangkat standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Konsep kesejahteraan masyarakat telah diuraikan melalui UU No. 11 Tahun 2009 dengan memiliki pengertian bahwa kesejahteraan melibatkan pemenuhan kebutuhan material, rohaniah, intelektual serta sosial dari warga negara agar dapat mencapai taraf hidup yang pantas. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan tidak terlepas dari usaha untuk mengurangi kemiskinan. Meskipun tidak dapat dihapus sepenuhnya, akan tetapi kemiskinan dapat ditekan melalui program-program yang diutamakan oleh pemerintah. Memberikan dukungan sosial yang lebih komprehensif merupakan langkah penting guna mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan standar kesejahteraan yang tinggi, sehingga tiap-tiap individu dapat menjalani hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan (Fatwa 2009; Mangantar 2018).

Gunungkidul yang terletak di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kabupaten di daerah ini. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul mencapai 1.485,36 kilometer persegi. Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dengan 144 desa dan 1.431 padukuhan yang lebih kecil dan dikenal sebagai “padukuhan”. Pusat administrasi Kabupaten Gunungkidul bernama Wonosari. Kabupaten Gunungkidul memiliki beragam potensi yang menjanjikan, termasuk berbagai atraksi alam seperti pantai, gua, bukit, air terjun, pegunungan, situs sejarah, tempat budaya, dan markah tanah keagamaan. Daya tarik alamnya, terutama pantainya menjadi aset utama Kabupaten Gunungkidul. Pantai-pantai ini membentang sepanjang 72 kilometer di sepanjang garis pantai Selatan, mulai dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

tepi barat hingga ujung timur. Sepanjang 72 kilometer garis pantai selatan ini, terdapat tujuh pantai yang berdekatan: Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, Pantai Krakal, Pantai Slili dan Pantai Sundak yang berujung di Pantai Ngandong. Selain atraksi pesisir, Kabupaten Gunungkidul juga terkenal dengan fitur alam lain yang menonjol, yaitu lanskap karst. Kawasan karst ini meliputi sepuluh kecamatan, dengan luas mencapai 13.000 kilometer persegi. Lanskap karst ini ditandai dengan fitur permukaan (ekokarst) dan bawah permukaan (endokarst) yang khas. Melalui permukaan, ekokarst menampilkan formasi positif berupa bukit karst berbentuk kerucut dengan jumlah lebih dari 40.000, serta formasi negatif berupa lembah karst. Endokarst berwujud gua-gua karst dengan total 119 gua yang dihiasi oleh stalaktit dan stalagmite serta aliran sungai bawah tanah. Destinasi wisata karst Gunungkidul memiliki daya tarik yang kuat bagi pengunjung. Destinasi ini termasuk Gua Ngingrong, dan Lembah Karst Mulo di Kecamatan Wonosari, Gua Jlamprong, Gua Kalisuci, Gua Jomblang dan Gua Grubug di Kecamatan Semanu, Gua Seropan yang terletak diperbatasan antara Kecamatan Semanu dan Ponjong, Gua Cokro di dalam Kecamatan Ponjong dan Gua Pindul yang berada di Kecamatan Karang Mojo (Pembkab Gunungkidul 2022).

Selain melalui eksploitasi wisata alam, Kabupaten Gunungkidul juga memiliki potensi wisata yang berkaitan dengan budaya. Wisata budaya yang dimiliki oleh kabupaten ini termasuk tradisi bersih desa atau rasulan, upacara Melasti di wilayah Pantai Ngobaran, upacara sedekah laut di Pantai Baron, Ngalap Berkah di Nglangeran, upacara Cing Cing Goling di Karangmojo, serta seni tradisional lainnya seperti Rinding Gumbeng, Gejog Lesung, Wayang Kulit, Reog, Jatilan, Campursari dan lain-lain. Kabupaten Gunungkidul berkelanjutan melakukan perbaikan dalam bidang fasilitas dan infrastruktur guna mendukung pengembangan sektor pariwisata yang ada diwilayahnya, sesuai dengan visi pariwisata kabupaten ini, yaitu menjadikan Gunungkidul sebagai destinasi unggulan berbasis alam yang juga mempertahankan budaya, memiliki daya saing, menuju kemandirian dan sejahtera. Tindakan serius Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan visi pariwisata tersebut juga ditegaskan melalui penerbitan Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Gunungkidul No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 – 2025. Penetapan perda ini merupakan langkah lanjutan dari komitmen pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mengikuti arahan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Kabupaten Gunungkidul dengan peraturan daerah ini mengutamakan prinsip kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata. Menurut Hall dan Page (1999), perkembangan sektor pariwisata dapat memberikan akibat positif dan negatif. Dampak menguntungkan yang muncul dari pertumbuhan sektor pariwisata dalam segi sosial dan budaya adalah peningkatan partisipasi dan minat masyarakat terhadap beragam kegiatan bersama, serta penguatan nilai-nilai tradisional yang dimiliki oleh wilayah setempat. Akibat buruk yang muncul dari kemajuan sektor pariwisata adalah aktivitas individu yang dikomersilkan, perubahan kegiatan dan aktivitas untuk memenuhi permintaan pariwisata, peningkatan kasus kejahatan, perubahan dalam struktur komunitas di wilayah setempat dan kerusakan aspek sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Gunungkidul tergolong sebagai salah satu daerah penyangga dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dianugerahi dengan kekayaan dan potensi alam yang melimpah. Daerah ini turut andil dalam kontribusi ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama melalui sektor pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam. Mayoritas penduduk Kabupaten Gunungkidul aktif dilingkungan pedesaan, mengambil manfaat dari kekayaan alam yang terdapat di wilayah tersebut. Selain sektor pariwisata, Kabupaten Gunungkidul juga menjadi pemasok pendapatan bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui hasil pertanian seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Kabupaten Gunungkidul memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tergolong rendah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dua kabupaten yang IPM nya tergolong dalam kategori rendah atau kurang dari 80 yaitu Kabupaten Kulonprogo (74,71) dan Kabupaten Gunungkidul (70,16) (BPS Provinsi DI Yogyakarta 2022). Kabupaten Gunungkidul sendiri memiliki laju pertumbuhan IPM sebesar 0,1 poin dan memiliki tren yang positif setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mulai sadar akan pembangunan diwilayahnya perlu untuk terus dikembangkan. Pembangunan tersebut dititik beratkan pada tingkat desa dengan mengeluarkan beberapa perda. Pembangunan yang dititik beratkan pada tingkat desa karena Kabupaten Gunungkidul mayoritas desanya diandalkan untuk menjadi penyangga dari kehidupan masyarakat, melalui sektor produksi pangan, sektor pertanian, dan sektor pariwisata. Melalui penerbitan peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul, desa-desa di wilayah Gunungkidul mulai membentuk dan mengelola BUMDes yang mayoritasnya memiliki program pengelolaan wilayah rekreasi, baik yang berhubungan dengan daya tarik alam maupun kebudayaan dengan tujuan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia 2019-2021

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		
	2019	2020	2021
D. I. Yogyakarta	79,99	79,97	80,22
Kulonprogo	74,44	74,46	74,71
Bantul	80,01	80,01	80,28
Gunungkidul	69,96	69,98	70,16
Sleman	83,85	83,84	84,00
Yogyakarta	86,65	86,61	87,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Gunungkidul memiliki 144 desa yang tersebar dari 18 kecamatan dengan berbagai potensi dan kekayaan didalamnya, baik kekayaan melalui sumber daya alam maupun kekayaan melalui sumber daya manusia. Melalui penetapan UU No. 6 Tahun 2014 dan beberapa Perda Kabupaten Gunungkidul, 144 desa tersebut mulai membentuk, mengembangkan, dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan, pengembangan, dan pengelolaan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Cipta Kerja sehingga BUMDes dapat menjadi badan usaha yang berbadan hukum resmi dan dapat menjadi wadah guna menyerap

angkatan kerja produktif yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul. Tahun 2019, Kabupaten Gunungkidul memiliki 96 BUMDes dari 96 desa tetapi tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemkab Gunungkidul. Tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul memiliki 142 BUMDes dari 142 desa hanya menyisakan 2 desa yang belum memiliki BUMDes karena terbentur dengan sumber daya manusia yang dimiliki desa tersebut. Perkembangan jumlah BUMDes di Kabupaten Gunungkidul mencapai 67,60% dari tahun 2019 hingga tahun 2022. BUMDes tersebut mengelola berbagai jenis usaha guna meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan menyejahterakan masyarakat desanya. Berbagai jenis usaha tersebut dimulai dari usaha pengelolaan kawasan wisata, usaha perdagangan, dan usaha simpan pinjam, tetapi di dalam perjalannya tidak menutup kemungkinan untuk desa dapat menjalankan dan mengelola usaha yang berbeda dari tiga jenis usaha yang dominan dilakukan oleh BUMDes di Kabupaten Gunungkidul. 142 BUMDes yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul terbagi atas beberapa kategori yaitu maju dan mandiri, berkembang dan tumbuh, serta dasar. Sementara itu, terdapat delapan BUMDes yang tergolong dalam kategori maju dan mandiri yaitu BUMDes di Kalurahan Karangrejek, Kalurahan Mulo, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Bejiharjo, Kalurahan Bleberan, dan Kalurahan Kemadang (Widiyanto 2021).

Melalui data yang telah dipublikasi oleh Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul berikut adalah beberapa BUMDes yang terdapat di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan program atau unit usaha pengelolaan kawasan wisata karena dari 142 BUMDes, 53 BUMDes atau mayoritas dari BUMDes memiliki kegiatan pengelolaan kawasan wisata.

Tabel 2 Data Badan Usaha Milik Desa dengan uni usaha pengelolaan kawasan wisata di Kabupaten Gunungkidul

Kecamatan	Desa	Unit Usaha
Panggung	Giriwungu	Pengelolaan Kawasan Wisata (Wisata Pantai Ngungguh)
	Giriharjo	Pengelolaan Kawasan Wisata (Bukit dan Telaga), Pengelolaan Air Bersih, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Pasar / Kios, Pengelolaan Parkir
	Girisuko	Pengelolaan Kawasan Wisata (Geoforest), SPAMDes
	Girijati	Pengelolaan Kawasan Wisata (Pantai)
	Giriasih	Pengelolaan Kawasan Wisata (Taman Wisata Embung Bembem)
Purwosari	Giricahyo	Pengelolaan Kawasan Wisata (Paralayang, Watu Gupit, Goa Plawan, Pengelolaan Pasar Desa)
	Giripurwo	Pengelolaan Kawasan Wisata (Embung), Pengelolaan Sumber Air Toya Kali Pego
Paliyan	Pulutan	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata)
	Pampang	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Kecamatan	Desa	Unit Usaha
Saptosari	Monggol	Pengelolaan Kawasan Wisata (Tlaga Jumbleng), Pengolahan Makanan
	Krambilsawit	Pengelolaan Kawasan Wisata
	Tepus	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata), Pengelolaan Lembaga Keuangan
Tepus	Purwodadi	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata Budaya Kelautan), <i>Tunnel</i> (Tambak) Garam
	Sumberwungu	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata Budaya)
	Ngestirejo Hargosari	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata) Pengelolaan Kawasan Wisata (Taman Desa)
Tanjungsari	Kemadang	Pengelolaan Kawasan Wisata (Pantai Buluk), Retribusi Wisata Malam, Pengelolaan Pasar Desa, Simpan Pinjam, Persewaan, Usaha Air Mineral Pantai Sepanjang, <i>Water Park</i> , <i>Homestay</i>
	Bohol	Pengelolaan Kawasan Wisata (Agrowisata), Pertanian
Rongkop	Pucanganom	Pengelolaan Kawasan Wisata (Taman Desa), Pengelolaan Lembaga Keuangan
Girisubo	Jepitu	Pengelolaan Kawasan Wisata (Pantai Sedahan)
Semenu	Ngeposari	Pengelolaan Kawasan Wisata (Embung dan Gua Jlamprong), Pertanian, Simpan Pinjam
	Pacajero	Pengelolaan Kawasan Wisata (Telaga Jonge)
	Ponjong	Pengelolaan Kawasan Wisata (<i>Water Park</i> / Sumber Air Ponjong), Pengelolaan Gedung Seba Guna, Pembesaran Sapi
Ponjong	Bedoyo	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Budaya), Pengelolaan Gedung Serba Guna
	Genjahan	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata / Eduwisata), SPAMDes, Pertades
	Umbulrejo	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata Umbulrejo)
	Sawahan	Pengelolaan Kawasan Wisata (Gua Grudo Tengger)
Karangmojo	Tambakromo	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata Budaya / Embung Gunung Panggung)
	Bejiharjo	Pengelolaan Kawasan Wisata (Goa Pindul, Bejiharjo Edu Park), Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Pasar Desa, Persewaan, dan EO (<i>Event Organizer</i>)
Wonosari	Mulo	Pengelolaan Kawasan Wisata (Goa Ngingrong), Pengelolaan Air
	Pulutan	Pengelolaan Kawasan Wisata (Lembah Desa / Wisata Edukasi Pertanian)
	Wunung	Pengelolaan Kawasan Wisata

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Kecamatan	Desa	Unit Usaha
Playen	Karangrejek	Pengelolaan Kawasan Wisata, SPAMDes, Simpan Pinjam, Agrobisnis, Toko Kelontong
	Karantengah	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata)
	Gari	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata Budaya), Deganet (Internet Desa), SPAMDes, Pengelolaan Pasar Argo Wijil
Patuk	Banyusoco	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata Kehutanan)
	Bleberan	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata), Pengelolaan Air, Simpan Pinjam
	Gading	Pengelolaan Kawasan Wisata (Taman Hutan Rakyat)
Gedangsari	Pengkok	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata Gunung Ireng), Pengelolaan <i>Homestay</i> , Toko ATK dan Fotocopy, Distributor Sembako, Lembaga Bimbingan Belajar, Bank Sampah, Penggemukan Hewan Ternak
	Beji	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata Kampoeng Jelok)
	Nglanggeran	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata / <i>Community-Based Tourism</i>), Pengolahan Coklat, Pengolahan Sampah, Peternakan Maggot
Ngilapar	Mertelu	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata / <i>Green Village</i> / Ekowisata)
	Hargomulyo	Pengelolaan Kawasan Wisata
	Kedungkeris	Pengelolaan Kawasan Wisata (Wisata Air)
Ngawen	Katongan	Pengelolaan Kawasan Wisata (Wisata Alam), Pengelolaan Minuman, Pengelolaan Peternakan-Pertanian
	Pengkok	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata Glompong)
	Kedungpoh	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata Klayar), Perdagangan, Agen Bus, Jasa Keuangan, Angkutan Barang, Usaha Mikro Mandiri, Bisnis Online
Semin	Tancep	Pengelolaan Kawasan Wisata, Pengelolaan UMKM Batik Tulis
	Bendung	Pengelolaan Kawasan Wisata (Rintisan Desa Budaya)
	Kalitekuk	Pengelolaan Kawasan Wisata (Ekowisata), SPAMDes
Semin	Candirejo	Pengelolaan Kawasan Wisata (Desa Wisata Candirejo), Pengelolaan Pasar Candirejo, Simpan Pinjam, Perdagangan (Kios BUMDes), Pertambangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Sumber: Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumiasih (2018) berjudul “Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)” mengungkapkan bahwa secara menyeluruh, perkembangan BUMDes di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dari banyaknya desa yang telah mendirikan BUMDes sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Umumnya, masyarakat Provinsi Bali merespon positif hadirnya BUMDes karena dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Akan tetapi, tidak semua desa di Provinsi Bali telah mendirikan dan memiliki BUMDes. Terdapat banyak desa di Provinsi Bali telah mendirikan dan memiliki BUMDes. Terdapat banyak desa di Provinsi Bali yang memiliki potensi wisata namun belum memiliki BUMDes. Banyaknya desa-desa di Provinsi Bali yang belum membentuk dan memiliki desa bukan tanpa alasan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh desa-desa di Provinsi Bali dalam upaya membentuk dan memiliki BUMDes meliputi kurangnya pemahaman perangkat desa terkait dengan BUMDes, keterbatasan dalam sumber daya manusia untuk mengelola BUMDes, rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha, minimnya upaya sosialisasi dari perangkat desa untuk membangun dan mengawasi BUMDes, serta kekurangan alokasi modal dan kurangnya pengetahuan tentang potensi desa. BUMDes Pakse Bali menjalankan sektor pariwisata dengan fokus pada berbagai aspek. Aspek-aspek yang dijaga mencakup jenis-jenis sektor pariwisata, modal, manajemen, pola pengelolaan, strategi pemasaran, akuntabilitas serta distribusi hasil yang efisien dan terstruktur karena pendekatan yang dijalankan secara efektif dan terorganisir. BUMDes Pakse Bali bisa dijadikan contoh bagi desa-desa lain yang memiliki potensi serupa namun belum memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

Melalui pemaparan di atas, terdapat beberapa masalah yang akan menjadi dasar dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas dari unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata yang telah beroperasi?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang terdampak dari beroperasinya unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Mendasar kepada latar belakang dan rumusan masalah, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis efektivitas dari unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata.
2. Menganalisis kesejahteraan masyarakat desa yang terdampak dari beroperasinya unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata.
3. Menganalisis kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi mengenai dampak BUMDes pada kesejahteraan masyarakat desa diharapkan memberikan manfaat bagi pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam merencanakan serta melaksanakan program BUMDes yang berdampak efektif pada kesejahteraan desa. Selain itu, penelitian ini diantisipasi dapat memberikan wawasan dan informasi mengenai efisiensi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan desa, serta menjadi rujukan untuk studi berikutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penting untuk menentukan lingkup penelitian guna cakupan dan data yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada mengukur efektivitas BUMDes yang termasuk dalam kategori maju dan mandiri, berkembang dan tumbuh serta dasar. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan unit usaha yang mengelola kawasan wisata serta mendukung sistem agribisnis.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Baru-baru ini terjadi peningkatan diskusi mengenai perubahan yang berlangsung dalam pembangunan pedesaan, baik dari segi sifat perubahan yang sedang berlangsung dalam aspek ekonomi pedesaan dan dalam hal pendekatan yang diadopsi terhadap suatu kebijakan mengenai pedesaan. Program pembangunan pedesaan berfokus pada tingkat kemiskinan, peluang untuk mendapatkan mata pencaharian yang lebih baik, ketentuan dasar dari sarana dan prasarana melalui program-program inovatif dengan berdasarkan upah dan pekerjaan mandiri (Sheikh 2018).

Upaya dalam menanggapi isu pembangunan pedesaan, Indonesia telah membentuk sebuah entitas ekonomi di tingkat desa yang dikenal sebagai BUMDes. Tujuan dibentuknya BUMDes ialah sebagai sarana yang mendorong kemajuan dalam aspek ekonomi masyarakat pedesaan. Hal ini meliputi peningkatan dari kreativitas, inovasi, serta peluang ekonomi yang lebih produktif bagi masyarakat desa. Selain itu juga, BUMDes memiliki tujuan sebagai alat rangsang guna meningkatkan pemasukan dan taraf hidup warga desa sejalan dengan meningkatkan PADes (Kartika *et al.* 2017).

Peranan sebagai kesejahteraan masyarakat dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat asli desa dalam mengelola BUMDes yang berdampak terhadap kemajuan ekonomi komunitas desa dan menyusutkan tingkat pengangguran di daerah pedesaan. Pelaksanaan program BUMDes yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus mengikutsertakan partisipasi langsung dari masyarakat, dengan harapan akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat (Budiono 2015).

Adanya kesempatan demokratisasi di tingkat pedesaan seharusnya memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan inisiatif dan aspirasi guna mendorong kemajuan desa. Upaya ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pelayanan, demokratisasi, partisipasi dan yang terpenting peningkatan potensi ekonomi di desa. Proses perbaikan ekonomi desa sebaiknya diawali dengan memberikan landasan hukum yang tepat untuk memastikan bahwa BUMDes benar-benar mampu untuk menjalankan perannya sebagai komponen yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dan menggali pertumbuhan ekonomi desa secara menyeluruh dan komprehensif (Dewi 2014).

Keberadaan BUMDes diharapkan menjadi salah satu pijakan dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Perjalanan pembentukan BUMDes menghadapi sejumlah tantangan, termasuk persoalan internal yang muncul dalam BUMDes itu sendiri. Meskipun awalnya direncanakan sebagai inisiator utama perekonomian desa, banyak BUMDes yang akhirnya mengalami kegagalan, bahkan hanya menjadi nama kosong sebelum benar-benar berkembang. Masalah ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan pelaksanaan BUMDes. Terdapat Pelajaran yang dapat diambil dari kegagalan institusi perekonomian desa sebelumnya. Pendekatan pembentukan kebijakan yang berasal dari atas ke bawah, meskipun didukung dengan bantuan dana dan fasilitas dari pemerintah pusat, belum mampu menggerakkan ekonomi desa malah dalam beberapa kasus menjadi kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya desa tersebut. Usaha untuk mencapai kemandirian memerlukan beberapa persyaratan, diantaranya partisipasi aktif dari masyarakat yang didukung oleh hak kepemilikan. Kepemilikan masyarakat atas sumber daya desa ialah faktor penting dalam pembentukan BUMDes dan perlu untuk diperluas. Melalui hal tersebut, tujuan kemandirian dapat diwujudkan melalui pembentukan BUMDes yang inklusif. Berbagai model dapat diadopsi oleh BUMDes, seperti model koperasi. BUMDes yang mengadopsi model koperasi memperlakukan penduduk desa sebagai anggota atau pemilik BUMDes. Kepemilikan ini dapat diatur dengan membagi saham antara pemerintah dan masyarakat desa. Sebagai contoh, untuk menjaga kepentingan publik, pemerintah desa dapat menyediakan modal awal melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sekitar 60 persen, sementara masyarakat desa sebagai anggota atau pemegang saham menyediakan modal sekitar 40 persen. Melalui pendekatan seperti itu, BUMDes memiliki potensi sebagai ruang dimana masyarakat desa dapat belajar dan berpartisipasi dalam ekonomi demokratis (Faedlulloh 2018).

Kehadiran BUMDes memiliki potensi untuk memberikan transformasi yang substansial di ranah ekonomi dan sosial. Perubahan dalam nilai-nilai sosial ini akan mempengaruhi dinamika hubungan antar individu dalam komunitas. BUMDes mampu menghasilkan pertumbuhan dalam PADes, akan tetapi dampak finansial tersebut tidak selalu langsung dapat dirasakan oleh penduduk desa. Hal ini dikarenakan terkadang masyarakat desa masih memiliki anggapan bahwa manfaat dari BUMDes tidak begitu berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan warga (Anggraeni 2016).

Secara keseluruhan, BUMDes di Desa Karangrejek dapat dianggap berhasil dan berjalan tanpa kendala. Hal ini dikarenakan BUMDes di Desa Karangrejek telah membawa dampak positif bagi komunitas desa. Implikasi dari studi ini terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan komunitas di desa, khususnya dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan. Temuan dari penelitian ini juga menunjukkan kemampuan untuk mengilhami dan menggalang semangat berwirausaha dikalangan penduduk desa serta memupuk rasis tanggung jawab terhadap kebijakan yang dijalankan (Tama dan Yanuardi 2013).

Desa Ponggok berhasil mengembangkan BUMDes yang sukses dalam pengelolaan sumber daya desa terutama air dengan menggunakan pendekatan transparan, partisipasi masyarakat dan teknologi yang cermat. Meskipun terdapat tantangan persaingan dengan badan usaha lain, partisipasi masyarakat dalam unit pengelolaan usaha desa membantu mengatasi masalah ini. BUMDes secara berkala mendorong peningkatan daya saing sosial dan ekonomi di Desa Ponggok, menjadikannya contoh inspiratif untuk desa-desa lain di Indonesia (Subehi *et al.* 2018). Studi Arindhawati dan Utami (2020) juga mengungkapkan bahwa BUMDes di Desa Ponggok memberikan dampak positif ekonomi dan sosial, termasuk mengurangi pengangguran, memberikan kompensasi kepada staf, menyumbangkan pendapatan ke PADes, memberikan pinjaman kepada masyarakat dan memberikan dukungan sosial seperti BPJS, santunan duka serta program-program lingkungan dan pelatihan keterampilan. Komunikasi dan transparansi antara BUMDes dan masyarakat penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kesejahteraan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

2.2 Efektivitas Badan Usaha Milik Desa

Istilah “efektivitas” berasal dari kata “efektif” yang memiliki makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berhasil dicapai atau dilaksanakan dengan baik. Efektivitas mengacu kepada keterampilan dalam memilih tujuan dan menggunakan alat serta sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan dengan akurat dan efisien, terlepas dari berhasil mencapai tujuan tersebut atau mengalami kegagalan (Lestanata dan Pribadi 2016). Secara garis besar efektivitas memiliki arti sesuatu yang dilakukan berhasil dengan memperhatikan besaran kontribusi output untuk pencapaian tujuan.

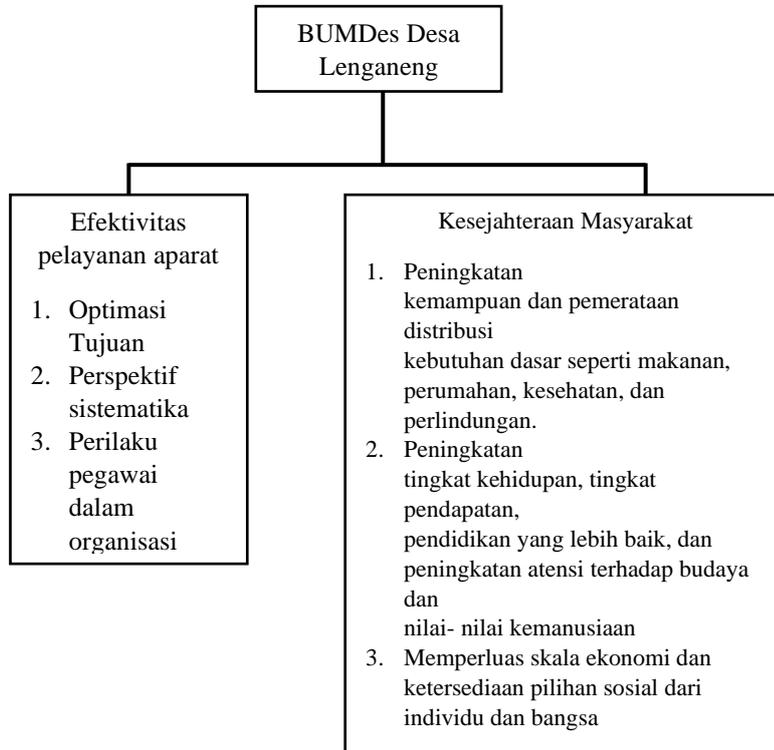
Penelitian yang dilakukan oleh Arlan (2019), ditemukan bahwa dengan menggunakan lima pendekatan analisis yaitu pemahaman mengenai program, akurasi dalam mencapai target, kepatuhan terhadap waktu, pencapaian tujuan yang ditetapkan dan dampak nyata yang terlihat dari program pengelolaan BUMDes di Desa Ayunan Papan, Kecamatan Lokoait, Kabupaten Tapin berhasil mencapai skor sebesar 77,13%. Skor ini menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Meskipun telah mencapai efektivitas, pemerintah Kabupaten Tapin tetap perlu untuk memberikan pendampingan berkelanjutan kepada pemerintah Desa Ayunan. Hal ini dimaksudkan agar program pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara berkelanjutan dan dengan kapasitas yang memungkinkan untuk meningkatkan aspek ekonomi dari komunitas desa.

Hasil penelitian yang dijalankan oleh Taqqiudin dan Zulhilmi (2020) mencerminkan situasi yang serupa. Menurut penelitian ini, program-program yang diterapkan oleh BUMDes Lembar Selatan terbukti berhasil dengan memanfaatkan tiga pendekatan, ini meliputi mencapai sasaran, penggabungan dan penyesuaian. Keberhasilan yang terlihat ini dipengaruhi oleh efektivitas dalam pendistribusian modal usaha kepada masyarakat yang terlibat dalam usaha kecil menengah (UKM), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi yang berlaku di Indonesia, serta mempertimbangkan potensi-potensi yang terdapat dalam masyarakat Desa Lembar Selatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elvina dan Musdhalifah (2019) menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji, seperti partisipasi masyarakat, implementasi kebijakan dan efektivitas pembangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat, para pengambil keputusan di tingkat desa memiliki kemampuan untuk merancang rencana yang lebih teliti dan tepat guna dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta dalam pemanfaatan sumber daya dengan efisien dan melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan yang sudah dilakukan.

Penelitian yang dijalankan oleh Sasauw *et al.* (2018) dengan judul “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Masyarakat di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe” bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dana yang diimplementasikan oleh BUMDes Desa Lenganeng telah berhasil dan efektif serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana. Peneliti dalam menjawab tujuan dari penelitiannya menggunakan model seperti Gambar 1. Penilaian efektivitas dari pengelolaan dana dengan menggunakan teori efektivitas pelayanan aparat dengan tiga indikator ialah penyempurnaan tujuan, pendekatan sistematis dan tangkai laku anggota staf di dalam struktur organisasi. Sementara itu, dalam menilai kesejahteraan masyarakat

peneliti menggunakan pendekatan dengan tiga indikator yaitu meningkatkan kapabilitas dan meratakan distribusi kebutuhan pokok, meningkatkan standar



Gambar 1 Model penelitian efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan masyarakat di Desa Lenganeng, Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe

hidup, penghasilan yang lebih baik, pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan perhatian terhadap budaya dan nilai-nilai manusiawi serta memperluas cakupan ekonomi dan pilihan sosial bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian tersebut melalui optimasi tujuan atau usaha dari pengelolaan oleh struktur organisasi badan usaha dalam meraih sasaran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, hal ini terlihat dengan fakta bahwa semua unit usaha yang dioperasikan oleh BUMDes berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lenganeng. Melalui sudut pandang sistematis atau kompetensi individu dalam BUMDes sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada mereka. Fakta ini terbukti dengan adanya peningkatan kemampuan individu dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab mereka dalam BUMDes. Peningkatan kemampuan individu secara keseluruhan memiliki dampak positif pada keberhasilan program yang telah direncanakan sebelumnya dan juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Lenganeng. Meskipun inovasi masih perlu ditingkatkan, namun keuletan dan ketelitian perilaku pegawai dalam organisasi BUMDes sudah cukup baik. Kualitas ini telah mendorong kinerja maksimal dari BUMDes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

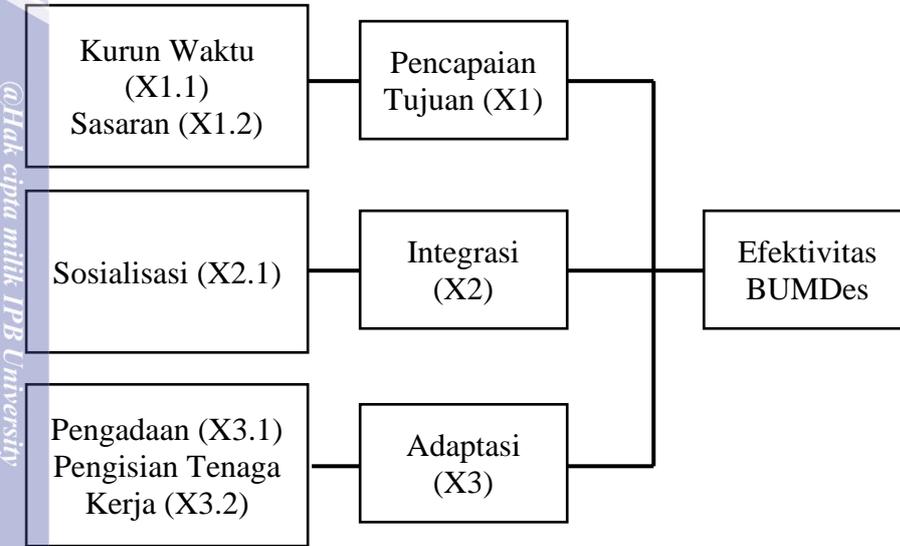
Penelitian yang dilaksanakan oleh Purnamasari *et al.* (2016) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan

di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang” bertujuan untuk menganalisis pencapaian tujuan dalam efektivitas BUMDes berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi integrasi yang terjadi dalam efektivitas BUMDes berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warungbambu, serta mengungkap adaptasi yang diimplementasikan dalam efektivitas BUMDes berbasis ekonomi kerakyatan di wilayah yang sama. Peneliti dalam mengatasi tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas yang terdiri dari tiga faktor atau indikator utama yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Pencapaian tujuan mengacu pada keseluruhan usaha dalam mencapai target yang dianggap sebagai suatu proses. Melalui penilaiannya, pencapaian tujuan juga melibatkan indikator seperti periode waktu yang ditentukan dan target konkret yang harus dicapai. Sementara itu, integrasi berfungsi sebagai ukuran kemampuan organisasi dalam menjalankan sosialisasi, mengembangkan kesepakatan bersama, serta menjalin komunikasi dengan organisasi lain. Integrasi ini memiliki kaitan erat dengan proses sosialisasi yang dilakukan. Adaptasi, dalam konteks indikator penelitian ini mengacu pada kapasitas organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Pengukuran adaptasi didasarkan pada indikator proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Hasil penelitian dengan model semacam ini menunjukkan bahwa indikator pencapaian tujuan belum mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan BUMDes berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Selain itu, informasi terkait pembentukan BUMDes masih minim di masyarakat. Hasil yang diperoleh dari indikator integrasi menunjukkan bahwa efektivitas BUMDes berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan keterbatasan dalam pembentukan forum musyawarah masyarakat yang digagas oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya komunikasi yang seharusnya disampaikan oleh kepala dusun kepada masyarakat tidak dilaksanakan sepenuhnya, sehingga banyak warga desa yang tidak memahami tahapan pembentukan BUMDes dengan jelas. Akibatnya, terjadi konflik dalam masyarakat yang berdampak pada pelaksanaan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya, hasil melalui indikator adaptasi menunjukkan bahwa BUMDes berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang belum mampu menyesuaikan diri dengan program BUMDes yang telah dirancang. Faktor ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengelola BUMDes dan kurangnya dukungan dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan BUMDes.

Selain studi yang dilakukan oleh oleh Purnamasari *et al.* (2016), model penelitian yang serupa juga diterapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Suwecantara *et al.* (2018) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus BUMDes Madani di Desa Santan Tengah, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara)”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan sejauh mana efektivitas pengelolaan BUMDes Madani. Hasil dari penelitian yang menggunakan model serupa menunjukkan bahwa indikator pencapaian tujuan masih belum mencapai tingkat kesesuaian dengan tujuan awal



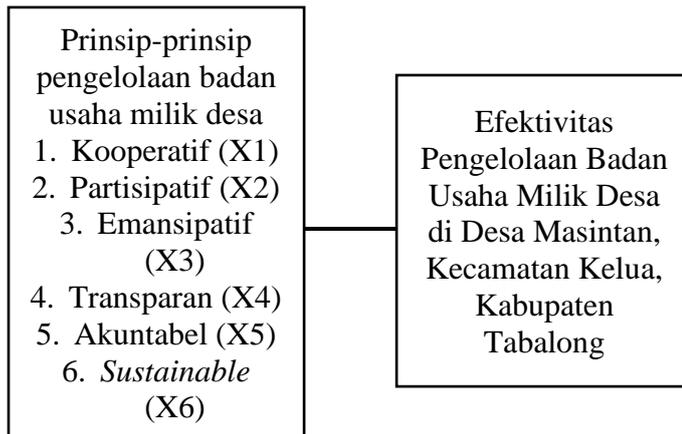
organisasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa target pelayanan air bersih yang dikelola oleh BUMDes Madani belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan



Gambar 2 Model penelitian efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis ekonomi kerakyatan, di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

sebelumnya. Target pendapatan yang diharapkan dari BUMDes Madani yang mengelola pasokan air bersih juga masih belum tercapai secara maksimal, sesuai dengan tujuan awal. Pendapatan dari kegiatan mengelola pasokan air bersih oleh BUMDes Madani belum memiliki dampak yang signifikan pada PADes. Sementara itu, indikator integrasi menunjukkan bahwa BUMDes Madani telah berjalan dengan baik. Keberadaan BUMDes Madani telah dikenal oleh masyarakat Desa Santan Tengah dan BUMDes Madani telah menjalin komunikasi dengan organisasi lain. Meskipun pencapaian target terkait pasokan air bersih belum merata, BUMDes Madani terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Santan Tengah, juga BUMDes Madani menjaga hubungan kerjasama dengan organisasi lain sebagai bagian dari upaya membangun kerjasama yang lebih luas. Indikator adaptasi menunjukkan bahwa BUMDes Madani telah berhasil beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini terlihat dari kebijakan pembayaran yang tidak memberatkan pengguna air bersih yang dikelola oleh BUMDes Madani. Kebijakan ini mengindikasikan bahwa BUMDes Madani telah berhasil menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi masyarakat Desa Santan Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariani dan Suryani (2021) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Masintan, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong” bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis pengelolaan BUMDes di Desa Masintan, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, serta menentukan sejauh mana efektivitas pengelolaan BUMDes tersebut. Upaya dalam menjawab tujuan penelitian ini, digunakan enam pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yaitu pendekatan kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan



Gambar 3 Model penelitian efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Masintan, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong

berkelanjutan. Hasil penelitian ini dalam konteks pendekatan kooperatif menunjukkan kurangnya kerjasama antara BUMDes dan permintaan masyarakat. Pendekatan partisipatif mengungkapkan bahwa masyarakat masih kurang aktif dalam memberikan dukungan dan kontribusi untuk memajukan usaha BUMDes. Akan tetapi, dalam pendekatan emansipatif, pengurus BUMDes telah menunjukkan tingkat emansipasi yang baik dengan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, golongan, atau agama dalam pelayanan. Pendekatan transparan mengungkapkan bahwa proses kegiatan BUMDes belum sepenuhnya terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat, baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaan kegiatan. Melalui pendekatan akuntabel, kemajuan BUMDes di Desa Masintan masih terbatas, terutama karena usaha mereka hanya terbatas pada toko retail. Pendekatan berkelanjutan menunjukkan bahwa usaha toko retail BUMDes di Desa Masintan belum berkembang dengan baik karena ketersediaan barang yang kurang lengkap, sehingga banyak masyarakat lebih memilih toko retail lain yang menawarkan lebih banyak barang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusbandrijo *et al.* (2018) mengungkapkan bahwa Kabupaten Ponorogo memiliki potensi wisata yang beragam, termasuk wisata alam, budaya, religi, kuliner, seni budaya dan ekonomi kreatif. Akan tetapi, pengembangan sektor pariwisata di kabupaten ini belum mencapai tingkat optimal karena terbatasnya sosialisasi dan komunikasi serta infrastruktur menuju destinasi wisata yang masih kurang memadai. Selain itu kurangnya sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pariwisata juga menghambat potensi wisata kabupaten ini untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Model pengembangan wisata di Kabupaten Ponorogo dimulai dengan identifikasi potensi wisata yang ada dan integrasi manajemen pengembangan wisata. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kolaborasi antar berbagai potensi wisata yang ada. Sebagai bagian dari dukungan pengembangan ini, diperlukan dukungan hukum dalam bentuk peraturan daerah. Pengembangan wisata juga harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan semua pihak terkait, sehingga setiap pemangku kepentingan memiliki tanggung

jawab dalam mencapai keberhasilan program ini. Semua pihak yang terlibat juga harus berkontribusi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

2.3 Unit Usaha Pengelolaan Kawasan Wisata

Desa-desanya yang ada di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan variasi yang mencirikan masing-masing dari mereka. Mereka memiliki beragam ciri khas yang membedakan satu sama lain. Selain itu, tipologi desa di seluruh wilayah Indonesia saat ini dapat dikategorikan menjadi delapan jenis yang berbeda termasuk desa kehutanan, perkebunan, pertanian, ladang, pesisir, peternakan, industri atau jasa dan pertambangan (Suparji 2019).

Kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi pedesaan bertujuan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan beragam aktivitas ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa dengan fokus pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk desa. Saat ini, sebagian besar ekonomi pedesaan masih sangat terkait dengan sektor pertanian. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan yang mengatur pengembangan semangat berwirausaha di sektor pertanian. Konsep ini telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Pengembangan semangat berwirausaha dalam sektor pertanian atau peningkatan produksi pangan ialah upaya untuk melaksanakan rencana pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi arus migrasi penduduk desa ke perkotaan dalam mencari penghidupan yang lebih baik (Alsos *et al.* 2011).

Saat ini, pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan telah mengalami perubahan yang efektif melalui kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Peran pemerintah dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan ialah sebagai pengatur yang berusaha untuk mendorong partisipasi penuh masyarakat lokal dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Salah satu cara optimal untuk menggunakan sumber daya lokal ialah melalui pengembangan pariwisata dengan pendekatan ekowisata. Konsep ekowisata ini menggabungkan wisata dengan upaya konservasi alam, pemberdayaan ekonomi lokal dan penghormatan terhadap keragaman budaya dan tradisi. Terjadinya pergeseran dari model pariwisata konvensional ke model ekowisata disebabkan oleh adanya kejenuhan dikalangan wisatawan terhadap objek wisata buatan atau yang sengaja diciptakan. Pergeseran ini menciptakan peluang yang signifikan untuk menarik baik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi tujuan wisata yang mengutamakan aspek alam dan budaya lokal (Satria 2009).

Pariwisata umumnya dianggap sebagai salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pengembangan sektor pariwisata diyakini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat yang terdampak oleh perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal tercermin dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri pendukung yang mendukung aktivitas pariwisata. Sebagai dukungan dari pengembangan sektor pariwisata, perlu adanya integrasi baik di antara sub-sektor pariwisata maupun dengan sektor-sektor pendukung lainnya yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, pariwisata juga diakui sebagai sumber kontribusi yang signifikan dalam mendapatkan devisa melalui kunjungan wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri (Desiati 2013; Adinugraha *et al.* 2018).

Sebelum berkembangnya agrowisata, konsep ekowisata telah tumbuh terlebih dahulu. Ekowisata yang berkembang dengan cepat dan mendapatkan perhatian serius di seluruh dunia, telah membawa konsep wisata baru yang dikenal sebagai agrowisata. Situasi saat ini di negara-negara berkembang, pengembangan ekowisata menjadi salah satu cara untuk menjaga sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara tersebut dan juga sebagai alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Agrowisata telah berhasil dikembangkan diberbagai negara seperti Swiss, Selandia Baru, Australia dan Austria, sedangkan Amerika Serikat baru-baru ini mulai mengembangkan agrowisata di negara bagian California. Agrowisata ialah bentuk wisata yang memanfaatkan kegiatan pertanian sebagai objek wisata. Tujuan dari agrowisata ialah untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas, pengalaman rekreasi yang berbeda dan menghubungkan sektor pertanian dengan industri pariwisata (US Congress 1992; Rilla 1999; Utama 2021).

Melalui konteks peran penting sektor pariwisata, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan aspek sosial dan budaya. Salah satu upaya yang diyakini dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata ialah melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata harus didasarkan pada kreativitas dan inovasi yang menciptakan keunikan tersendiri bagi desa tersebut. Melalui kreativitas dan inovasi yang menciptakan keunikan tersebut, akan meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan. Wisatawan akan memiliki lebih banyak pilihan untuk mengunjungi destinasi wisata yang ditawarkan oleh desa-desa yang mengembangkan dan mengelola wilayah wisata mereka menjadi desa wisata (Wibhisana 2021).

Keberadaan desa wisata saat ini memiliki daya tarik yang menarik bagi para wisatawan. Ketertarikan ini bukan hanya berasal dari berbagai macam suku, tradisi, dan budaya yang ada di setiap desa, tetapi juga didukung oleh keanekaragaman alam yang ada diberbagai desa di Indonesia. Daya tari wisata harus dijaga dan ditingkatkan terus-menerus. Oleh karena itu, desa harus memiliki prinsip untuk menjaga alam dan warisan budaya mereka. Pengembangan desa wisata ialah pilihan yang diambil karena saat ini pemerintah mendukung pengembangan ini. Pemerintah memberikan dukungan ini bukan hanya karena pariwisata berperan penting dalam pendapatan devisa negara, tetapi juga karena pengembangan desa wisata dapat berkontribusi pada perlindungan alam. Perlindungan alam dapat tercapai melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, di mana masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan agar kunjungan wisatawan bertambah (Mustangin *et al.* 2017; Syah 2017).

Hasil penelitian Windrawanto *et al.* (2019) dengan judul “Pelatihan dan Pendampingan Kelompok Pemuda dalam Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Kawasan Objek Wisata Candi Cetho” mengungkapkan bahwa objek wisata Candi Cetho telah menjadi pilihan menjanjikan bagi para wisatawan. Objek wisata ini memiliki potensi dan peluang yang perlu dikembangkan untuk mendukung destinasi utamanya, yaitu Candi Cetho. Potensi dan peluang ini terutama terletak pada area perkemahan di sekitar objek wisata Candi Cetho. Akan tetapi, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama oleh pemuda yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Penting untuk meningkatkan dukungan dari sumber daya manusia terutama pemuda, karena wisatawan merasa senang ketika tuan rumah ramah dan melayani dengan baik. Peningkatan dukungan sumber daya manusia juga dapat



meningkatkan pengelolaan area wisata dan pengembangan destinasi pendukung di sekitar objek Candi Cetho. Selain peningkatan dukungan sumber daya manusia, kerjasama dari pihak-pihak terkait dalam pengelolaan objek wisata Candi Cetho juga sangat penting. Kerjasama ini dapat memperluas jaringan yang mendukung kreativitas dan inovasi, serta mengembangkan potensi wisata pendukung seperti wisata budaya, religi, alam dan kuliner di sekitar Candi Cetho.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Istiyanti (2020) dalam penelitian berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening” terungkap bahwa kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata di desa tersebut, khususnya dalam pengembangan wisata budaya, seperti panahan (Sarapala). Masyarakat Desa Sukawening juga menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti berbagai kegiatan pemberdayaan yang berhubungan dengan pengembangan wisata. Setelah mengikuti berbagai kegiatan, masyarakat mampu mengaplikasikan hasil dari sosialisasi yang mereka terima, seperti pengelolaan PAM desa. Selanjutnya, BUMDes Sukawening berhasil mengembangkan usaha baru yaitu produksi es tebu. Pengurus BUMDes juga memiliki rencana untuk melakukan pembaruan dalam kepengurusan guna memperbarui ide-ide dalam pengembangan BUMDes untuk masa depan.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Implementasi layanan sosial di Korea mencakup arti luas dari istilah tersebut dan menjelaskan bahwa layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup baik individu maupun masyarakat secara menyeluruh (Jung 2009; Lee 2010). Layanan sosial yang diterapkan di Inggris, Korea dan Amerika Serikat digunakan untuk mendukung kesejahteraan sosial di ketiga negara tersebut (Lee *et al.* 2019).

Kesejahteraan merujuk pada kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk makan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, akses pendidikan formal atau informal dan pekerjaan yang mencakupi untuk menjalani hidup yang bebas dari kemiskinan, ketidakpahaman, ketakutan atau kekhawatiran, menciptakan keamanan dan kedamaian dalam hidupnya baik secara fisik maupun emosional (Fahrudin 2012).

Kesejahteraan juga bisa dipahami sebagai elemen kunci dalam menjaga serta memelihara stabilitas sosial dan ekonomi. Hal ini penting untuk mengurangi kemungkinan timbulnya rasa iri di dalam masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memadai atau campur tangan pemerintah dalam mengatur ekonomi sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi (Sari dan Pratiwi 2018).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah salah satu metode untuk menilai tingkat kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup ini tercermin dalam aspek-aspek seperti tingkat pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi yang ditentukan oleh pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang memadai, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan, ketika kesehatan masyarakat buruk maka produktivitas mereka menurun yang pada gilirannya mengurangi pendapatan mereka. Pendapatan yang

rendah dapat menghambat akses masyarakat ke pendidikan dan layanan kesehatan karena terbatasnya sumber daya finansial, jika situasi ini berlanjut maka akan berdampak negatif pada IPM yang mengukur kualitas hidup masyarakat (Ndakularak *et al.* 2017). Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan IPM melalui jalur pendidikan formal mencakup: menyediakan fasilitas pendidikan prasekolah yang memadai, memberikan akses pendidikan dasar selama 9 tahun, menyediakan pendidikan menengah atas, kejuruan menengah dan pendidikan tinggi serta menyelenggarakan kursus-kursus keprofesionalan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang (Teja 2015).

Sewaktu berbicara tentang pembangunan manusia, terdapat beragam pendapat dan perkembangan teori yang relevan. Mulanya, pandangan klasik tentang pembangunan manusia hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan per kapita dan rasio produk domestik bruto (PDB) tanpa mempertimbangkan aspek-aspek pendukung lainnya. Akan tetapi, kemudian UNDP (*United Nation Development Programme*) memperkenalkan konsep baru dalam mengukur pembangunan manusia yang dikenal sebagai IPM. Konsep baru yang diintroduksi oleh UNDP dengan nama IPM mampu menjelaskan bagaimana masyarakat mengakses hasil pembangunan melalui aspek-aspek seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. IPM mencakup dimensi-dimensi fundamental, termasuk umur panjang, pengetahuan dan tingkat kehidupan yang layak. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada tahun 1995 UNDP memperbaiki paradigma yang mendasari dimensi-dimensi dasar dalam IPM tersebut. Paradigma yang berkembang dalam dimensi dasar yang terkandung dalam IPM saat ini mencakup empat pendekatan yaitu produktivitas, ekuitas, kesinambungan dan pemberdayaan. Produktivitas mengacu pada kemampuan masyarakat terhadap peluang ekonomi dan politik, dengan menghapuskan hambatan-hambatan yang mungkin ada. Kesinambungan berarti bahwa akses dan peluang harus dijaga agar tidak hanya dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang. Pemberdayaan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan, dengan tujuan yang melebihi sekadar kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan berperan sebagai agen pertumbuhan yang efektif, dengan penekanan pada peningkatan kemampuan, kreativitas dan produktivitas mereka (Yektiningsih 2018).

IPM digunakan oleh berbagai negara di seluruh dunia dengan maksud untuk menilai pencapaian rata-rata suatu negara melalui tiga faktor utama yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup. Selain sebagai alat pengukuran pencapaian rata-rata negara dalam ketiga faktor tersebut, IPM juga berguna untuk mengklasifikasikan negara atau wilayah ke dalam kategori maju, berkembang atau tertinggal. Selain itu, IPM juga mampu mengukur dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Utami 2020). Davies dan Quinlivan (2006) berpendapat bahwa IPM ialah sebuah metode pengukuran yang membandingkan angka harapan hidup, tingkat melek huruf, kualitas pendidikan dan standar hidup yang layak di seluruh negara di dunia. Angka melek huruf di Indonesia telah digantikan oleh angka harapan pendidikan dan angka tahun pendidikan karena peningkatan mutu pendidikan yang terjadi di negara ini. Hal ini mencerminkan kesesuaian dengan perkembangan di Indonesia.



Kesejahteraan keluarga dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kemakmuran suatu daerah yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Pemerintah telah menerapkan kebijakan peningkatan upah bagi pekerja setiap tahun dan jam kerja telah disesuaikan untuk para pekerja. Meskipun produktivitas tinggi, masih ada banyak penduduk diberbagai kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang termasuk dalam golongan miskin atau belum mencapai tingkat sejahtera (Widyastuti 2012).

Hasil penelitian yang menggunakan empat pendekatan yaitu rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang terdiri dari 66 responden ialah sebagai berikut: 42 responden (63,63%) masuk dalam kategori pra sejahtera, 21 responden (31,82%) masuk dalam kategori sejahtera I dan 3 responden (4,56%) masuk dalam kategori sejahtera II. Apabila dilihat dalam konteks Upah Minimum Kabupaten (UMK) Batubara pada tahun 2016 sebesar Rp2.313.625, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh responden dianggap miskin karena pendapatan mereka masih jauh di bawah UMK tersebut (Rosni 2017).

Keberhasilan yang diraih oleh BUMDes Kedungjero dalam memberdayakan masyarakat telah memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi masyarakat dengan cara meningkatkan usaha mereka. Selain itu, ini juga membantu masyarakat dalam proses pengembalian dana pinjaman, dimana mereka hanya perlu membayar cicilan bulanan sebesar lima persen dari jumlah pinjaman selama satu tahun. Keuntungan sebesar lima persen tersebut dialokasikan untuk unit jasa dan PADes yang pada gilirannya tetap mendukung berbagai kegiatan yang diperlukan oleh pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Sehingga BUMDes Kedungjero telah berhasil mengembangkan dirinya dan tidak mengalami kerugian modal (Pangestu 2020).

Tidak seperti penelitian sebelumnya, Skoufias dan Vinha (2013) mengukur kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan pendekatan pendapatan dan konsumsi. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran kesejahteraan secara umum, langsung dan dapat diamati, terutama setelah terkena dampak guncangan iklim eksternal. Pengembangan pengukuran kesejahteraan masyarakat yang memanfaatkan pendekatan pendapatan dan konsumsi telah dijalankan oleh Garbero dan Muttarak (2013) dengan menerapkan lima pendekatan. Kelima pendekatan tersebut mencakup pengeluaran untuk kebutuhan pangan, pengeluaran untuk barang dan jasa selain pangan, pengeluaran produktif dalam sektor pertanian, pengeluaran untuk pendidikan dan pendapatan.

Hasil penelitian Mangantar (2018) menyiratkan bahwa kemandirian pendapatan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wuri *et al.* (2015) yang mengungkapkan bahwa dampak ekonomi dari adanya Kampung Wisata Sosro telah memungkinkan warga Sosrowijayan Wetan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk gizi, pakaian, tempat tinggal, perabotan rumah tangga, biaya perawatan medis serta memfasilitasi pendidikan mereka. Selain dampak ekonomi, Kampung Wisata Sosro juga berdampak sosial seperti peningkatan pengetahuan masyarakat, perkembangan kemampuan berbahasa asing dan mendorong komunikasi yang lebih aktif serta motivasi yang tinggi untuk mengejar pendidikan formal.

BUMDes Genta Persada telah aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tribubeneng melalui sejumlah unit usaha yang dimilikinya,

termasuk unit usaha simpan pinjam, layanan pengelolaan sampah, *money changer* dan kegiatan perdagangan. Selain menciptakan peluang pekerjaan yang berdampak besar bagi warga desa, pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut, BUMDes Gentha Persada juga berperan positif dalam meningkatkan PADes Tribubeneng dengan membagi hasil keuntungan dari usahanya. Sementara itu, BUMDes Bhuana Utama juga telah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keberhasilan ini tercermin melalui berbagai dimensi. Melalui dimensi sosial, BUMDes Bhuana Utama mencapai skor 10.712, yang berada pada kisaran skor 10.404 – 12.851. Melalui dimensi masyarakat sipil, BUMDes ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan skor 11.115, yang juga berada dalam kisaran skor 9.284 – 11.423. Selain itu dalam dimensi inovasi, BUMDes Bhuana Utama memberikan kontribusi positif dengan skor 12.284, yang juga berada dalam kisaran skor 10.404 – 12.851. Terakhir dalam dimensi ekonomi, BUMDes Bhuana Utama memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kisaran skor antara 10.404 – 12.851. Hal ini menunjukkan efektivitas BUMDes Bhuana Utama dalam berkontribusi pada kesejahteraan anggota dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, baik BUMDes Gentha Persada maupun BUMDes Bhuana Utama telah berhasil dalam usaha mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau anggota mereka melalui beragam inisiatif dan pengelolaan unit usaha (Pradnyani 2019; Utami *et al.* 2019).

2.5 Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat

Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan dampak positif, terutama dalam mengubah orientasi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desanya. Hal ini terwujud melalui pemberian kewenangan yang lebih luas terhadap otonomi desa. Selain memberikan wewenang dalam mengatur otonomi desa, UU No. 6 Tahun 2014 juga memberikan pemerintah desa kewenangan yang lebih besar dalam hal pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Melalui konteks ini, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa harus didasarkan pada pemanfaatan optimal potensi, peluang dan kapasitas yang dimiliki oleh desa tersebut (Yani *et al.* 2019).

Pasal 87 dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pembentukan BUMDes dengan prinsip menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong serta memberikan kewenangan kepada BUMDes untuk beroperasi dalam sektor ekonomi dan atau layanan publik sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 88 dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa desa dapat membentuk BUMDes setelah mencapai kesepakatan melalui musyawarah bersama warga desa dan penetapannya diatur melalui peraturan desa (PerDes).

Pasal 89 dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai penggunaan hasil dari pengelolaan BUMDes untuk keperluan pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, memberikan bantuan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu melalui berbagai bentuk seperti hibah, bantuan sosial dan juga melalui program dana bergulir yang telah diamanatkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Perencanaan pembangunan desa yang efektif selalu bergantung pada kolaborasi. Biasanya, kolaborasi ini melibatkan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa (LPMD) dan kepala desa. LPMD dan kepala desa perlu menjaga kerjasama yang kuat selama proses perencanaan untuk memastikan tujuan pembangunan desa tercapai dengan lancar. Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan di wilayah pedesaan serta untuk mempromosikan kolaborasi antarorganisasi di daerah tersebut guna meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa setempat (Rafsanzani *et al.* 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015) berjudul “Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014-April 2015)” menunjukkan bahwa pelaksanaan program oleh BUMDes di Desa Babadan telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat, terutama keluarga miskin (RTM) terhadap berbagai program yang telah dijalankan oleh BUMDes selama setahun. Selain itu, beberapa faktor memengaruhi kinerja BUMDes Desa Babadan. Salah satunya ialah kemampuan BUMDes Desa Babadan dalam merumuskan misi yang konkret dan terperinci. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Babadan secara keseluruhan, khususnya bagi RTM. Melalui dukungan misi yang jelas ini, BUMDes Desa Babadan telah melaksanakan sejumlah program seperti pendirian unit-unit usaha seperti simpan pinjam, kredit sepeda motor dan penyewaan lahan pertanian. Masyarakat Desa Babadan kemudian melihat BUMDes sebagai opsi pertama untuk mengatasi masalah modal karena telah mempercayai dan membuktikan kredibilitasnya sebagai lembaga keuangan yang lebih baik daripada lembaga keuangan masyarakat (LKM) lainnya. Hasil penelitian ini juga mencerminkan harapan masyarakat Desa Babadan agar BUMDes terus berinovasi dan menjalankan program-program baru yang dapat lebih membantu kelompok RTM di masa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo *et al.* (2021) dengan judul “Badan Usaha Milik Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Rotan Mulya” bertujuan untuk mengevaluasi strategi dan efektivitas BUMDes Mulya Bersama Desa Rotan Mulya dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis kesadaran, pelatihan, pendampingan dan evaluasi. Pendekatan kesadaran telah memberikan hasil yang positif, dengan BUMDes menggunakan kelompok sebagai alat intervensi untuk mendekati masyarakat, memberikan pencerahan, motivasi serta berbagai pengetahuan dan keterampilan. Tujuan utamanya ialah mendorong masyarakat agar mampu mengelola sumber daya alam yang tersedia di desa. Pendekatan melalui pelatihan juga berhasil dengan baik, dimana masyarakat menunjukkan peningkatan antusiasme setelah menerima pelatihan. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka memulai usaha, meningkatkan pendapatan mereka dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Selain itu, masyarakat telah diberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menjalankan usaha. Pendekatan pendampingan berhasil karena BUMDes terlibat aktif dalam membantu masyarakat mengatasi masalah yang muncul selama mengelola usaha mereka. Hal ini membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dalam mengelola potensi desa. Pendekatan evaluasi juga telah berjalan dengan baik, dengan BUMDes dan pemerintah desa mengevaluasi kelayakan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat juga diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang masalah dan kekurangan yang mereka alami. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi agar usaha yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan harapan mereka. Efektivitas BUMDes Mulya dinilai berdasarkan sejumlah faktor, termasuk ketepatan waktu, ketepatan dalam menghitung biaya, pemilihan yang tepat, penentuan tujuan yang sesuai, kemampuan berpikir yang tepat, pelaksanaan perintah yang tepat dan pencapaian sasaran yang sesuai. Pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini dinilai melalui prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, BUMDes Mulya telah efektif dalam memberdayakan masyarakat meskipun belum mencapai tingkat optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dan Sutarna (2018) dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Kawasan Pertambangan Emas di Kabupaten Sumbawa Barat” memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas program BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan kawasan pertambangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat. Keunggulan dari program yang dijalankan oleh BUMDes meliputi kemudahan akses keuangan dan peningkatan ekonomi rumah tangga. Kemudahan akses keuangan yang diberikan oleh BUMDes membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan mereka, terutama dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang kaya di desa tersebut. Selain itu, BUMDes juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi aset yang lebih merata. Akan tetapi, program BUMDes juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya ialah kurangnya sumber daya manusia yang mengelola BUMDes. Program simpan pinjam yang dikelola oleh BUMDes masih belum mencapai perkembangan yang signifikan karena minimnya personel yang terlibat dan banyaknya pengurus BUMDes yang memiliki jabatan ganda ditempat lain, sehingga program ini seringkali dianggap sebagai sampingan. Selain itu, rendahnya perencanaan usaha juga menjadi kendala. Rencana usaha harus disusun dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masyarakat serta kurangnya perencanaan yang baik dapat mengakibatkan kegagalan dalam pengembangan usaha. Secara keseluruhan, keberadaan BUMDes di wilayah pedesaan pertambangan emas di Kabupaten Sumbawa Barat masih belum mencapai potensi maksimalnya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa serta kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasa *et al.* (2021) dengan judul “Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Amertha Sudha Sidakarya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa” bertujuan untuk menganalisis pengelolaan BUMDes sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta mengevaluasi efektivitas BUMDes Desa Sidakarya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sidakarya. BUMDes Sari Amertha Sudha Sidakarya didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa Sidakarya. Akan tetapi, dalam praktiknya BUMDes ini belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan tersebut. BUMDes Sari Amertha Sudha Sidakarya mengelola usaha warung serba ada (*waserda*). Pengelolaan *waserda* ini perlu ditingkatkan, bukan hanya sebatas meningkatkan pendapatan, tetapi juga dengan mengelola dan mengurangi sampah secara efisien. BUMDes Sari Amertha Sudha Sidakarya juga harus mempertimbangkan pembentukan program-program baru yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa



Sidakarya. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam berbagai aspek pengelolaan BUMDes, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Selain itu, ada tiga hal kunci yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan BUMDes yaitu penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes, administrasi dan pelaporan keuangan yang transparan serta pengembangan unit usaha. Secara keseluruhan, BUMDes Sari Amertha Sudha Sidakarya telah memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidakarya. Hal ini tercermin dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam membantu mereka yang menghadapi masalah modal dalam mengembangkan usaha melalui program waserda yang dikelola oleh BUMDes. Masyarakat Desa Sidakarya juga telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes, dari perencanaan hingga evaluasi. Kehadiran BUMDes memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sidakarya melalui berbagai bentuk bantuan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

III KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

3.1.1 Konsep Badan Usaha Milik Desa

BUMDes merupakan entitas ekonomi yang berlokasi di desa. Maksud pendirian BUMDes, sesuai dengan definisi UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 6 ialah untuk menampung dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan. Hal ini melibatkan kegiatan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tradisi, budaya dan kondisi wilayah setempat serta kegiatan ekonomi yang dikelola oleh masyarakat melalui program-program yang diberikan oleh berbagai tingkat pemerintahan, seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Selain itu, BUMDes juga dapat menjalankan program kerjasama dengan lembaga pendidikan dan Perusahaan dengan tujuan umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memberikan pemerintah desa kewenangan untuk mengelola wisatanya secara mandiri, salah satu wujudnya ialah melalui lembaga ekonomi tingkat desa yang dikenal sebagai BUMDes. BUMDes, yang berfokus pada aspek ekonomi, merupakan salah satu program yang dikelola langsung oleh desa untuk meningkatkan PADes. BUMDes memiliki dua peran utama, yaitu sebagai penopang otonomi desa dan sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat. Peran sebagai penopang otonomi desa bertujuan untuk mendorong pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi desa sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya. Konsep ini sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Kehadiran BUMDes diharapkan dapat merangsang dan memajukan ekonomi di tingkat desa. Filosofi BUMDes harus didasarkan pada semangat kolaborasi dan swadaya sebagai langkah untuk memperkuat fondasi ekonomi lembagi ini. Melalui tahap ini, BUMDes akan berperan aktif dalam upaya meningkatkan PADes dengan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi di komunitas desa, dimana BUMDes menjadi lembaga yang mengkoordinasi dan mendukung semua kegiatan ekonomi masyarakat desa (Prihatin *et al.* 2018).

Kategori bisnis yang bisa diurus oleh BUMDes dapat digolongkan ke dalam enam klasifikasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada pasal 19, yaitu:

1. Bisnis Sosial

Usaha bisnis sosial dalam BUMDes mencakup pelayanan publik kepada masyarakat, dengan kata lain, bisnis yang memberikan manfaat sosial kepada masyarakat desa meskipun labanya lebih kecil. Contoh-contoh dari jenis bisnis sosial ini mencakup penyediaan air minum desa, penyediaan listrik desa, lumbung pangan serta pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

2. Bisnis Keuangan

Jenis usaha ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat desa, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk mendukung usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh mereka. Usaha ini memberikan kredit dan pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Contoh dari jenis usaha keuangan ini mencakup akses kredit dan pinjaman.

3. Bisnis Penyewaan

Jenis usaha ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan meningkatkan PADes. Contoh usaha ini mencakup penyewaan berbagai fasilitas seperti alat transportasi desa, peralatan pesta, gedung serbaguna, rumah toko, tanah milik BUMDes serta berbagai barang sewaan lainnya.

4. Bisnis Perantara

Jenis usaha ini bertujuan untuk menyediakan layanan perantara bagi masyarakat desa. Contoh usaha semacam ini mencakup layanan pembayaran tagihan listrik, pembayaran air dan penyelenggaraan pasar desa.

5. Bisnis Produksi atau Perdagangan

Jenis usaha ini biasanya ditemukan diberbagai daerah, baik dalam skala mikro maupun besar. Tujuan dari usaha produksi dan perdagangan yang dijalankan oleh BUMDes ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa terlebih dahulu sebelum memasarkannya dalam skala yang lebih luas. Contoh dari jenis usaha ini termasuk produk-produk pertanian, peralatan pertanian, bekas sumur tambang serta berbagai kegiatan produksi atau perdagangan produktif lainnya.

6. Bisnis Bersama

Jenis usaha ini mengadopsi sistem perusahaan induk yang mengelola berbagai unit kegiatan usaha yang dibangun oleh masyarakat desa dengan fokus pada skala lokal. Usaha bersama ini bertujuan untuk tumbuh dan dikelola secara sinergis. Contoh usaha semacam ini mencakup desa pariwisata dan berbagai usaha lain yang termasuk dalam industri yang sama.

Seharusnya BUMDes memiliki kapasitas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal kebiasaan positif seperti menabung. Mempromosikan kebiasaan menabung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mandiri di desa. Pengelolaan BUMDes di masa depan dapat melibatkan pihak ketiga, yang berpotensi memberikan dampak positif yang lebih luas, tidak hanya pada masyarakat desa tetapi juga secara umum. Saat masyarakat desa mendirikan BUMDes, mereka harus mempertimbangkan potensi ekonomi desa yang dapat mendukung, pemungutan pajak desa serta ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Semua pertimbangan ini harus dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Terdapat beberapa karakteristik masyarakat desa yang harus menjadi fokus layanan utama dari BUMDes, yaitu:

1. Sebagian besar penduduk desa yang memenuhi kebutuhan hidup mereka bekerja di sektor pertanian dan terlibat dalam usaha informal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

2. Orang-orang dengan tingkat pendapatan yang sangat rendah mengalami kesulitan dalam menabung sebagian dari penghasilan mereka untuk mengembangkan usaha di masa depan.
3. Orang-orang dipedesaan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri akhirnya bergantung pada pengusaha dengan modal yang lebih besar.
4. Orang-orang di desa yang terpengaruh oleh sistem pemasaran yang tidak menguntungkan mereka, sehingga pemilik modal yang lebih besar dapat mengendalikan harga dan pada akhirnya cenderung mengeksploitasi serta mendapatkan keuntungan besar dari usaha masyarakat desa (PKDSP 2007).

3.1.2 Konsep Efektivitas Badan Usaha Milik Desa

Efektivitas merujuk pada sejauh mana hasil yang diperoleh berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. Semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut (Handoko 2001; Mahmudi 2005). Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling mencolok melibatkan evaluasi keberhasilan program, pencapaian sasaran, tingkat kepuasan terhadap program, evaluasi *input* dan *output* serta pencapaian tujuan secara keseluruhan. Efektivitas program dapat diukur melalui kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya (Campbell *et al.* 1970).

Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas program yang telah dijelaskan oleh Sutrisno (2007), mencakup pemahaman program, ketepatan sasaran, kepatuhan pada waktu, pencapaian tujuan dan perubahan yang nyata. Akan tetapi, berbeda dengan pendapat sebelumnya, Soekanto (2013) menyatakan bahwa ada tiga indikator yang digunakan dalam menganalisis efektivitas program, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Mencapai tujuan ialah hasil dari serangkaian upaya yang harus dipandang sebagai proses. Oleh karena itu, untuk memastikan pencapaian tujuan akhir, perlu ada tahapan, baik dalam arti pembagian tugas maupun dalam arti waktu. Pencapaian tujuan itu sendiri melibatkan dua faktor, yaitu periode waktu dan sasaran yang merujuk pada target konkret.

2. Integrasi

Integrasi merujuk pada tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi, membangun konsensus dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Integrasi ini sangat terkait dengan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Parameter yang digunakan untuk mengukur adaptasi ialah proses perekrutan dan penempatan sumber daya manusia. Sebenarnya, efektivitas, rasionalitas dan efisiensi tidak dapat dipisahkan karena ketiga kriteria ini saling melengkapi dalam mencapai keberhasilan dalam berbagai kegiatan organisasi, baik dalam konteks pemerintah maupun bisnis.



Terdapat enam metode lain yang bisa diterapkan untuk menilai tingkat efektivitas (Dale 2004), yaitu:

1. *Effectivity* dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana program pemberdayaan masyarakat memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan akses pelayanan bagi penerima program sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhan mereka.
2. *Relevance* dalam konteks ini mengacu pada sejauh mana program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses pelayanan bagi penerima program berdasarkan pada kemampuan dan potensi yang ada di tingkat lokal.
3. *Sustainability* dalam konteks ini merujuk pada tingkat keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, yaitu sejauh mana penerima program dapat melanjutkan program tersebut setelah bantuan selesai atau dihentikan, baik dalam hal substansi program maupun manajemennya.
4. *Impact* dalam konteks ini mengacu pada sejauh mana dampak positif program pemberdayaan masyarakat terasa dan menyebar ke berbagai wilayah geografis.
5. *Empowerment* dalam hal ini mengacu pada sejauh mana penerima program merasakan peningkatan signifikan dalam hal keterampilan dan kemampuan mereka serta dalam hal manajemen dan organisasi.
6. *Participation* dalam konteks ini mengacu pada sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Efektivitas program BUMDes dalam pengelolaan kawasan wisata memiliki hubungan erat dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan merujuk pada pengelolaan pariwisata dengan fokus pada perkembangan kualitatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas hidup juga mencakup upaya untuk mengurangi dampak negatif pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (Muller 1997). Muller (1997) juga mengidentifikasi lima aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan konsep pariwisata yang berkelanjutan yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang sehat.
2. Kesejahteraan dari masyarakat lokal.
3. Melindungi sumber daya alam serta tidak merubah struktur alam.
4. Pertumbuhan yang sehat dari kebudayaan masyarakat.
5. Memaksimalkan dari kepuasan wisatawan melalui pelayanan yang baik, karena pada dasarnya wisatawan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan.

Sementara itu, konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang lain dikemukakan oleh Natori (2001), yang menekankan kepada:

1. Terpeliharanya mutu serta berkelanjutannya sumber daya alam dan budaya.
2. Meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat lokal.
3. Terwujudnya keseimbangan dari sumber daya alam dan budaya.
4. Terciptanya kesejahteraan masyarakat lokal serta terciptanya kepuasan dari wisatawan.

Efektivitas dalam penelitian ini berhubungan dengan program yang diteliti yaitu program pengelolaan kawasan wisata yang diterapkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

BUMDes di Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program pengelolaan kawasan wisata yang dijalankan oleh BUMDes tersebut berhasil. Pengukuran penelitian ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena program BUMDes memiliki dampak yang luas dan bersifat abstrak bagi masyarakat.

3.1.3 Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Inggris menggunakan konsep layanan sosial pribadi, yang memiliki makna lebih terfokus pada rasionalitas dibandingkan dengan pelayanan sosial (Cutler dan Waine 1994). Amerika Serikat juga menerapkan konsep layanan sosial yang memiliki makna lebih terbatas, yaitu layanan yang memberikan dukungan kepada kelompok yang kurang beruntung secara sosial dalam konteks perlindungan sosial, disabilitas dan permasalahan kesehatan, tetapi tidak mencakup aspek-aspek seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan dan aspek budaya (Kendall *et al.* 2006).

Negara Indonesia, mengartikan kesejahteraan sebagai sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu memiliki pandangan, tujuan dan gaya hidup yang unik dan ini akan menghasilkan penilaian yang bervariasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan (BKKBN 1992).

Konsep kesejahteraan dapat digambarkan sebagai pemahaman yang sejalan dengan konsep martabat manusia yang dapat diidentifikasi melalui empat indikator yaitu:

1. Rasa aman (*security*)
2. Kesejahteraan (*welfare*)
3. Kebebasan (*freedom*)
4. Jati diri (*identity*).

Indikator-indikator tersebut bisa dianggap sebagai metode untuk memeriksa dan menilai sejauh mana tingkat kesejahteraan individu, dimana terwujudnya perasaan aman, kesejahteraan, kebebasan dan identitas diri mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka (Nasikun 1996).

Kesejahteraan seharusnya tersedia untuk semua rumah tangga dan tidak hanya terbatas pada beberapa diantaranya. Sebagai bagian dalam mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga, dapat dilihat melalui seberapa besar persentase pengeluaran rumah tangga dalam perbandingan dengan pengeluaran rata-rata per kapita beras per tahunnya yang kemudian disesuaikan dengan harga beras rata-rata di daerah setempat. (Sajogyo 1998).

Menurut BPS (2015), terdapat sepuluh aspek yang digunakan sebagai pendekatan dalam menilai kesejahteraan masyarakat, antara lain pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, kondisi tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan rumah tangga, akses ke fasilitas kesehatan, mutu pendidikan, keterjangkauan pendidikan, tingkat keamanan dari kejahatan serta kemudahan akses teknologi dan informasi.

IPM digunakan sebagai alat untuk menggambarkan bagaimana penduduk mengakses hasil pembangunan, termasuk pendapatan, kesehatan, pendidikan dan aspek lainnya. IPM juga berfungsi sebagai indikator yang mengukur sejauh mana tingkat kualitas hidup manusia telah berhasil ditingkatkan serta digunakan untuk menilai peringkat atau tingkat kemajuan



pembangunan di suatu wilayah atau negara. Indonesia menggunakan IPM sebagai alat ukur kinerja pemerintah dan berperan dalam alokasi dana umum (DAU). IPM sendiri terdiri dari tiga dimensi pokok, yaitu umur panjang dan kehidupan yang sehat, pengetahuan serta standar hidup yang layak. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus memberikan perhatian khusus pada tiga dimensi ini agar dapat mencapai pembangunan manusia yang berkualitas (BPS 2022).

Maksud dari upaya pembangunan sosial dan ekonomi yang saat ini diterapkan secara bersamaan diberbagai daerah ialah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kehidupan penduduk atau masyarakat. Peningkatan tingkat kesejahteraan tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan per kapita dan kepemilikan aset oleh individu atau masyarakat, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas, seperti distribusi pendapatan yang lebih merata, akses yang lebih mudah ke peluang kerja, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah diakses serta hak individu untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat yang bebas (BPS Kabupaten Gunungkidul 2021).

3.2 Kerangka Pemikiran Operasional

Kabupaten Gunungkidul yang dianggap sebagai salah satu daerah penyangga untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan yang paling terlihat ialah migrasi penduduk usia produktif keluar dari Kabupaten Gunungkidul. Hal ini terjadi karena Kabupaten Gunungkidul memiliki upah minimum kabupaten (UMK) yang relatif rendah. Selain itu, daerah ini juga mengalami permasalahan terkait IPM yang rendah dan berakibat banyak orang tua mendorong anak-anak usia produktif mereka untuk mencari pendidikan serta pekerjaan di luar Kabupaten Gunungkidul. Akibatnya, mayoritas penduduk Kabupaten Gunungkidul saat ini ialah orang-orang lanjut usia.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyadari tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, mereka mengajak 144 desa yang berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul untuk mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui penerapan undang-undang ini, harapannya setiap desa di Kabupaten Gunungkidul akan membentuk dan mendirikan BUMDes. Langkah ini diambil untuk menciptakan peluang kerja bagi penduduk Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, melalui BUMDes diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Tindakan ini sangat relevan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Gunungkidul berkegiatan di pedesaan. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Gunungkidul, diharapkan dapat meningkatkan IPM di wilayah tersebut.

Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan yang bertindak sebagai pengelola BUMDes memiliki beragam program untuk mengoptimalkan potensi di wilayah desa mereka. Salah satu program unggulan yang mereka jalankan ialah pengelolaan kawasan wisata. Program ini diperkuat oleh penerapan Perda Kabupaten Gunungkidul No. 3 Tahun 2014, yang mengatur cara pengelolaan kawasan wisata untuk mendukung visi pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Akan tetapi, program pengelolaan kawasan wisata yang sedang mereka jalankan harus secara berkala dievaluasi. Tujuan evaluasi program ini ialah untuk menilai tingkat efektivitas program yang telah dijalankan serta sejauh mana program tersebut

berhasil mencapai tujuan dan maksudnya. Sebuah program BUMDes yang efektif ialah program yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi di masyarakat desa dan memberikan peluang pekerjaan bagi angkatan kerja produktif di desa tersebut. Selain itu, program BUMDes yang berhasil akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran mereka untuk menjaga sumber daya alam dan lingkungan desa dari potensi kerusakan. Evaluasi efektivitas program pengelolaan kawasan wisata yang dijalankan oleh BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan dapat menggunakan enam indikator yang telah diusulkan oleh Dale (2004). Keenam indikator digunakan untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil. Indikator tersebut meliputi indikator *effectivity*, indikator *relevance*, indikator *sustainability*, indikator *impact*, indikator *empowerment*, serta indikator *participation*. Selanjutnya, untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan terkait dengan program pengelolaan kawasan wisata, peneliti menggunakan enam indikator yang merupakan hasil kolaborasi BPS Kabupaten Gunungkidul (2021) dan BPS (2022). Indikator tersebut mencakup pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, kesehatan rumah tangga, kemampuan dalam mengakses fasilitas kesehatan, kualitas pendidikan serta kemampuan dalam mendapatkan pendidikan.

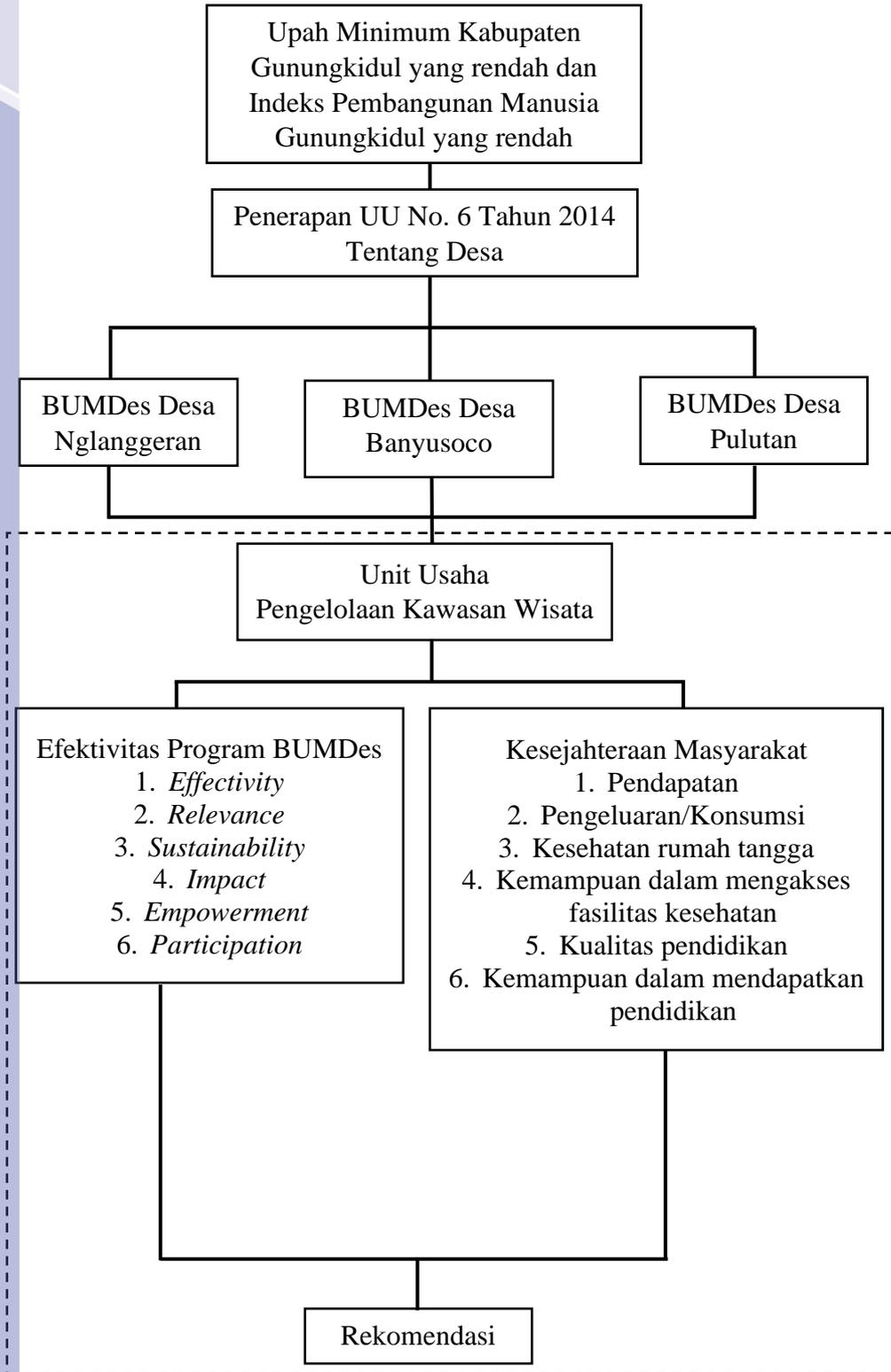
@Hak cipta milik IPB University

IPB University



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Gambar 4 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : Unit analisis
- : Hubungan

IV METODE PENELITIAN

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pemilihan lokasi yang disesuaikan secara sengaja (metode *purposive*). Pertama, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih karena memiliki upah minimum terendah di Pulau Jawa, yaitu sebesar Rp1.704.608, serta memiliki pertumbuhan IPM terendah di Pulau Jawa dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,115 poin per tahun pada periode 2019 – 2021. Kabupaten Gunungkidul dipilih karena memiliki upah minimum terendah di antara kabupaten dan kota lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar Rp1.900.000 dan juga memiliki pertumbuhan IPM yang rendah dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,100 poin per tahun pada periode 2019 – 2021.

Pemilihan desa melalui data hasil publikasi terkait dengan klasifikasi dan pengkategorian oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terutama data terkait desa dan BUMDes. Kabupaten Gunungkidul, memiliki mayoritas unit usaha yang dikelola oleh BUMDes ialah unit usaha pengelolaan kawasan wisata, khususnya yang menjalankan sistem agribisnis.

Desa Nglanggeran dipilih karena memiliki BUMDes yang mengelola unit usaha pengelolaan kawasan wisata dengan konsep *community-based tourism*. Konsep ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti karang taruna, kelompok sadar wisata (pokdarwis), petani kako, pengolah coklat dan peternak *maggot* dalam membangun wisata di Desa Nglanggeran. Selain itu, BUMDes Desa Nglanggeran juga telah mencapai tingkat kemajuan dan kemandirian yang baik.

Desa Banyusoco dipilih karena memiliki BUMDes yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola kawasan hutan. BUMDes Desa Banyusoco tergolong dalam kategori dasar

Desa Pulutan dipilih karena memiliki BUMDes yang mengelola unit usaha pengelolaan kawasan wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang berbasis agribisnis. BUMDes Desa Pulutan tergolong dalam kategori berkembang.

Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada bulan November 2022 – Januari 2023.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi) dan wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Kuesioner ini diarahkan kepada responden yang terlibat secara aktif dalam program BUMDes dan yang terkena dampak dari program BUMDes. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang mencakup jurnal, penelitian terdahulu, dan berbagai buku yang relevan dengan topik penelitian ini. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari instansi-instansi terkait seperti BPS, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan serta pihak terkait di Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan.

4.3 Metode Penentuan Sampel

Penelitian ini dalam menentukan sampel terbagi menjadi dua. Sampel dari anggota BUMDes menggunakan pendekatan *purposive sample* dengan menetapkan kriteria anggota aktif BUMDes yang telah berusia produktif untuk bekerja serta berdomisili di Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan, sedangkan sampel dari masyarakat terdampak kawasan wisata menggunakan pendekatan *stratified random sampling* dimana masyarakat yang dijadikan sampel memiliki tempat tinggal dengan radius 2 padukuhan dari pusat unit usaha pengelolaan wisata.

Desa Nglanggeran memiliki populasi sebanyak 2.715 individu menurut data agregat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022. Populasi tersebut, terdiri dari 1.350 pria dan 1.365 wanita dan sebanyak 1.871 diantaranya berusia dalam kelompok usia produktif.

Desa Banyusoco, berdasarkan data agregat yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 memiliki populasi sekitar 5.956 individu. Rinciannya ialah terdapat sekitar 2.958 pria dan 2.998 wanita, sementara yang termasuk dalam kelompok usia produktif berjumlah sekitar 3.995 orang.

Desa Pulutan, berdasarkan data agregat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 memiliki populasi sekitar 4.428 individu. Rinciannya ialah terdapat sekitar 2.148 pria dan 2.280 wanita, sementara yang termasuk dalam kelompok usia produktif berjumlah sekitar 2.979 orang. Total keseluruhan jumlah penduduk yang tergolong ke dalam usia produktif dari Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan mencapai 8.845 jiwa.

Penentuan jumlah sampel kemudian dibantu dengan menggunakan *Slovin Sample Size Formula* yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Total populasi

e = *Margin error* atau *margin of error*

Berdasarkan total keseluruhan jumlah penduduk yang tergolong ke dalam usia produktif dari Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan yang mencapai 9.108 jiwa, apabila dimasukkan ke dalam *Slovin Sample Size Formula* dengan *margin error* sebesar 10% maka akan diperoleh jumlah sampel sebesar:

$$n = \frac{8.845}{1 + 8.845(0,1)^2} = 99$$

4.4 Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data dengan metode studi pustaka ialah proses penelitian yang melibatkan analisis dan penyelidikan terhadap buku, literatur serta berbagai sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Metode observasi digunakan sebagai langkah awal dalam pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung situasi di lapangan. Metode observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi awal dan pemahaman tentang kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan.
3. Metode pengumpulan data melalui teknik wawancara dapat dilakukan dalam bentuk terstruktur maupun tidak terstruktur untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik wawancara perseorangan yang terpandu, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden telah dipersiapkan dengan baik. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan adanya bias dalam informasi yang diberikan oleh responden.
4. Kuesioner digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi secara tidak langsung melalui pertanyaan tertulis yang disampaikan melalui berbagai media. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam bentuk tidak terstruktur yang memuat beragam pertanyaan terbuka. Responden diberi kebebasan penuh untuk menjawab pertanyaan dan menyampaikan informasi berdasarkan pandangan dan pengalaman pribadi mereka. Pengisian kuesioner dilakukan oleh peneliti secara langsung untuk menghindari potensi bias dalam jawaban dan informasi yang diberikan oleh responden.

4.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis data yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Pendekatan analisis kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program BUMDes di Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan. Selain itu, analisis kuantitatif juga diterapkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan dampak program pengelolaan kawasan wisata yang dilaksanakan oleh BUMDes terhadap kesejahteraan mereka. Sementara itu, pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan peran berbagai lembaga yang terlibat dalam program BUMDes di ketiga desa tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel, SPSS (*Statistical Program for Social Science*) 26 dan Minitab 18.

4.5.1 Analisis Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan

Analisis terhadap Desa Nglanggeran, Banyusoco dan Pulutan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengenali kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh ketiga desa tersebut terkait dengan BUMDes di masing-masing desa. Selain itu, analisis ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi tujuan yang dikejar oleh BUMDes di ketiga desa tersebut.

4.5.2 Analisis BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco, dan BUMDes Desa Pulutan

Analisis BUMDes di Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami program-program yang telah dijalankan, menilai target-target

yang ingin dicapai melalui program-program tersebut dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program-program tersebut.

4.5.3 Analisis Efektivitas Badan Usaha Milik Desa

Analisis efektivitas program pengelolaan kawasan wisata yang dilakukan oleh BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan dapat dievaluasi menggunakan enam indikator yang diusulkan oleh Dale (2004), yakni *effectivity*, *relevance*, *sustainability*, *impact*, *empowerment* dan *participation*. Keenam indikator ini kemudian dimasukkan ke dalam kuesioner yang memanfaatkan skala likert untuk memberikan penilaian terhadap masing-masing indikator. Skala likert ini memberikan skor mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Setelah mengumpulkan data dari kuesioner dengan skala likert, data tersebut diolah ulang dengan memberikan skor pada setiap indikator. Skor-skor ini kemudian dijumlahkan untuk masing-masing indikator dan total skor dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu rendah (indeks 5 – 11), sedang (indeks 12 – 18) dan tinggi (indeks 19 – 25). Pengelompokan kelas tersebut telah sesuai dengan tujuan dari tabel distribusi frekuensi yaitu memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami dan mengkomunikasikan sejumlah data yang besar dengan lebih efektif. Data dapat diatur secara berurutan, baik dari nilai terendah ke tertinggi maupun sebaliknya guna mengelompokkan data yang memiliki frekuensi yang sama (Tandililing dan Ismail 2021).

Selanjutnya, analisis efektivitas program BUMDes dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan bantuan tabel jumlah, tabulasi silang, grafik atau diagram

4.5.4 Analisis Kesejahteraan Masyarakat

Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui enam indikator yang telah digabungkan dan diusulkan oleh BPS Kabupaten Gunungkidul (2021) dan BPS (2022), yaitu pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, kesehatan rumah tangga, kemudahan mengakses fasilitas kesehatan, kualitas pendidikan, kemudahan mendapatkan pendidikan. Keenam indikator ini dinilai dengan memberikan skor dari 0 hingga 10. Skor tersebut dimasukkan kedalam skala likert. Skala likert yang menggunakan 11 poin dengan kisaran 0 hingga 10 sangat umum digunakan dalam studi kesejahteraan subjek (Wu 2020; Deter 2021; Gerlich dan Wolbring 2021; Sohler *et al.* 2021). Skor 0 menunjukkan sangat tidak setuju, skor 1 menunjukkan tidak setuju, skor 2 menunjukkan cenderung tidak setuju, skor 3 menunjukkan netral, skor 4 menunjukkan cenderung setuju, skor 5 menunjukkan setuju, skor 6 menunjukkan lebih setuju, skor 7 menunjukkan sangat setuju, skor 8 menunjukkan sangat setuju sekali, skor 9 menunjukkan sangat setuju sepenuhnya dan skor 10 menunjukkan skor sangat setuju teramat. Setelah pengumpulan data dari kuesioner dengan skala likert, data tersebut kemudian diproses kembali. Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan, skor dari semua indikator dijumlahkan untuk mendapatkan skor akhir yang mewakili tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan ini kemudian dibagi menjadi tiga kelas: rendah (skor akhir 0 – 26), sedang (skor

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

akhir 27 – 47) dan tinggi (skor akhir 48 – 60). Pengelompokan kelas tersebut telah sesuai dengan tujuan dari tabel distribusi frekuensi yaitu memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami dan mengkomunikasikan sejumlah data yang besar dengan lebih efektif. Data dapat diatur secara berurutan, baik dari nilai terendah ke tertinggi maupun sebaliknya guna mengelompokkan data yang memiliki frekuensi yang sama (Tandililing dan Ismail 2021).

Analisis kesejahteraan masyarakat menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan bantuan tabel jumlah, tabulasi silang, grafik atau diagram. Data yang diperoleh akan diuji statistik untuk mengevaluasi perubahan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat, apabila sebaran data berdistribusi normal, uji beda menggunakan *Paired Sample t-Test*. Akan tetapi, apabila sebaran data tidak berdistribusi normal, maka uji beda menggunakan *Wilcoxon Signed-Rank Test*.

4.5.5 Analisis Pengaruh Efektivitas BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Analisis dampak BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dievaluasi dengan menggunakan korelasi rank *Spearman*. Adapun nilai r_s dirumuskan sebagai berikut oleh Spearman (1904) yang dijelaskan kembali oleh Zar (1972):

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{(n^3 - n)}$$

Keterangan:

- r_s = Nilai koefisien korelasi *Spearman*
- d_i = Selisih rank X dan Y pada observasi ke = i
- i = Observasi ke = i , untuk $i = 1, 2, 3, \dots, n$
- n = Banyaknya observasi

Nilai r_s bisa bertanda positif maupun negatif serta memiliki nilai mutlak maksimal 1 dan minimal 0. Nilai r_s dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Bila nilai $|r_s| = 0$, maka kedua variabel tidak berkorelasi.
2. Bila nilai $|r_s| = 1$, maka kedua variabel berkorelasi sempurna. Semakin tinggi nilai $|r_s|$, maka semakin kuat hubungan kedua variabel.
3. Tanda positif pada r_s menunjukkan bahwa kedua variabel berkorelasi searah, yakni bila variabel X semakin tinggi, maka variabel Y akan cenderung semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.

Korelasi rank *Spearman* digunakan untuk menentukan hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif ketika kedua variabel yang terlibat memiliki tingkatan ordinal serta data dari kedua variabel tidak perlu berasal dari sumber yang sama (Sugiyono 2013). Melalui pemaparan diatas, maka korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi rank *Spearman*,

dimana variabel X dan Y diukur melalui skala ordinal sehingga objek yang diteliti dapat diberikan peringkat secara berurutan. Uji korelasi rank *Spearman* dapat diterima apabila nilai $\alpha^6 < 0,05$ dimana variabel-variabel pengujian dianggap berhubungan, sementara itu apabila $\alpha^6 > 0,05$ maka variabel-variabel pengujian dianggap tidak memiliki hubungan. Berikut merupakan pedoman dalam memberikan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono (2013):

Tabel 3 Tingkat hubungan dalam analisis korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,19	Sangat Rendah
0,20 – 0,39	Rendah
0,40 – 0,59	Sedang
0,60 – 0,79	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2013)

Langkah analisis selanjutnya ialah menggunakan metode analisis regresi. Analisis regresi pada dasarnya ialah sebuah studi yang fokus pada hubungan antara satu variabel *dependent* (variabel terikat) dan satu atau lebih variabel *independent* (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata populasi dari variabel *dependent* berdasarkan nilai-nilai variabel *independent* yang telah diketahui. Pusat perhatiannya ialah untuk menjelaskan dan mengevaluasi sejauh mana hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel *independent*. Hasil dari analisis regresi ini berupa koefisien regresi yang menghubungkan variabel *dependent* dengan variabel *independent*. Koefisien ini diperoleh melalui proses pemodelan yang bertujuan, pertama untuk meminimalkan perbedaan antara nilai aktual variabel *dependent* dan nilai perkiraan variabel *dependent*. Kedua, untuk memaksimalkan korelasi antara nilai aktual dan perkiraan variabel *dependent* berdasarkan data yang ada (Subandriyo 2020).

Regresi berganda ialah metode statistik yang memungkinkan masuknya faktor-faktor tambahan ke dalam analisis secara terpisah sehingga dampak masing-masing faktor dapat diestimasi. Hal ini bermanfaat untuk mengukur pengaruh berbagai faktor yang berperan secara bersamaan terhadap satu variabel *dependent*. Terlebih lagi, karena adanya potensi bias akibat variabel yang tidak dimasukkan dalam regresi sederhana, regresi berganda seringkali menjadi penting bahkan ketika peneliti hanya tertarik pada pengaruh satu variabel *independent* (Sykes 1993).

Perlu dicatat bahwa dalam kasus yang sangat jarang terjadi, variabel *dependent* hanya dapat dijelaskan oleh satu variabel *independent*. Regresi berganda digunakan untuk menghindari bias akibat pengabaian variabel yang tidak dimasukkan (O'Brien dan Scott 2012). Persamaan matematikanya ialah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + e$$

- Keterangan:
- Y = Variabel *dependent*
 - α = Konstanta
 - β_n = Koefisien ke - n

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

X_n = Variabel *independent* ke - n
 e = Error
 .

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum

5.1.1 Profil Desa Nglanggeran

Desa Nglanggeran merupakan salah satu desa dari 144 desa yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul. Desa Nglanggeran memiliki luas 762,80 hektare. Wilayah utara dari Desa Nglanggeran berbatasan langsung dengan Desa Terbah, wilayah timur Desa Nglanggeran berbatasan langsung dengan Desa Nglegi, wilayah selatan Desa Nglanggeran berbatasan langsung dengan Desa Putat, serta wilayah barat Desa Nglanggeran berbatasan langsung dengan Desa Ngoro-oro dan Desa Salam. Potensi yang dimiliki oleh Desa Nglanggeran dimulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan wisata. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Nglanggeran mayoritas digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Lahan pertanian di wilayah Desa Nglanggeran digunakan untuk memproduksi padi, jagung, kacang kedelai, umbi-umbian lain, kacang tanah, dan jagung. Lahan perkebunan yang berada di wilayah Desa Nglanggeran digunakan untuk memproduksi mangga, rambutan, durian, sawo, pisang, lengkeng, sirsak, kedondong, melinjo, nanas, dan kopi. Lahan kehutanan yang terdapat dalam wilayah Desa Nglanggeran dimanfaatkan sebagai penghasil kayu hutan. Sementara itu, untuk potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Nglanggeran berupa ekowisata gunung api purba, Embung Nglanggeran, dan air terjun Kedungkandang serta curug Talang Purba. Selain itu juga Desa Nglanggeran memiliki budaya ketika peringatan hari besar Islam dengan menggelar acara kenduri, serta masyarakat Desa Nglanggeran seringkali mengadakan acara bersih dusun atau desa (Desa Nglanggeran 2013).

Desa Nglanggeran pada tahun 2021 melalui data yang telah dipublikasi tahun 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.715 jiwa yang terdiri dari 1.350 laki-laki dan 1.365 perempuan dengan jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 748 jiwa dan kepala keluarga perempuan sebanyak 134 jiwa, sehingga secara keseluruhan jumlah kepala keluarga di Desa Nglanggeran berjumlah 882 jiwa. Secara umum, Desa Nglanggeran memiliki permasalahan yang sama dengan desa-desa lain di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu migrasi penduduk. Tahun 2021, Desa Nglanggeran mencatat terdapat 10 orang pergi meninggalkan Desa Nglanggeran yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Tidak hanya penduduk yang pergi saja, Desa Nglanggeran juga mencatat terdapat 35 orang datang untuk tinggal di Desa Nglanggeran dengan rincian 17 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Selain migrasi penduduk, Desa Nglanggeran juga berhasil mencatat angka kelahiran pada tahun 2022. Jumlah bayi lahir yang tercatat oleh Desa Nglanggeran sebanyak 8 jiwa dengan rincian 6 laki-laki dan 2 perempuan. Selain angka kelahiran, Desa Nglanggeran juga mencatat angka kematian. Tahun 2022, terdapat 16 jiwa meninggal dunia yang merupakan penduduk Desa Nglanggeran dengan rincian 6 laki-laki dan 10 perempuan.

Tahun 2018, jumlah penduduk Desa Nglanggeran mencapai 2.598 jiwa, kemudian pada tahun 2019 jumlah penduduk Desa Nglanggeran mencapai 2.636 jiwa, tahun 2020 jumlah penduduk Desa Nglanggeran mencapai 2.688 jiwa dan pada tahun 2021 jumlah penduduk Desa Nglanggeran mencapai 2.715 jiwa, sehingga pertumbuhan jumlah penduduk Desa Nglanggeran dari tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami peningkatan positif. Tahun 2019, pertumbuhan jumlah penduduk Desa Nglanggeran meningkat sebesar 14,5 persen, kemudian pada tahun 2020 pertumbuhan jumlah penduduk Desa Nglanggeran meningkat sebesar 19 persen dan pada tahun 2021 pertumbuhan jumlah penduduk Desa Nglanggeran meningkat sebesar 9 persen. Mayoritas penduduk Desa Nglanggeran menganut agama Islam dengan jumlah penduduk yang menganut agama Islam mencapai 2.659 jiwa, kemudian yang menganut agama Katolik di Desa Nglanggeran mencapai 45 jiwa dan yang menganut agama Kristen di Desa Nglanggeran mencapai 11 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Nglanggeran memiliki pendidikan terakhir tamatan Sekolah Dasar atau SD dengan jumlah mencapai 621 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Nglanggeran bekerja sebagai petani atau buruh tani dengan jumlah mencapai 405 jiwa.



Gambar 5 Desa Nglanggeran

5.1.2 Profil BUMDes Desa Nglanggeran

Desa Nglanggeran yang termasuk ke dalam Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki potensi alam yang berlimpah. Potensi alam yang dimiliki oleh Desa Nglanggeran dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa Nglanggeran sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sejalan dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2014, Desa Nglanggeran membentuk badan usaha yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes yang dibentuk oleh Desa Nglanggeran dijadikan sebagai alat bantu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa. BUMDes yang dibentuk oleh Desa Nglanggeran memiliki nama BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran. Tujuan utama dari dibentuknya BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran oleh Desa Nglanggeran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong sektor perekonomian. Selain sebagai alat bantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran juga dijadikan alat bantu untuk mendorong peningkatan pendapatan asli desa (PADes) sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Dasar dari pendirian BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran diatur melalui Peraturan Desa No. 20/KPTS/2016 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri, Desa Nglanggeran serta Perdes Nglanggeran No. 06 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Mandiri, Desa Nglanggeran. Saat ini, BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran memiliki 4 unit usaha. Unit usaha pertama bergerak dalam bidang Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dimana unit usaha ini dibentuk pada tahun 2015 akan tetapi unit usaha ini baru dapat beroperasi optimal pada tahun 2018. Sumber sampah yang dapat ditampung oleh unit usaha ini berasal dari berbagai sektor, mulai dari sektor rumah tangga, sektor rumah makan, sektor penginapan, serta sektor lembaga-lembaga daerah yang terdapat di wilayah Desa Nglanggeran. Sampah yang sudah terkumpul kemudian dipilah dan dikelola berdasarkan dengan jenisnya, sehingga dapat dijadikan beberapa produk seperti belatung, biji plastik, kompos dan rosok.

Unit usaha kedua yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran adalah unit usaha ekonomi desa. Unit ekonomi desa yang dikelola oleh BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran dibentuk pada tahun 2017 dengan memberikan layanan simpan pinjam untuk masyarakat Desa Nglanggeran yang terkendala akan permodalan usaha.

Unit usaha ke tiga yang dimiliki dan dikelola oleh BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran adalah unit usaha grosir desa. Unit grosir desa menyediakan barang-barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Unit usaha ini masih mengalami kendala berupa sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga apabila masyarakat desa hendak melakukan pembelian harus memesan terlebih dahulu melalui telepon atau media sosial.

Unit usaha ke empat yang dimiliki dan dikelola oleh BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran adalah unit usaha kemitraan Desa Wisata Nglanggeran. Unit usaha ini merupakan hasil swadaya masyarakat dan untuk masyarakat dengan mengelola serta mengembangkan pariwisata yang dimiliki oleh Desa



Nglanggeran seperti Gunung Api Purba, Embung Nglanggeran, Air Terjun Kedung Kandang, Kampung Pitu, Karawitan, Gejog Lesung, Rasulan, Tingalan, *Videomaker*, Permainan Rakyat Tradisional, Agrowisata Embung, Ngekong dan Hidroponik. Desa Wisata Nglanggeran sendiri telah memiliki surat keputusan atau SK Bupati No. 212/KPTS/2020, pada tanggal 8 Mei 2020.

Konsep yang diusung oleh BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran, Desa Nglanggeran dalam menjalankan program pengelolaan kawasan wisata adalah *community-based tourism*. Konsep tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan dari masalah-masalah yang terjadi di Desa Nglanggeran seperti eksploitasi yang dilakukan di kawasan gunung api purba dengan cara pengambilan batunya dan penebangan pohon yang dilakukan secara ilegal. Konsep dari *community-based tourism* yang diusung oleh Desa Nglanggeran lebih menekankan kepada partisipasi masyarakat desa agar lebih peduli dengan sumber daya alam yang tersedia di desa. Selain itu juga, konsep tersebut dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan di Desa Nglanggeran agar arus urbanisasi yang terjadi dapat dikurangi. Konsep dari *community-based tourism* yang diusung oleh BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran, Desa Nglanggeran telah sesuai dengan UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dengan memberikan banyak manfaat kepada kesejahteraan masyarakat, kesetaraan, dan juga proporsionalitas. Desa Nglanggeran telah sukses menerapkan konsep *community-based tourism* tersebut, sehingga membuat Desa Nglanggeran seringkali dikunjungi oleh desa-desa lain baik yang berada di wilayah Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa dengan maksud untuk mempelajari tata kelola yang dilakukan oleh BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran, Desa Nglanggeran. Kesuksesan yang diraih oleh BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran, Desa Nglanggeran tidak luput dari permasalahan yang ada. Permasalahan yang terjadi adalah seluruh program yang dilakukan oleh Desa Nglanggeran guna mengurangi pengangguran dan arus urbanisasi faktanya masih belum dapat menampung angkatan kerja produktif dari masyarakat Desa Nglanggeran.



Gambar 6 Kawasan wisata Nglanggeran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

5.1.3 Profil Desa Banyusoco

Desa Banyusoco merupakan salah satu dari 144 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Desa Banyusoco memiliki luasan area mencapai 20,35 kilometer persegi dengan ketinggian wilayah mencapai 190, 50 di atas permukaan laut. Lahan Desa Banyusoco terbagi atas 3 wilayah, yaitu wilayah permukiman, wilayah pertanian dan wilayah kehutanan dengan masing-masing persentase penggunaannya sebesar 20 persen, 40 persen dan 40 persen. Besarnya persentase lahan pertanian dan kehutanan yang dimiliki oleh Desa Banyusoco menjadikan desa tersebut memiliki cukup potensi lahan penghijauan untuk terus dikembangkan. Mayoritas jenis tanah di wilayah Desa Banyusoco adalah tanah margalit yang mengakibatkan lahan pertanian di Desa Banyusoco apabila mengalami kemarau panjang tidak dapat digunakan karena lapisan tanahnya mengalami keretakan. Desa Banyusoco sendiri memiliki batas wilayah dibagian utara berbatasan langsung dengan Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo. Sementara itu, dibagian timur berbatasan langsung dengan Desa Bleberan, Kecamatan Playen. Bagian selatan Desa Banyusoco berbatasan langsung dengan Desa Girisoka, Kecamatan Panggang serta dibagian barat berbatasan langsung dengan Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo (Desa Banyusoco 2014).



Gambar 7 Desa Banyusoco

Mayoritas masyarakat Desa Banyusoco memiliki mata pencaharian sebagai petani sesuai dengan persentase lahan pertanian yang dimiliki oleh Desa Banyusoco. Selain itu juga, terdapat kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai peternak sapi, peternak kambing, peternak ayam kampung, dan pembudidaya ikan air tawar pada sektor

pertanian. Lahan pertanian yang dimiliki oleh Desa Banyusoco sepenuhnya tergolong dalam kategori lahan kering atau lahan pertanian tersebut hanya mengandalkan curah hujan saja. Komoditas pertanian yang terdapat di wilayah Desa Banyusoco antara lain padi sawah, jagung, ketela pohon, kacang tanah, dan kedelai. Selain komoditas pertanian yang melimpah, terdapat juga komoditas perkebunan diantaranya kelapa, melinjo, mangga, pete, dan pisang. Sektor budidaya ikan air tawar di Desa Banyusoco dapat dikategorikan berkembang, namun perkembangan yang terjadi sangatlah kecil. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan air yang kurang baik sehingga pasokan air menuju tempat pembudidayaan ikan air tersebut menjadi kurang baik. Ikan yang dibudidayakan di Desa Banyusoco adalah ikan nila dan ikan lele.

Selain pada sektor pertanian, sektor industri rumahan yang terdapat di wilayah Desa Banyusoco juga mampu memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Perkembangan sektor industri rumahan terus didorong oleh pemangku jabatan Desa Banyusoco karena pada kenyataannya minat masyarakat yang cukup tinggi untuk pengolahan hasil pertanian dan perkebunan tidak sejalan dengan perkembangan dari industri tersebut. Hal lain yang menyebabkan industri rumahan di wilayah Desa Banyusoco lambat berkembang adalah ketidakmampuan untuk menembus pasar yang sudah ada. Industri rumahan yang berada di wilayah Desa Banyusoco meliputi industri gula kelapa, industri produk alat pertanian, industri kerajinan kulit, industri mebel, dan industri rumahan lainnya.

Desa Banyusoco dikelilingi oleh wilayah kehutanan yang memiliki luasan mencapai 540 hektare dengan terbagi menjadi 3 komoditas hutan yaitu kayu jati, akasia dan mahoni. Luasnya wilayah hutan yang mengelilingi Desa Banyusoco menjadikan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat desa.

Sektor pariwisata yang berada di wilayah Desa Banyusoco sangatlah menjanjikan. Hal tersebut dikarenakan potensi Desa Banyusoco masih banyak yang belum dimaksimalkan dengan baik. Tahun 2013, Kecamatan Playen mendorong untuk setiap desa diwilayahnya menumbuhkan kembangkan potensi wisata termasuk Desa Banyusoco.

Desa Banyusoco pada tahun 2021 melalui data agregat yang telah dipublikasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul memiliki penduduk sebanyak 5.956 jiwa yang terbagi atas 2.958 penduduk laki-laki dan 2.998 penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Banyusoco mencapai 2.045 jiwa dengan 1.697 jiwa adalah kepala keluarga laki-laki dan 348 jiwa adalah kepala penduduk perempuan. Sama seperti permasalahan di desa lain yang terdapat di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Desa Banyusoco juga mengalami masalah migrasi penduduk. Tahun 2021 saja, jumlah penduduk yang keluar dari Desa Banyusoco mencapai 65 jiwa dengan rincian 32 laki-laki dan 33 perempuan. Selain penduduk yang keluar, Desa Banyusoco juga mendapatkan penduduk yang datang untuk tinggal di desa. Jumlah penduduk yang datang dan tinggal di Desa Banyusoco mencapai 71 jiwa dengan rincian 33 laki-laki dan 38 perempuan.

Angka kelahiran di Desa Banyusoco mencapai 17 jiwa dengan rincian, 9 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Selain itu juga angka kematian di

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Desa Banyusoco mencapai 25 jiwa dengan rincian 13 laki-laki dan 12 perempuan. Tahun 2018, jumlah penduduk Desa Banyusoco mencapai 5.835 jiwa, pada tahun berikutnya jumlah penduduk Desa Banyusoco mencapai 5.917 jiwa. Tahun 2020, jumlah penduduk Desa Banyusoco mencapai 5.910 jiwa, sementara itu pada tahun 2021 jumlah penduduk Desa Banyusoco mencapai 5.956 jiwa. Tahun 2019, pertumbuhan penduduk di Desa Banyusoco meningkat sebesar 13 persen. Tahun 2020, pertumbuhan penduduk di Desa Banyusoco menurun sebesar 1,2 persen. Tahun 2021, pertumbuhan penduduk di Desa Banyusoco kembali meningkat sebesar 7,8 persen.

Mayoritas penduduk Desa Banyusoco menganut agama Islam. Jumlah penduduk Desa Banyusoco yang menganut agama Islam mencapai 5.773 jiwa, sedangkan penganut agama Kristen mencapai 170 jiwa dan penganut agama Katholik mencapai 13 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Banyusoco memiliki pendidikan terakhir yaitu tamatan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 1.818 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Banyusoco memiliki pekerjaan sebesar petani atau buruh tani dengan jumlah sebesar 1.110 jiwa.

5.1.4 Profil BUMDes Desa Banyusoco

Desa Banyusoco merupakan salah satu desa yang termasuk ke dalam Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Banyusoco memiliki potensi alam yang luar biasa. Mayoritas wilayah Desa Banyusoco dikelilingi oleh hutan. Potensi alam yang tersedia di Desa Banyusoco antara lain kehutanan, air terjun, sungai, dan panorama alam. Potensi yang dimiliki oleh Desa Banyusoco telah dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sejalan dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2014, Desa Banyusoco membentuk badan usaha yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes yang dibentuk oleh Desa Banyusoco dijadikan sebagai alat bantu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa. BUMDes yang dibentuk oleh Desa Banyusoco memiliki nama BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco. Tujuan utama dari dibentuknya BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco oleh Desa Banyusoco yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong sektor perekonomian. Selain sebagai alat bantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco juga dijadikan alat bantu untuk mendorong peningkatan pendapatan asli desa (PADes) sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco melihat potensi hutan yang berlimpah kemudian melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di kawasan hutan produksi RPH (Rencana Pengelolaan Hutan) Kepek, RPH Kedungwanglu dan hutan lindung di RPH Bibal. Kerjasama yang dilakukan memiliki maksud sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui usaha jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi dan hutan lindung secara lestari dan berkelanjutan. Kerjasama yang dilakukan juga memiliki tujuan sebagai optimalisasi usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam untuk memperoleh manfaat



ekologi, ekonomi dan sosial untuk masyarakat desa, pemerintah daerah maupun pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kerjasama ini telah diatur dalam surat kerjasama No. 119/29037 dan No. 02/bumdesbangkit/x/2020.



Gambar 8 Wisata edukasi Madu Bronto

BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco baru memiliki satu unit usaha yaitu unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Kawasan wisata di Desa Banyusoco terbagi menjadi dua kawasan yaitu Kawasan Taman Madu Bronto dan Kawasan Wanatirta Kedungwanglu. Kawasan Desa Wisata Banyusoco telah diatur melalui surat keputusan (SK) Bupati No. 146/KPTS/2022 pada tanggal 4 April 2022. Wisata alam Desa Banyusoco yang diatur melalui SK tersebut adalah Ekowisata Madu Bronto, Wanatirta Kedungwanglu dan Gajah Mopo. Wisata budaya Desa Banyusoco yang diatur melalui SK tersebut meliputi Hari Jadi Desa, Rasulan, Labuhan, Reog, Jathilan, dan Permainan Rakyat Tradisional. Wisata budaya Desa Banyusoco yang diatur melalui SK tersebut meliputi Pembibitan Kayu Jawa, Bumi Perkemahan, Pasar Kuliner Godhong Jati, Susur sungai dan *River Tubing* sungai Oya. Seluruh kawasan wisata yang dikelola oleh BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco memiliki konsep *community-based tourism*. Taman madu bronto sendiri merupakan tempat atau wahana belajar yang disandingkan dengan pengoptimalan keindahan alam. Taman madu bronto memiliki bidang-bidang kegiatan antara lain lebah madu, ulat sutera, pertanian, peternakan, hortikultura dan taman bunga, empon-empon, persemaian, *camping ground*, pasar godhong jati dan *showroom* produksi kerajinan dan industri kecil lokal. Bidang lebah madu merupakan kelompok petani lebah madu yang mengembangkan jenis lebah madu lokal penghasil madu kayu putih. Bidang ulat sutera merupakan kelompok peternak ulat sutera yang didampingi oleh petugas RPH Kepek. Bidang pertanian merupakan kelompok petani yang mengelola tanaman padi, jagung dan kedelai. Bidang peternakan merupakan kelompok peternak sapi dengan jenis PO (Peranakan Ongole). Bidang hortikultura dan taman bunga merupakan kelompok wanita tani (KWT) yang mengelola bidang hortikultura

dan taman bunga. Bidang empon-empon merupakan kelompok tani hutan yang memanfaatkan lahan bawah tegakan dengan menanam berbagai empon-empon dan tanaman tradisional lainnya. Bidang persemaian merupakan kelompok bersama dari KWT, kelompok tani, dan KTH (Kelompok Tani Hutan). Bidang *camping ground* merupakan kelompok pemuda yang memanfaatkan wilayah hutan sebagai tempat *camping*. Bidang pasar godhong jati merupakan kelompok ibu-ibu PKK yang memanfaatkan wilayah hutan jati untuk membuka pasar makanan tradisional Kabupaten Gunungkidul. Bidang *showroom* produksi dan industri kecil lokal merupakan kelompok masyarakat yang bergerak dalam industri gula kelapa dan kayu putih. Sementara itu, kawasan wisata Wanatirta Kedungwanglu menawarkan berbagai jenis wisata. Wisata yang ditawarkan oleh kawasan Wanatirta Kedungwanglu antara lain *off road trail* dan jip, susur sungai dan *river tubing* sungai Oya, air terjun dan Gajah Mopo.

5.1.5 Profil Desa Pulutan

Desa Pulutan merupakan salah satu dari 144 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Desa Pulutan memiliki luasan area mencapai 5,26 kilometer persegi yang terbagi atas sembilan padukuhan. Desa Pulutan sendiri memiliki batas wilayah dibagian utara berbatasan langsung dengan Desa Bogor, Kecamatan Playen. Sementara itu, dibagian timur berbatasan langsung dengan Desa Siraman, Kecamatan Wonosari. Bagian selatan Desa Pulutan berbatasan langsung dengan Desa Pampang, Kecamatan Paliyan serta dibagian barat berbatasan langsung dengan Desa Wiyoko dan Desa Plembutan, Kecamatan Playen. Desa Pulutan memiliki wilayah tanah yang dapat dikategorikan subur sehingga Desa Pulutan memiliki potensi wilayah pertanian yang sangat baik. Pertanian yang cocok dengan kondisi tanah di wilayah Desa Pulutan adalah pertanian padi, sayur dan palawija terutama jagung. Desa Pulutan juga dikenal sebagai penghasil sayuran terbaik. Selain baik dipergunakan untuk pertanian, potensi lain yang tersedia di wilayah Desa Pulutan yaitu peternakan. Desa Pulutan pada saat ini dijadikan sebagai pusat percontohan dari pembibitan sapi PO (Peranakan Ongole). Selain pertanian dan peternakan, terdapat pula industri ekonomi produktif yang terus dikembangkan. Industri ekonomi produktif yang berada di wilayah Desa Pulutan antara lain ialah industri kerajinan mebel antik dan industri makanan (Desa Pulutan 2020).

Desa Pulutan pada tahun 2021 melalui data yang dipublikasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.428 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 2.148 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 2.280 jiwa. Besaran jumlah penduduk yang dimiliki oleh Desa Pulutan hanya memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.513 jiwa yang terbagi atas jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 1.231 jiwa dan jumlah kepala keluarga perempuan sebanyak 282 jiwa.

Desa Pulutan memiliki masalah dengan desa-desa yang lain di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu migrasi penduduk. Tahun 2021, jumlah penduduk yang keluar dari Desa Pulutan mencapai 23 jiwa dengan jumlah laki-laki 15 jiwa dan perempuan 8 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk

masuk ke Desa Pulutan mencapai 38 jiwa yang terbagi atas laki-laki 22 jiwa dan perempuan 16 jiwa. Selain data migrasi penduduk, Desa Pulutan juga berhasil untuk mencatat angka kelahiran. Tahun 2021 jumlah anak yang lahir di Desa Pulutan mencapai 12 jiwa dengan jumlah anak laki-laki sebanyak 4 jiwa dan jumlah anak perempuan yang lahir mencapai 8 jiwa. Selain mencatat angka kelahiran, Desa Pulutan juga berhasil mencatat angka kematian. Tahun 2021, jumlah penduduk yang meninggal di Desa Pulutan sebanyak 21 orang dengan rincian penduduk laki-laki yang meninggal sebanyak 10 jiwa dan penduduk perempuan yang meninggal sebanyak 11 jiwa.

Tahun 2018 jumlah penduduk Desa Pulutan mencapai 4.326 jiwa, tahun berikutnya jumlah penduduk Desa Pulutan mencapai 4.362 jiwa. Tahun 2020 jumlah penduduk Desa pulutan mencapai 4.515 jiwa dan di tahun berikutnya jumlah penduduk Desa Pulutan mencapai 4.428 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi di Desa Pulutan pada tahun 2019 mencapai 8,29 persen. Tahun 2020 pertumbuhan penduduk di Desa Pulutan mencapai 34,47 persen dan pada tahun 2021 pertumbuhan penduduk di Desa Pulutan mencapai -19,46 persen.

Mayoritas penduduk Desa Pulutan memeluk agama Islam dengan jumlah 3.295 jiwa. Selain memeluk agama Islam, Desa Pulutan juga memiliki penduduk yang memeluk agama Katholik dengan jumlah 1.117 jiwa dan yang memeluk agama Kristen dengan jumlah 16 jiwa.

Mayoritas penduduk Desa Pulutan memiliki pendidikan terakhir tamat SLTA (Sekolah Lanjutan Tahap Atas) dengan jumlah mencapai 1.021 jiwa. Sementara itu, mayoritas penduduk Desa Pulutan bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani mencapai 605 jiwa, karyawan swasta mencapai 296 jiwa, wiraswasta mencapai 230 jiwa serta mata pencaharian lainnya.

5.1.6 Profil BUMDes Pulutan

Desa Pulutan merupakan salah satu desa yang termasuk ke dalam Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Pulutan memiliki potensi alam yang luar biasa. Mayoritas wilayah Desa Pulutan dikelilingi oleh lahan pertanian. Potensi alam yang tersedia di Desa Pulutan antara lain persawahan, sungai, dan panorama alam. Potensi yang dimiliki oleh Desa Pulutan telah dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sejalan dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2014, Desa Pulutan membentuk badan usaha yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes yang dibentuk oleh Desa Pulutan dijadikan sebagai alat bantu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa. BUMDes yang dibentuk oleh Desa Pulutan memiliki nama BUMDes Maju Mandiri Pulutan. Tujuan utama dari dibentuknya BUMDes Maju Mandiri Pulutan oleh Desa Pulutan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong sektor perekonomian. Selain sebagai alat bantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, BUMDes Maju Mandiri Pulutan juga dijadikan alat bantu untuk mendorong peningkatan pendapatan asli desa (PADes) sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Potensi yang berhasil dikelola dengan baik adalah potensi alam melalui sektor pertanian. Luas area pertanian di Desa Pulutan mencapai kurang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

340 hektare dengan jumlah produksi padi yang mencapai 1.200 ton per tahun. Selain memproduksi padi, lahan pertanian yang luas juga mampu untuk memproduksi tanaman hortikultura. Produksi tanaman hortikultura mencapai 300 ton per tahun. Selain padi dan tanaman hortikultura, lahan pertanian di Desa Pulutan juga mampu untuk memproduksi palawija, untuk produksi palawija di Desa Pulutan mencapai 600 ton per tahun. Melalui luasnya lahan pertanian serta produktifnya lahan pertanian di Desa Pulutan, menjadikan Desa Pulutan sebagai desa swasembada pangan serta penopang kebutuhan pangan untuk Kecamatan Wonosari. Selain dimanfaatkan untuk sektor pertanian, Desa Pulutan juga memanfaatkan potensinya melalui sektor peternakan. Desa Pulutan dijadikan sebagai kawasan pembibitan untuk sapi peranakan ongole (PO). Kelompok ternak yang berada di wilayah Desa Pulutan memiliki jumlah sapi yang di ternak mencapai 1200 ekor sapi PO.

BUMDes Maju Mandiri Pulutan memiliki empat unit usaha yang terdiri dari unit usaha SPAMDESA Atmo Warih, Unit usaha Pasar Desa, Unit usaha Persewaan Tenda Kursi, dan Unit usaha Wisata Lembah Desa Pulutan. Unit usaha SPAMDESA sudah berjalan sejak awal berdirinya BUMDes Maju Mandiri Pulutan. Unit usaha SPAMDESA juga sudah mampu menarik pelanggan mencapai setengah dari penduduk Desa Pulutan. Unit usaha SPAMDESA juga mampu untuk memberikan pemasukan yang lebih besar untuk pendapatan asli desa (PADes).

Unit usaha Wisata Lembah Desa Pulutan operasionalnya dijalankan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Pesona Pelangi. Wisata Lembah Desa juga telah mendapatkan surat keputusan (SK) Bupati No. 389/KPTS/2022 tanggal 25 November 2022. Melalui SK tersebut, potensi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh unit usaha Wisata Lembah Desa Pulutan terbagi menjadi tiga wisata yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Wisata alam yang dapat dikelola dan dikembangkan terdiri dari persawahan Temu, sungai Blendaran, sungai Mbaonn dan sungai Banyu Biru. Wisata buatan yang dapat dikelola dan dikembangkan antara lain Lembah Desa Pulutan, Kerajinan Meubel Antik dan Galeri Seni Lukis Kayu “Kandang Pawuhan”. Wisata budaya yang dapat dikelola dan dikembangkan antara lain Candi Butuh, Makam Kidang Wahyu, Upacara Adat Rasulan, Gumbregan, Tradisi Pertanian, Jathilan, Karawitan, Bergodo, Gejog Lesung dan permainan rakyat tradisional.

Wisata Lembah Desa Pulutan mengusung konsep eduwisata. Eduwisata yang dijalankan lebih mengarah kepada sistem mina padi. Sistem mina padi sendiri digunakan oleh kelompok tani di Desa Pulutan guna meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan mekanisme dari sistem mina padi dapat membudidayakan dua hal secara beriringan, selain itu juga melalui mina padi tidak diperlukan pupuk kimia untuk tanaman padi. Seiring dengan berjalannya waktu dari tahun 2018, pada saat ini benih ikan yang digunakan untuk sistem mina padi telah didukung oleh Dinas Perikanan Kabupaten Gunungkidul. Tahun 2021 dan 2022 wisata Lembah Desa Pulutan mengembangkan konsep baru untuk ditawarkan kepada pengunjung. Konsep tersebut ialah konsep wisata edukasi murah yang dapat diakses oleh segala kalangan. Tiket masuk kawasan wisata Lembah Desa Pulutan yang ditawarkan oleh pengelola kepada para wisatawan hanya



sebesar Rp5.000 dan sudah mendapatkan kupon untuk ditukarkan dengan teh poci. Selain konsep wisata edukasi murah, terdapat pula konsep wisata yang sehat. Konsep wisata yang sehat ini dimulai dari seluruh kios tidak diperbolehkan untuk menjual rokok. Konsep selanjutnya yang dikembangkan adalah konsep wisata Islami bebas kegiatan yang tercela baik secara hukum negara maupun adat.



Gambar 9 Kawasan wisata Lembah Desa Pulutan

5.2 Karakteristik Responden Penelitian

5.2.1 Karakteristik Usia Responden

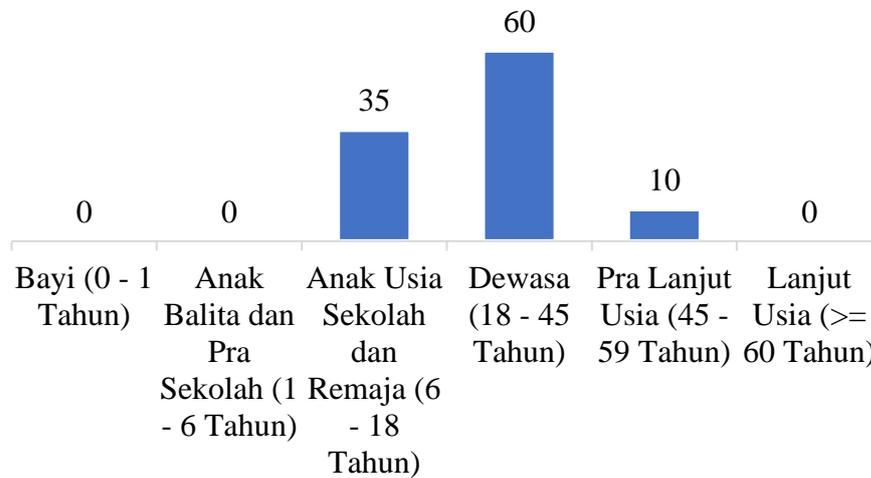
Responden dalam penelitian ini berjumlah 105 jiwa yang merupakan anggota dan masyarakat terdampak akan adanya BUMDes dari ke tiga desa yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan. Karakteristik responden berdasarkan usia dipilih dengan mempertimbangkan alasan seberapa luas masyarakat di wilayah desa yang menjadi objek terdampak serta dapat mengikuti program BUMDes. Pemilihan responden berdasarkan usia juga didasari oleh usia produktif dimana dapat diasumsikan bahwa semakin produktif usianya semakin mudah untuk meningkatkan keahlian dengan pelatihan-pelatihan yang terdapat dalam program BUMDes. Karakteristik responden berdasarkan usia juga dapat dikategorikan sesuai dengan Permenkes No. 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016 – 2019. Berdasarkan Permenkes tersebut terdapat enam kategori usia yaitu bayi dengan rasio usia 0 – 1 tahun, anak balita dan pra sekolah dengan rasio usia 1 – 6 tahun, anak usia sekolah dan remaja dengan rasio usia 6 – 18 tahun,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

dewasa dengan rasio usia 18 – 45 tahun, pra lanjut usia dengan rasio usia 45 – 59 tahun dan lanjut usia dengan rasio usia lebih dari sama dengan 60 tahun.

Karakteristik Usia Responden



Gambar 10 Persentase responden penelitian menurut usia

Berdasarkan informasi pada Gambar 10, karakteristik usia responden didominasi oleh kategori dewasa dengan rasio usia 18 – 45 tahun yang memiliki besaran persentase mencapai sebesar 57 persen.

Selanjutnya, Tabel 4 memuat persentase responden menurut usia pada Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan. Responden di Desa Nglanggeran didominasi oleh kategori dewasa dengan rasio usia 18 – 45 tahun yang memiliki besaran persentase mencapai sebesar 46 persen. Hal tersebut terjadi dikarenakan desa wisata Nglanggeran memberdayakan pemuda sebagai ujung tombak perubahan di Desa sehingga banyak pemuda baik yang tergabung di dalam karang taruna maupun tidak akan mendapatkan hak yang sama untuk difasilitasi dalam pelatihan dan pendidikan terkait dengan pengelolaan wisata di Desa Nglanggeran. Responden di Desa Banyusoco didominasi dewasa dengan rasio usia 18 – 45 tahun yang memiliki besaran persentase mencapai sebesar 48 persen. Hal tersebut terjadi dikarenakan BUMDes Banyusoco masih mencoba menggandeng karang taruna untuk mendukung serta menjalankan program dari BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco. Selain itu, menggandeng karang taruna seperti yang terjadi di Desa Nglanggeran mampu untuk menjalankan sistem *community-based tourism* menjadi lebih optimal. Responden di Desa Pulutan didominasi oleh kategori dewasa dengan rasio usia 18 – 45 tahun yang memiliki besaran persentase mencapai sebesar 83 persen. Hal tersebut sudah dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Pulutan, karena oleh mayoritas penduduk menyatakan bahwa apabila pemuda desa bergerak maka para orang tua akan memberikan bantuan dengan sukarela dan pemuda akan lebih mudah untuk memahami pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh BUMDes Maju Mandiri Pulutan serta Desa Pulutan.

Tabel 4 Karakteristik usia responden Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan

Kategori Usia Responden	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Bayi (0 – 1 tahun)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Anak usia sekolah dan pra sekolah (1 – 6 tahun)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Anak usia sekolah dan remaja (6 – 18 tahun)	14	40,00	15	42,86	6	17,14
Dewasa (18 – 45 tahun)	16	45,71	17	48,57	27	77,14
Pra Lanjut Usia (45 – 59 tahun)	5	14,29	3	8,57	2	5,71
Lanjut Usia (≥ 60 tahun)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	35	100	35	100	35	100

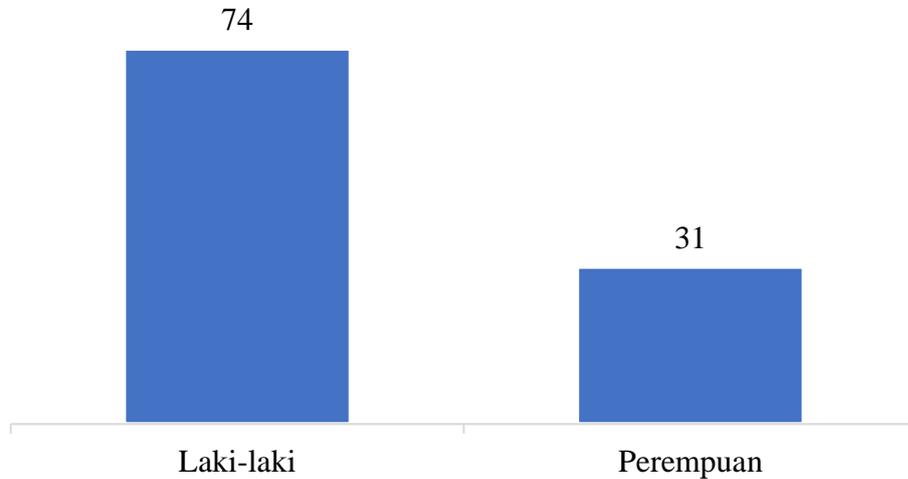
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

5.2.2 Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden dijadikan sebagai karakteristik responden dengan alasan untuk melihat keberagaman anggota dan masyarakat yang terdampak BUMDes dari ke tiga objek penelitian yaitu Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan. Gambar 11 memuat persentase responden penelitian berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden memiliki jenis kelamin laki-laki yang memiliki besaran persentase mencapai sebesar 70 persen. Hal ini umum terjadi karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa laki-laki harus bekerja dan laki-laki juga lah yang memiliki kemampuan terbesar. Berbeda dengan Kabupaten Kulon Progo, yang mayoritas anggota BUMDes beranggotakan perempuan. Hal tersebut terjadi karena di Kabupaten Kulon Progo, wanita dianggap memiliki fokus yang lebih untuk mengurus dan mengelola BUMDes dibandingkan dengan laki-laki. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga mulai mendorong agar kesempatan kerja bagi perempuan di BUMDes terealisasi

diseluruh kabupaten yang berada di bawah naungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Karakteristik Jenis Kelamin Responden



Gambar 11 Persentase responden menurut jenis kelamin

Karakteristik jenis kelamin tersebut apabila dilihat melalui Tabel 5 yang memuat persentase responden menurut jenis kelamin pada Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan dapat disimpulkan bahwa hanya Desa Nglanggeran yang sudah memulai arahan dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dalam program BUMDes. Sementara itu, Desa Pulutan sedang mencoba untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk mendapatkan fasilitas yang sama dengan laki-laki dalam hal program BUMDes.

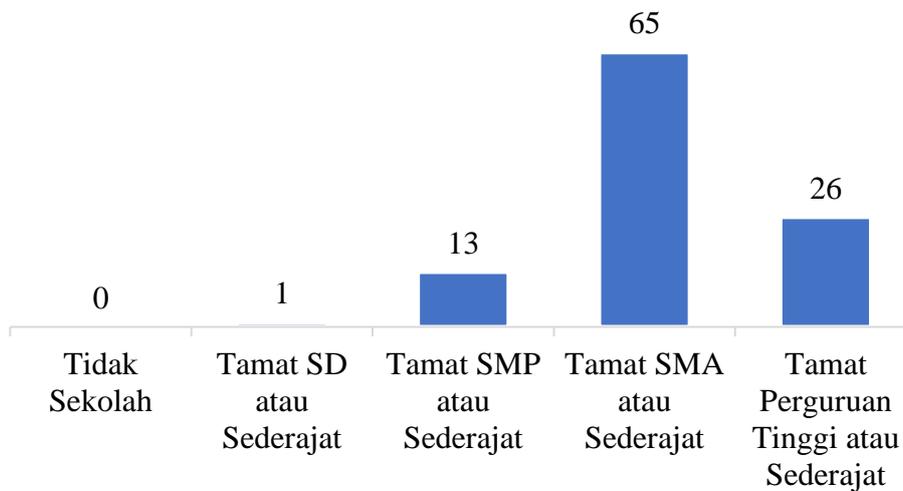
Tabel 5 Karakteristik jenis kelamin responden Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan

Jenis Kelamin	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Laki-laki	21	60,00	29	82,86	24	68,57
Perempuan	14	40,00	6	17,14	11	31,43
Total	35	100	35	100	35	100

5.2.3 Karakteristik Tingkat Pendidikan Responden

Setelah melihat karakteristik responden berdasarkan kepada jenis kelamin, selanjutnya penelitian ini menyajikan data persebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh anggota dan masyarakat terdampak akan program BUMDes. Kategori tingkat pendidikan dalam penelitian ini digolongkan kedalam lima kategori yaitu tidak sekolah, tamat SD atau sederajat, tamat SMP atau sederajat, tamat SMA atau sederajat serta tamat perguruan tinggi atau sederajat. Hasil olahan data penelitian yang disajikan melalui Gambar 12 menunjukkan bahwa anggota dan masyarakat terdampak akan program BUMDes dari Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan mayoritas adalah individu dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuh tamat SMA atau sederajat dengan besaran persentase mencapai sebesar 62 persen. Hal ini tentu erat kaitannya dengan kondisi perekonomian di ketiga desa tersebut. Kondisi perekonomian di ketiga desa tersebut tergolong dalam kategori rendah yang membuat tiap individu lebih memilih untuk melanjutkan mencari pekerjaan dengan kompetensi minimum. Tidak jarang pula, banyak individu yang pada akhirnya pergi untuk merantau demi mendapatkan penghasilan yang lebih layak dibandingkan dengan tetap berada di desa.

Karakteristik Tingkat Pendidikan Responden



Gambar 12 Persentase responden menurut tingkat pendidikan

Sementara itu, apabila merujuk kepada Tabel 6 yang memuat persentase responden menurut tingkat pendidikan di Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan dapat disimpulkan bahwa pada saat ini melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, masyarakat sudah mulai sadar akan pendidikan lebih lanjut melalui jenjang pendidikan perguruan tinggi sederajat. Kesadaran masyarakat juga didukung oleh beberapa program pendidikan di tingkat kabupaten hingga provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel 6 Karakteristik tingkat pendidikan responden Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan

Tingkat Pendidikan	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Tidak Sekolah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tamat SD atau Sederajat	0	0,00	1	2,86	0	0,00
Tamat SMP atau Sederajat	0	0,00	4	11,43	9	25,71
Tamat SMA atau Sederajat	23	65,71	17	48,57	25	71,43
Tamat Perguruan Tinggi atau Sederajat	12	34,29	13	37,14	1	2,86
Total	35	100	35	100	35	100

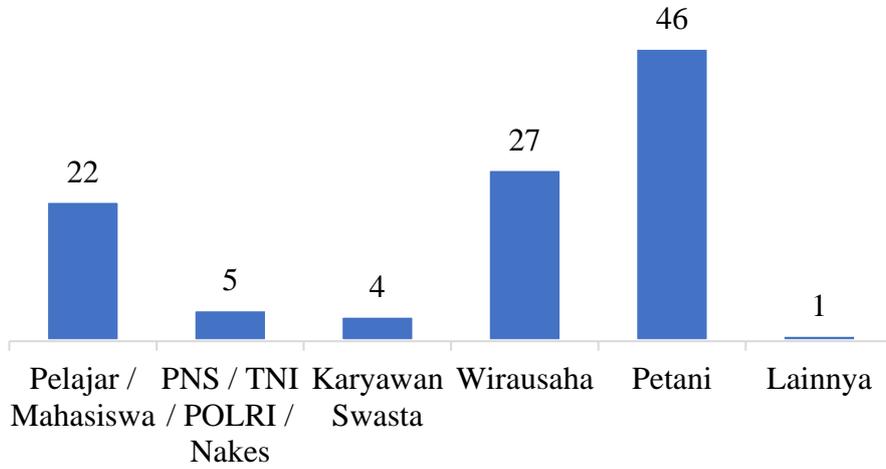
5.2.4 Karakteristik Pekerjaan Utama Responden

Karakteristik responden selanjutnya yang ditampilkan adalah karakteristik responden berdasarkan pekerjaan utama. Alasan digunakannya pekerjaan utama di dalam karakteristik responden guna melihat ketepatan sasaran dari program BUMDes yang sedang dijalankan di ketiga desa yaitu Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan. Karakteristik pekerjaan utama digolongkan kedalam enam kategori yaitu pelajar atau mahasiswa, pns atau tni atau polri atau tenaga kesehatan, karyawan swasta, wirausaha, petani dan lainnya. Berdasarkan data hasil olahan, anggota dan masyarakat yang terdampak akan hadirnya BUMDes mayoritas memiliki pekerjaan utama sebagai petani dengan besaran persentase mencapai sebesar 44 persen. Hal ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat yang tinggal di desa memanfaatkan lahan desa untuk bertani. Tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat desa memiliki pekerjaan utama di luar petani akan tetapi masyarakat yang memiliki pekerjaan diluar petani didominasi oleh masyarakat yang tidak berasal dari desa tersebut, adapun masyarakat asli desa tersebut dan memiliki pekerjaan utama diluar petani pada umumnya tidak merasakan dampak dari hadirnya BUMDes. Hadirnya BUMDes memang untuk memberikan pekerjaan tambahan kepada masyarakat desa yang bersifat positif. Selain itu juga, hadirnya BUMDes diharapkan mampu untuk membuka lapangan pekerjaan baru di desa



sehingga pola pikir masyarakat desa terkait dengan mencari pekerjaan di luar desa dapat diminimalisir.

Karakteristik Pekerjaan Utama Responden



Gambar 13 Persentase responden menurut pekerjaan utama

Tabel 7 memuat persentase responden menurut pekerjaan utama berdasarkan kepada tiga desa yaitu Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan. Seluruh desa telah memberikan kesempatan yang sama untuk masyarakat desa berdasarkan pekerjaan utamanya dalam hal kebermanfaatan akan hadirnya BUMDes.

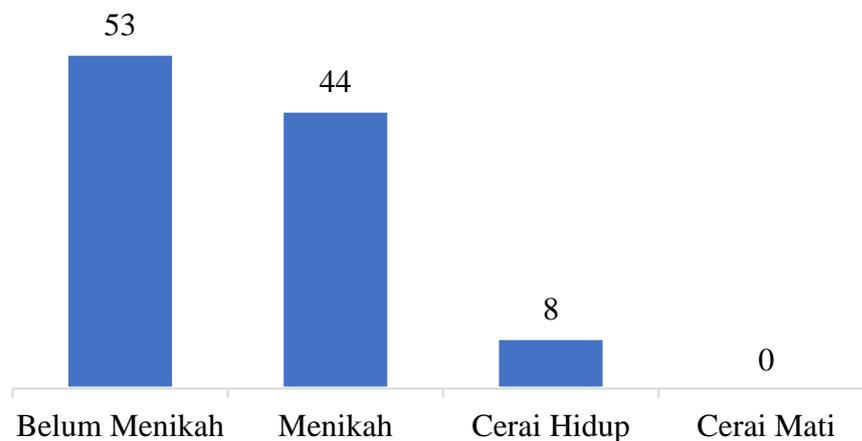
Tabel 7 Karakteristik pekerjaan utama responden Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan

Pekerjaan Utama	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Pelajar / Mahasiswa	11	31,43	5	14,29	6	17,14
PNS / TNI / Polri / Nakes	1	2,86	4	11,43	0	0,00
Karyawan Swasta	0	0,00	2	5,71	2	5,71
Wirausaha	12	34,29	9	25,71	6	17,14
Petani	11	31,43	15	42,86	20	57,14
Lainnya	0	0,00	0	0,00	1	2,86
Total	35	100	35	100	35	100

5.2.5 Karakteristik Status Perkawinan Responden

Karakteristik terakhir yang dianalisis dalam penelitian ini adalah status perkawinan dari anggota dan masyarakat terdampak akan hadirnya BUMDes. Karakteristik tersebut dianalisis untuk mengetahui alasan dari individu dalam mengikuti kegiatan program BUMDes. Karakteristik perkawinan digolongkan kedalam empat kategori yaitu belum menikah, menikah, cerai hidup, cerai mati. Gambar 14 menyajikan data olahan lengkap terkait dengan status perkawinan dari anggota dan masyarakat terdampak hadirnya BUMDes. Status perkawinan yang dimiliki oleh mayoritas responden tergolong kedalam status perkawinan yang belum menikah dengan besaran persentase mencapai sebesar 50 persen. Hal ini disebabkan oleh mayoritas dari sasaran BUMDes adalah masyarakat yang kurang beruntung dalam mendapatkan fasilitas pekerjaan sehingga untuk maju ke jenjang pernikahan termasuk sulit dengan alasan belum memiliki penghasilan yang tetap. Hadirnya BUMDes tersebut memberikan kesempatan untuk memiliki fasilitas pekerjaan yang layak serta memiliki kegiatan yang positif dalam menghasilkan pemasukan perekonomian.

Karakteristik Status Perkawinan Responden



Gambar 14 Persentase responden menurut status perkawinan

Selanjutnya, pada Tabel 8 yang memuat persentase responden menurut status perkawinan berdasarkan ke tiga desa yaitu Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari anggota dan masyarakat terdampak dari hadirnya BUMDes tergolong ke dalam kategori belum menikah. Hal tersebut terjadi karena banyak dari anggota dan masyarakat terdampak BUMDes lebih memilih untuk memperbaiki taraf hidupnya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menjalin pernikahan.

Tabel 8 Karakteristik status perkawinan responden Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan

	Desa Nglanggeran	Desa Banyusoco	Desa Pulutan
--	------------------	----------------	--------------

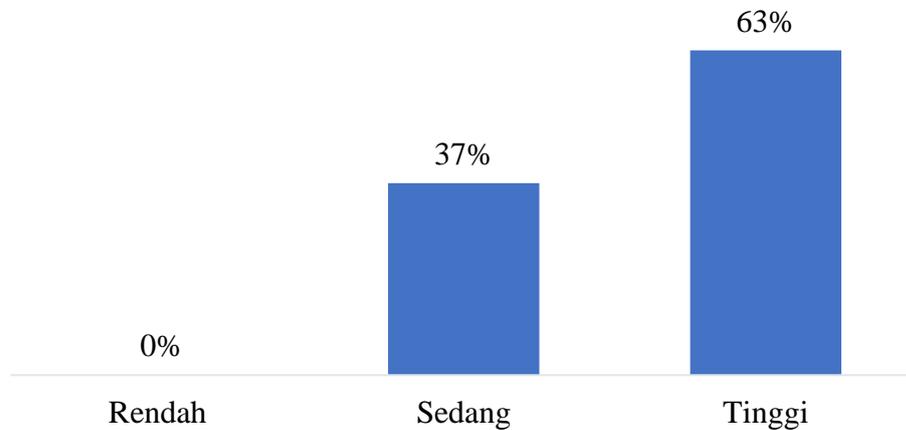
Status Perkawinan						
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Belum Menikah	19	54,29	20	57,14	14	40,00
Menikah	16	45,71	12	34,29	16	45,71
Cerai Hidup	0	0,00	3	8,57	5	14,29
Cerai Mati	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	35	100	35	100	35	100

5.3 Efektivitas Unit Usaha BUMDes Pengelolaan Kawasan Wisata

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi serta produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan berbagai jenis usaha lainnya dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes haruslah memiliki unit usaha yang telah diatur oleh PP Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Kegiatan usaha BUMDes sebagaimana diatur di dalam PP No. 11 Tahun 2021 bergerak dalam sektor perekonomian dan atau pelayanan umum dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Unit usaha BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh BUMDes dengan melaksanakan kegiatan pada sektor perekonomian dan atau pelayanan umum berbadan hukum serta melaksanakan fungsi dan tujuan dari BUMDes. Evaluasi atau monitoring BUMDes harus terus dilakukan agar fungsi dan tujuan dari dibentuknya BUMDes masih berada pada jalur yang positif serta dapat diketahui lebih lanjut dari efektivitas BUMDes tersebut. Efektivitas BUMDes dapat dilihat melalui enam tahap efektivitas yang telah dikemukakan oleh Dale (2004) serta terdiri dari kebermanfaatan (*effectivity*), kesesuaian (*relevance*), keberlanjutan (*sustainability*), besaran dan luasan geografis akibat positif (*impact*), signifikansi tingkat pemberdayaan (*empowerment*), serta besaran tingkat partisipasi (*participation*).

5.3.1 Kebermanfaatan

Kebermanfaatan (Effectivity) Unit Usaha BUMDes Pengelolaan Kawasan Wisata



Gambar 15 Persentase hasil kebermanfaatan unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

Merujuk kepada Gambar 15 yang memuat persentase hasil kebermanfaatan BUMDes, mayoritas responden menunjukkan tingkat kebermanfaatan BUMDes yang dirasakan tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 63 persen. Hal ini disebabkan oleh mayoritas responden yang memiliki keahlian baru baik sebagai anggota maupun masyarakat yang terdampak. Keahlian baru yang dirasakan oleh anggota berupa tata cara pengelolaan kawasan wisata sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung kembali di waktu yang berbeda. Sementara itu, keahlian baru yang dirasakan oleh masyarakat terdampak adalah tata cara melihat peluang usaha baru dari adanya unit usaha pengelolaan kawasan wisata yang dimiliki oleh BUMDes.

Tabel 9 Kebermanfaatan (*effectivity*) unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan

Kebermanfaatan unit usaha BUMDes	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Rendah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sedang	2	5,71	24	68,57	13	37,14
Tinggi	33	94,29	11	31,43	22	62,86
Total	35	100	35	100	35	100

Kebermanfaatan BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran dapat dirasakan baik untuk anggota maupun untuk masyarakat Desa Nglanggeran dengan besaran persentase mencapai sebesar 94 persen serta tergolong dalam kategori tinggi. Kebermanfaatan bagi anggota BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran adalah berupa meningkatnya keahlian yang dimiliki tiap individunya. Meningkatnya keahlian tersebut sejalan dengan kemajuan wisata di Desa Nglanggeran. Selain itu juga, meningkatnya keahlian tersebut merupakan hasil pelatihan-pelatihan yang diadakan secara berkala guna meningkatkan kapasitas anggota dari BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran. Keahlian pengelolaan pariwisata memberikan dampak yang amat besar bagi anggota dan masyarakat Desa Nglanggeran. Pelatihan tersebut berupa pelatihan menjadi pemandu wisata, pemasaran, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan UMKM serta pelatihan untuk penginapan. Meningkatnya keahlian tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh anggota dan masyarakat Desa Nglanggeran. Manfaat yang sangat dirasakan sejalan dengan keahlian yang meningkat yaitu peningkatan perekonomian. Kelompok-kelompok masyarakat yang lain juga diberikan pelatihan sesuai dengan kemampuan dari kelompok masyarakat tersebut. Pelatihan yang dilaksanakan meliputi pengolahan perkebunan kakao, pengolahan perkebunan durian, pengolahan budidaya kambing etawa, pengolahan kakao serta pengolahan durian. Pelatihan tersebut diberikan guna mendukung konsep wisata *community-based tourism* yang diusung oleh Desa Wisata Nglanggeran.

Sementara itu, kebermanfaatan yang dirasakan oleh anggota dan masyarakat Desa Banyusoco melalui hadirnya BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco tergolong dalam kategori sedang dengan besaran persentase mencapai sebesar 69 persen. Kebermanfaatan yang dirasakan oleh anggota dan masyarakat di Desa Banyusoco belum terlampau besar. Hal tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat masih belum memiliki keyakinan yang lebih untuk BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco bisa maju dan memperbaiki taraf hidup. Fakta dilapangan, dukungan berupa pelatihan memang sudah sering kali dilakukan namun akibat dari kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang cukup rendah membuat pelatihan tersebut tidak merata. Pelatihan yang diadakan tersebut hanya berlaku untuk masyarakat yang dekat atau dipilih oleh pemangku kepentingan.

Kebermanfaatan yang dirasakan oleh anggota maupun masyarakat Desa Pulutan akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan tergolong dalam kategori tinggi, dengan besaran persentase mencapai sebesar 63 persen. Unit usaha pengelolaan kawasan wisata yang dimiliki oleh BUMDes Maju Mandiri Pulutan baru direaktivasi pada tahun 2022 setelah terjadinya pergantian pengurus BUMDes. Hal tersebut berakibat kepada belum sepenuhnya masyarakat percaya akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Kepercayaan masyarakat yang minim tersebut didasari oleh gagalnya kepengurusan BUMDes sebelumnya dalam menjamin hak-hak masyarakat di wilayah yang dijadikan sebagai objek wisata. Melalui kepengurusan yang baru serta beberapa program atau konsep wisata yang baru perlahan rasa kepercayaan masyarakat akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata hadir kembali.

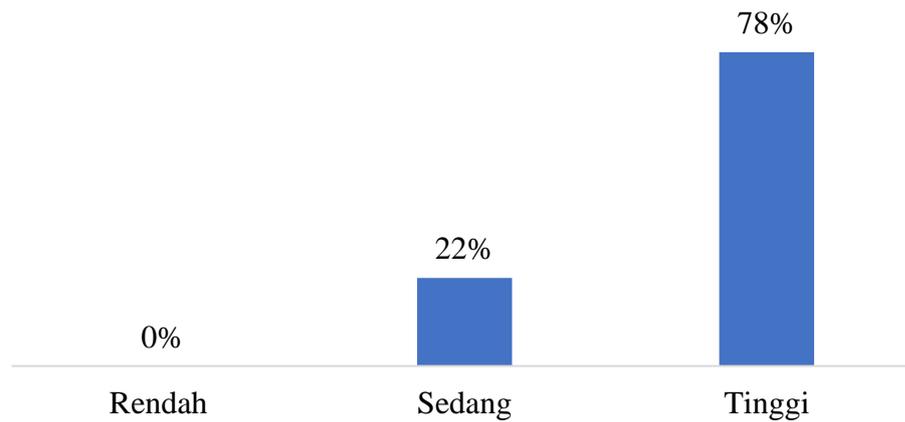
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Pendekatan yang dilakukan oleh pengurus untuk menjamin hak-hak masyarakat dengan cara memberikan pelayanan dan fasilitas pelatihan penunjang wisata di Desa Pulutan.

5.3.2 Kesesuaian

Kesesuaian (Relevance) Unit Usaha BUMDes Pengelolaan Kawasan Wisata



Gambar 16 Persentasi hasil kesesuaian unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

Berdasarkan Gambar 16 yang memuat persentase hasil kesesuaian BUMDes, mayoritas responden menyatakan bahwa kesesuaian unit usaha pengelolaan kawasan wisata yang dikelola oleh BUMDes tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 78 persen. Hal ini disebabkan oleh mayoritas dari anggota dan masyarakat terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata yang dikelola oleh BUMDes sudah sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah Desa Nglangeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan. Sebelum unit usaha dibentuk, pengelola BUMDes yang dibantu oleh aparatur desa mencatat potensi dan masalah yang dimiliki oleh desa. Selain mencatat potensi dan masalah yang dimiliki oleh desa, pengelola BUMDes dan aparatur desa membuat kajian serta peraturan desa dimana masyarakat disekitar wilayah kawasan wisata harus mampu untuk memaksimalkan peluang ketika unit usaha ini dijalankan. Selain sudah sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki desa, unit usaha pengelolaan kawasan wisata mampu untuk memberikan citra positif terhadap nama baik desa sehingga Kabupaten Gunungkidul memiliki alternatif wisata lain selain pantai dan goa. Selain memberikan citra yang positif untuk nama baik desa, unit usaha pengelolaan kawasan wisata juga mampu memberikan dorongan kepada umkm-umkm yang terdapat di desa untuk berkembang dan memasarkan produknya kepada para wisatawan yang berkunjung. Kesesuaian unit usaha ini juga bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dilanjutkan dengan PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa serta bagian

dari visi pembangunan daerah dalam RJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026. Hadirnya unit usaha ini mampu untuk menjadi peluang lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul umumnya dan khususnya bagi masyarakat Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan.

Tabel 10 Kesesuaian (*relevance*) unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan

Kesesuaian unit usaha BUMDes	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Rendah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sedang	0	0,00	16	45,71	7	20,00
Tinggi	35	100,00	19	54,29	28	80,00
Total	35	100	35	100	35	100

Kesesuaian unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran untuk anggota maupun untuk masyarakat yang terdampak tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 100 persen. Hal tersebut dikarenakan kerjasama yang dilakukan oleh aparat desa, pengelola BUMDes, pengelola desa wisata, karang taruna dan masyarakat sudah sangat baik. Kerjasama tersebut juga saling mendukung demi kemajuan Desa Nglanggeran. Potensi dan permasalahan yang terjadi di Desa Nglanggeran cukup beragam, namun semangat gotong-royong masyarakat yang tinggi membuat beragamnya potensi dan masalah di Desa Nglanggeran dapat dicarikan solusinya. Pemberian hak-hak kepada pengelola desa wisata menjadikan unit usaha pengelolaan kawasan wisata dapat berkembang dengan pesat dan meraih berbagai penghargaan baik di tingkat nasional, ASEAN maupun internasional. Kesesuaian program antara BUMDes dengan pengelola desa wisata juga menjadikan wisata di Desa Nglanggeran dapat dikelola secara optimal. Konsep *community-based tourism* yang digunakan oleh pengelola desa wisata dan unit usaha pengelola kawasan wisata membantu memfasilitasi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup. Konsep *community-based tourism* juga mampu untuk membagi wilayah Desa Nglanggeran sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Sementara itu, kesesuaian unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco untuk anggota maupun untuk masyarakat yang terdampak tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 54 persen. Meskipun tergolong tinggi, akan tetapi belum menunjukkan perbedaan yang cukup jauh dibandingkan dengan kesesuaian yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum merasa terpuaskan akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

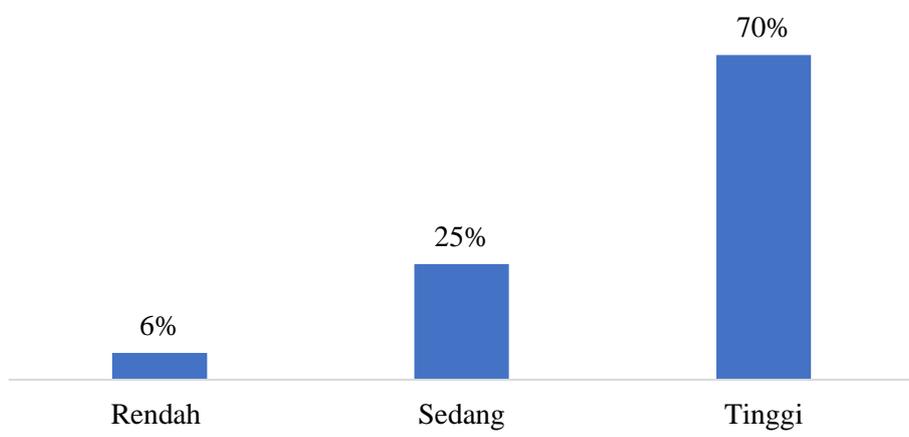
dimiliki oleh BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco. Selain itu juga, kerjasama yang dilakukan antara BUMDes dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) masih belum optimal. Kurang optimalnya kerjasama tersebut didasari oleh masih terdapat batas-batas yang sulit untuk dikomunikasikan antara BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco, Balai KPH Yogyakarta serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal lain yang menjadikan kesesuaian unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco belum sepenuhnya tergolong tinggi dikarenakan banyak kelompok masyarakat yang memiliki pola pikir tidak sejalan dengan apa yang sudah di konsepkan oleh pengelola unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco. Konsep yang diusung sudah sangat baik yaitu *community-based tourism* akan tetapi di dalam pengelolaannya masih belum optimal.

Berbeda dengan BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco, kesesuaian unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan untuk anggota maupun untuk masyarakat yang terdampak tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 80 persen. Hal tersebut terjadi karena semenjak dilakukan reaktivasi kawasan wisata lembah desa Pulutan mampu untuk memberikan pemasukan lain untuk masyarakat dan anggota dari BUMDes Maju Mandiri Pulutan. Selain itu juga, pemelihan konsep wisata yang murah, aman bagi keluarga dan eduwisata sudah sesuai dengan lokasi yang digunakan saat ini. Pembagian jatah untuk setiap kios memberikan perasaan yang nyaman untuk para pedagang di wilayah lembah desa Pulutan. Pemilihan konsep dan pembagian jatah untuk pedagang membuat kerjasama yang baik antara pengelolaa BUMDes dengan masyarakat yang sebelumnya menolak hadirnya wisata di padukuhan mereka. Kesesuaian unit usaha dengan keinginan masyarakat juga menjadikan unit usaha ini perlahan mampu untuk terus berkembang dan menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara.



5.3.3 Keberlanjutan

Keberlanjutan (Sustainability) Unit Usaha BUMDes Pengelolaan Kawasan Wisata



Gambar 17 Persentase hasil keberlanjutan unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

Berdasarkan Gambar 17, mayoritas responden menyatakan bahwa unit usaha pengelolaan kawasan wisata yang dimiliki oleh BUMDes memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 69 persen. Hal ini didasari oleh pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara berkala baik yang diadakan oleh BUMDes maupun Desa kepada anggota dan masyarakat yang terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata guna meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam mengelola kawasan wisata di desa. Selain itu juga, adanya kontrol dan pendampingan langsung secara berkala oleh pihak pengelola desa wisata, BUMDes dan desa mampu untuk memastikan semua alur pelaksanaan kepariwisataan berjalan dengan optimal. Selain memberikan fasilitas-fasilitas pelatihan kepada anggota dan masyarakat yang terdampak, desa juga membebaskan unit usaha pengelolaan kawasan wisata ini mengikuti perlombaan baik yang diadakan secara provinsi melalui Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta, nasional melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga internasional yang diadakan oleh berbagai pihak penyelenggara. Kebebasan yang diberikan oleh desa tersebut dinilai mampu untuk meningkatkan prospek dari wisata yang terdapat di desa. Selain itu juga, adanya retribusi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang digunakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata dinilai cukup adil dan tidak membebaskan kepada pihak pengelola. Seiring dengan meningkatnya prospek pariwisata di Indonesia, pengelola desa wisata dan pengelola unit usaha pengelolaan kawasan wisata yang dimiliki oleh BUMDes secara rutin meningkatkan kualitas dari wisata yang ditawarkannya. Hal tersebut guna menarik wisatawan lebih banyak lagi yang pada saat ini seiring dengan perkembangan jaman mulai banyak wisatawan yang memilih wisata alternatif ke desa dibandingkan ke tempat rekreasi lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel 11 Keberlanjutan (*sustainability*) unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan

Keberlanjutan unit usaha BUMDes	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Rendah	0	0,00	6	17,14	0	0,00
Sedang	0	0,00	20	57,14	6	17,14
Tinggi	35	100,00	9	25,71	29	82,86
Total	35	100	35	100	35	100

Keberlanjutan dari unit usaha pengelolaan kawasan wisata yang dimiliki oleh BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran untuk anggota dan masyarakat terdampak tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 100 persen. Hal ini didasari oleh pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara berkala baik yang dilakukan oleh pengelola desa wisata, BUMDes, maupun Desa Nglanggeran mampu untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dari anggota dan masyarakat yang terdampak. Selain itu juga, kontrol rutin secara berkala yang dilakukan oleh pengelola desa wisata, BUMDes dan Desa Nglanggeran mampu untuk memastikan pelaksanaan unit usaha ini berjalan dengan optimal. Kontrol yang dilaksanakan juga untuk memastikan fasilitas-fasilitas pendukung wisata untuk tetap optimal digunakan. Selain itu juga, pengelola desa wisata di Desa Nglanggeran dibebaskan oleh Desa Nglanggeran untuk mengikuti serangkaian kegiatan perlombaan kepariwisataan yang diadakan baik secara regional, nasional maupun internasional. Hasil positif terus didapatkan oleh pengelola desa wisata. Hasil positif tersebut mampu untuk menarik investor dan wisatawan. Dana yang diterima oleh pengelola desa wisata digunakan sepenuhnya untuk memperbaiki kualitas dari wisata yang ditawarkan oleh Desa Nglanggeran. Hal tersebut dianggap adil oleh seluruh masyarakat yang berada di Desa Nglanggeran.

Keberlanjutan dari unit usaha pengelolaan kawasan wisata yang dimiliki oleh BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco untuk anggota dan masyarakat terdampak tergolong dalam kategori sedang dengan besaran persentase mencapai sebesar 57 persen. Hal ini didasari kepada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco maupun Desa Banyusoco belum mampu untuk memberikan peningkatan kemampuan dan keahlian secara optimal kepada anggota dan masyarakat yang terdampak. Kurang optimalnya pelatihan-pelatihan tersebut didasari karena rendahnya keinginan untuk ikut serta dari masyarakat dalam pelatihan-pelatihan tersebut. Selain itu juga, kontrol rutin masih bersifat internal dari pengelola desa wisata saja, belum mencakup BUMDes maupun Desa yang mengakibatkan pelaksanaan unit usaha pengelolaan kawasan wisata tidak berjalan secara optimal. Hal lain yang menjadi permasalahan

keberlanjutan dari unit usaha pengelolaan kawasan wisata yang dimiliki oleh BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco adalah kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pengelola kawasan wisata Taman Madu Bronto dan kawasan wisata Wanatirta Kedungwanglu. Kebebasan yang diberikan oleh Desa Banyusoco juga tidak didukung dengan pemberian fasilitas-fasilitas penunjang wisata yang dikelola oleh unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco.

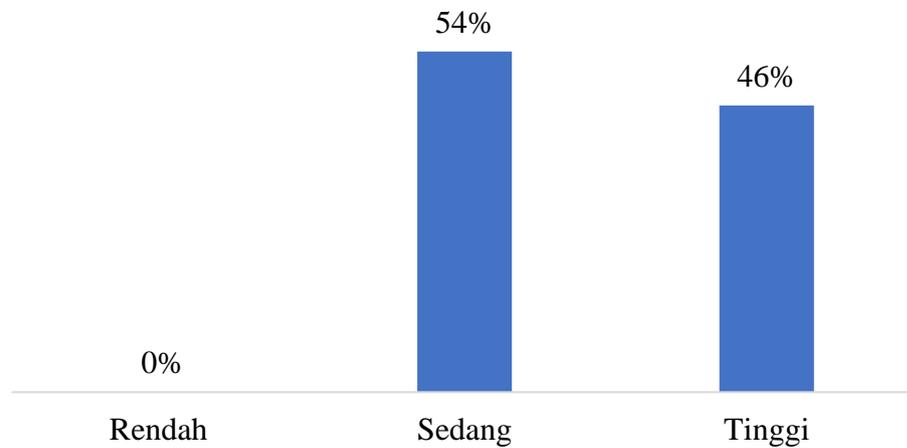
Sementara itu, keberlanjutan unit usaha pengelolaan kawasan wisata yang dimiliki oleh BUMDes Maju Mandiri Pulutan untuk anggota dan masyarakat yang terdampak tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 83 persen. Hal ini terjadi karena BUMDes Maju Mandiri Pulutan dan Desa Pulutan secara berkala memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota dan masyarakat yang terdampak akan hadirnya unit usaha ini. Meskipun baru aktif kembali pengurus BUMDes Maju Mandiri Pulutan memiliki kepercayaan bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk anggota dan masyarakat kedepannya akan membawa dampak yang positif untuk berkembangnya wisata di Desa Pulutan. Selain memberikan pelatihan-pelatihan untuk anggota dan masyarakat yang terdampak, pengurus BUMDes Maju Mandiri Pulutan dan Desa Pulutan secara berkala juga melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan unit usaha ini berjalan secara optimal. Tidak jarang juga ketua BUMDes Maju Mandiri Pulutan turun langsung untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi dilapangan demi memastikan kelancaran dari unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Monitoring juga dilaksanakan guna memastikan fasilitas-fasilitas penunjang wisata dapat digunakan secara optimal. BUMDes Maju Mandiri Pulutan dan Desa Pulutan juga memberikan keleluasaan dan dukungan kepada para pengelola kawasan Lembah Desa Pulutan untuk melakukan kegiatan perlombaan wisata baik secara regional, nasional maupun internasional. Selain itu juga, kegiatan pemasaran Lembah Desa Pulutan juga diserahkan sepenuhnya kepada pengelola desa wisata tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

5.3.4 Besaran dan Luasan Geografis Akibat Positif

Besaran dan Luasan Geografis Akibat Positif (*Impact*) Unit Usaha BUMDes Pengelolaan Kawasan Wisata



Gambar 18 Persentase hasil besaran dan luasan geografis akibat positif unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

Berdasarkan Gambar 18 yang memuat persentase hasil besaran dan luasan geografis akibat positif dari unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata, dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan besaran dan luasan geografis akibat positif yang ditimbulkan oleh unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata tergolong dalam kategori sedang dengan besaran persentase mencapai sebesar 54 persen dari total responden. Hal ini disebabkan oleh unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata menyoar kepada masyarakat padukuhan yang terkena imbas dari adanya kegiatan kepariwisataan untuk melakukan proses kegiatan dan pemasaran wisata di Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan. Selain itu juga, unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata juga memberikan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat di wilayah Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan. Hal tersebut menjadikan wilayah desa tersebut dapat mengurangi jumlah pengangguran sekaligus mengurangi transmigrasi masyarakat desa untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Unit usaha ini memang memiliki pengaruh yang besar untuk anggota dan masyarakat sekitar yang terdampak, dimana pengaruh yang ditimbulkan tersebut berupa peningkatan keahlian, keterampilan, status sosial dalam masyarakat hingga perbaikan ekonomi dalam rumah tangga. Selain itu juga, pengaruh positif dari hadirnya unit usaha ini adalah meningkatkan kreativitas dari anggota dan masyarakat yang dapat diimplementasikan menjadi sebuah produk wisata yang memiliki nilai jual lebih. Meskipun banyak terdapat dampak positif yang ditimbulkan akan tetapi mayoritas dari unit usaha ini masih berfokus pada satu atau dua padukuhan saja belum merata sampai satu desa. Selain itu juga, masih terdapat masyarakat yang belum mengambil bagian dalam unit usaha ini sehingga pertumbuhan positif dari kegiatan pariwisata tidak diikuti dengan perkembangan masyarakat desa. Unit usaha BUMDes pengelolaan

kawasan wisata memang pada dasarnya terbuka untuk masyarakat desa akan tetapi pada kenyataannya masih banyak anggota dan masyarakat yang terdampak tidak bisa mengajak teman atau sanak keluarga yang tinggal dalam satu desa.

Tabel 12 Besaran dan luasan geografis akibat positif (*impact*) unit usaha BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan

Besaran dan luasan geografis akibat positif unit usaha BUMDes	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Rendah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sedang	10	28,57	26	74,29	21	60,00
Tinggi	25	71,43	9	25,71	14	40,00
Total	35	100	35	100	35	100

Besaran dan luasan geografis akibat positif akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran untuk anggota dan masyarakat terdampak tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 71 persen. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan hadirnya unit usaha ini mampu untuk mengurangi jumlah pengangguran dan transmigrasi masyarakat Desa Nglanggeran. Selain itu juga, dengan hadirnya unit usaha ini mampu untuk memberikan dorongan yang signifikan kepada anggota dan masyarakat terdampak untuk mengembangkan serta meningkatkan keahlian, keterampilan, status sosial dalam masyarakat hingga perbaikan ekonomi dalam rumah tangga. Selain itu juga, unit usaha ini melalui konsep yang diusung sudah mampu untuk memberikan dampak lebih besar terhadap satu desa bukan hanya terhadap satu atau dua padukuhan saja. Dampak yang lebih besar ini karena kelompok-kelompok masyarakat di Desa Nglanggeran yang telah diberikan pelatihan sehingga memiliki keterampilan khusus tersebar di berbagai wilayah Desa Nglanggeran. Tidak sulit untuk unit usaha ini berkembang, hal tersebut dikarenakan anggota dan masyarakat yang terdampak bersama-sama mendukung kegiatan kepariwisataan dengan menciptakan sebuah kreativitas yang diimplementasikan menjadi sebuah produk wisata yang memiliki nilai jual lebih.

Besaran dan luasan geografis akibat positif akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco untuk anggota dan masyarakat terdampak tergolong dalam kategori sedang dengan besaran persentase mencapai sebesar 74 persen. Hal tersebut dapat terjadi karena unit usaha ini memberikan lapangan pekerjaan baru di Desa Banyusoco yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan transmigrasi masyarakat Desa Banyusoco. Berdasarkan hasil pengamatan, unit usaha ini dapat meningkatkan keahlian, keterampilan, status sosial dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

masyarakat hingga perbaikan ekonomi dalam rumah tangga apabila dikelola secara optimal. Namun, kondisi dilapangan belum memungkinkan untuk unit usaha ini dikelola secara optimal karena kurangnya perhatian dari pihak Desa Banyusoco dan pihak BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco. Kondisi lain yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan kawasan wisata ini adalah kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan dari dua wilayah wisata yang dimiliki oleh Desa Banyusoco. Berkembangnya wisata di Desa Banyusoco tidak diimbangi dengan berkembangnya perekonomian masyarakat serta tidak diimbangi juga dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki oleh Desa Banyusoco.

Sementara itu, besaran dan luasan geografis akibat positif akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan untuk anggota dan masyarakat terdampak tergolong dalam kategori sedang dengan besaran persentase mencapai sebesar 60 persen. Hal tersebut terjadi dikarenakan, unit usaha ini mampu memberikan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Desa Pulutan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran di desa dan mengatasi permasalahan transmigrasi di desa. Namun, unit usaha ini baru mampu untuk memberikan lapangan pekerjaan baru kepada satu padukuhan dari sembilan padukuhan yang terdapat di Desa Pulutan. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, wisata Lembah Desa Pulutan secara signifikan mampu untuk memberikan dorongan kepada anggota dan masyarakat dalam meningkatkan keahlian, keterampilan, status sosial di masyarakat hingga perbaikan ekonomi rumah tangga. Unit usaha ini belum mampu untuk memberikan dampak positif yang lebih luas untuk satu desa. Anggota dan masyarakat yang terdampak unit usaha ini secara berkala membuat kreativitas yang diimplementasikan menjadi daya tarik untuk wisatawan berkunjung ke Lembah Desa Pulutan.

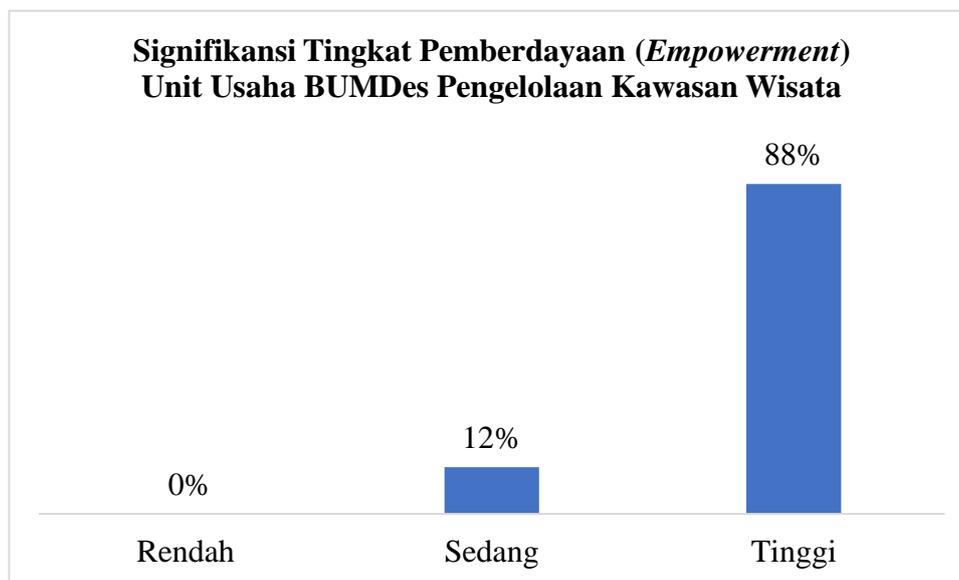
@Hak cipta milik IPB University

IPB University



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

5.3.5 Signifikansi Tingkat Pemberdayaan



Gambar 19 Persentase hasil signifikansi tingkat pemberdayaan unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

Berdasarkan Gambar 19 yang memuat persentase hasil signifikansi tingkat pemberdayaan dari unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata, dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan signifikansi tingkat pemberdayaan dari unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 88 persen. Hal ini terjadi dikarenakan mayoritas dari responden merasakan adanya peningkatan yang signifikan akan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh tiap individu responden akibat adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh BUMDes, Desa dan pihak ke tiga untuk mendukung keberhasilan dari pengelolaan kawasan wisata. Pelatihan-pelatihan yang diberikan selalu menuntut tiap-tiap individu untuk terus berkembang dalam segi kreativitas, ekonomi dan sosial. Perubahan dalam bidang sosial dapat dilihat melalui diakuinya anggota dan masyarakat desa terdampak unit usaha ini dalam lingkungan terdekatnya sebagai pelaku usaha wisata yang memiliki kegiatan positif. Perubahan dalam bidang ekonomi dapat dilihat melalui adanya peningkatan pendapatan dari anggota dan masyarakat terdampak unit usaha ini untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, meskipun pendapatan yang diterima masih bersifat tidak tetap (mengikuti waktu-waktu tertentu). Perubahan dalam bidang lingkungan dapat dilihat melalui adanya pengurangan jumlah pengangguran di masyarakat yang melakukan hal-hal negatif. Selain itu juga perubahan dalam bidang lingkungan dapat dilihat melalui kebersihan lingkungan, kenyamanan lingkungan dan keindahan lingkungan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan lingkungan guna mendukung industri pariwisata yang dimiliki oleh desa.

Tabel 13 Signifikansi tingkat pemberdayaan (*empowerment*) unit usaha BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco, BUMDes Desa Pulutan

Signifikansi tingkat pemberdayaan unit usaha BUMDes	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Rendah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sedang	0	0,00	12	34,29	1	2,86
Tinggi	35	100,00	23	65,71	34	97,14
Total	35	100	35	100	35	100

Signifikansi tingkat pemberdayaan akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran untuk anggota dan masyarakat terdampak tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 100 persen. Hal tersebut terjadi dikarenakan anggota dan masyarakat yang terdampak akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata sama-sama merasakan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal keahlian dan keterampilan. Peningkatan tersebut sejalan dengan berkalanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh BUMDes, Desa dan pihak ke tiga. Selain itu juga, melalui pelatihan-pelatihan tersebut anggota dan masyarakat terdampak dituntut untuk terus berkembang dalam segi kreativitas, sosial, ekonomi dan lingkungan. Perubahan dalam segi kreativitas dapat dilihat melalui pengemasan kegiatan pariwisata di Desa Nglanggeran dengan menerapkan konsep *community-based tourism* sehingga dapat menaikkan nilai jual dari wisata di Desa Nglanggeran. Perubahan dalam segi sosial dapat dilihat dari semangat gotong royong yang semakin kental di Desa Nglanggeran. Perubahan dalam segi ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri meskipun peningkatan pendapatan yang terjadi masih bersifat tidak tetap (waktu-waktu tertentu). Sementara itu, perubahan dalam segi lingkungan dapat dilihat melalui berkurangnya jumlah pengangguran dan transmigran di Desa Nglanggeran.

Signifikansi tingkat pemberdayaan akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco untuk anggota dan masyarakat terdampak tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 66 persen. Hal tersebut dapat terjadi karena anggota dan masyarakat yang terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata sama-sama merasakan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal keahlian dan keterampilan. Peningkatan tersebut sejalan dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara berkala dan diinisiasi oleh Desa Banyusoco. Pelatihan yang dilaksanakan tersebut memiliki tujuan guna kelancaran pengelolaan kawasan wisata Desa Banyusoco, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala di dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan juga menuntut kepada anggota dan masyarakat terdampak unit usaha ini untuk terus berkembang dalam segi

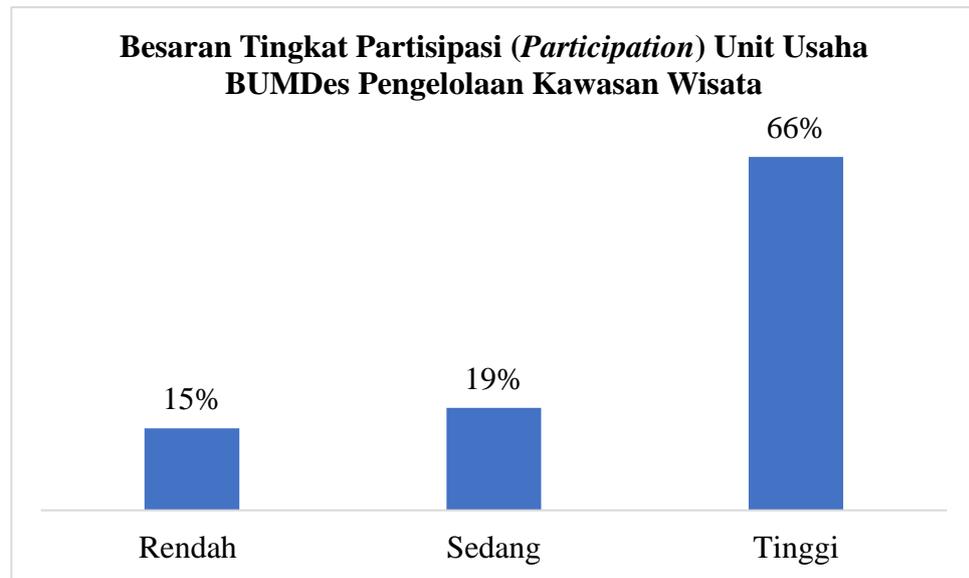
keaktivitas, sosial, ekonomi dan lingkungan. Perubahan pada segi kreativitas dapat dilihat melalui pengemasan ulang wisata yang dilakukan oleh pengelola dibantu masyarakat sekitar Taman Madu Bronto dan Wanatirta Kedungwanglu guna menarik perhatian dari wisatawan. Perubahan pada segi sosial dapat dilihat melalui kerjasama, gotong royong, dan semangat kekeluargaan antara anggota dan masyarakat untuk menjadikan Desa Banyusoco lebih maju. Perubahan pada segi ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan baik anggota maupun masyarakat yang terdampak unit usaha ini, meskipun peningkatannya hanya mampu untuk menghidupi diri sendiri dan bersifat tidak tetap (mengikuti waktu tertentu). Sementara itu, perubahan dalam segi lingkungan dapat dilihat melalui berkurangnya pengangguran meskipun belum signifikan dirasakan.

Signifikansi tingkat pemberdayaan akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan untuk anggota dan masyarakat terdampak tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 97 persen. Hal tersebut terjadi dikarenakan anggota dan masyarakat terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata sama-sama merasakan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal keahlian dan keterampilan. Peningkatan tersebut sejalan dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara berkala oleh pihak BUMDes Maju Mandiri Pulutan maupun oleh Desa Pulutan. Pelatihan tersebut dilaksanakan guna memperlancar jalannya pengelolaan kawasan wisata di Desa Pulutan. Selain itu, pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan juga menutut kepada anggota dan masyarakat yang terdampak unit usaha ini untuk terus berkembang dalam segi kreativitas, ekonomi, sosial dan lingkungan. Perubahan dalam segi kreativitas dapat dilihat melalui pembangunan kawasan wisata Lembah Desa Pulutan yang dibuat nyaman, aman dan memanjakan mata dengan melihat hamparan sawah serta ikan yang berenang melewati tanaman padi. Perubahan dalam segi ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan baik anggota maupun masyarakat yang terdampak unit usaha ini, meskipun peningkatannya masih bersifat tidak tetap (mengikuti waktu tertentu). Perubahan dalam segi sosial dapat dilihat melalui semangat kekeluargaan dan gotong royong yang terbentuk guna menjadikan wisata Lembah Desa Pulutan lebih baik lagi. Sementara itu, perubahan dalam segi lingkungan dapat dilihat melalui pengurangan jumlah pengangguran, pengurangan jumlah transmigran dan penyelesaian konflik akibat kecemburuan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

5.3.6 Tingkat Partisipasi



Gambar 20 Persentase hasil besaran tingkat partisipasi unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

Berdasarkan kepada Gambar 20 yang memuat persentase hasil besaran tingkat partisipasi dari unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata, mayoritas responden penelitian menyatakan bahwa besaran tingkat partisipasi tergolong kedalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 62 persen. Hal ini didasari oleh keterlibatan aktif dari responden di dalam seluruh tahapan partisipasi. Tahapan partisipasi tersebut merujuk kepada pernyataan yang telah dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980), dimana tahapan partisipasi terdiri dari empat tahap yaitu tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil hingga tahap evaluasi. Tahap pertama yang merupakan tahap dari pengambilan keputusan adalah dasar dari terbentuknya unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Tahap ini diawali dengan dilakukannya *social mapping* oleh BUMDes dan desa. Kegiatan *social mapping* tersebut dilakukan guna memperoleh informasi terkait dengan permasalahan dan potensi yang dimiliki desa pada tiap-tiap padukuhan. Setelah melakukan kegiatan *social mapping*, tahap selanjutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan bertujuan untuk membangun komunikasi antara pihak BUMDes, desa dan masyarakat sehingga dapat terbentuk dan terlaksanakannya unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan, dimana pada tahap pelaksanaan ini dilakukan pelatihan-pelatihan untuk melatih keahlian dan keterampilan guna menjalankan proses pariwisata. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh anggota dan masyarakat yang terdampak akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Setelah diberikan pelatihan serta responden sudah mampu untuk melaksanakan kegiatan pariwisata maka kegiatan pengelolaan kawasan wisata dapat dilaksanakan. Tahap selanjutnya adalah tahap menikmati hasil, dimana pada tahap ini dapat dilihat melalui manfaat yang diterima oleh anggota maupun masyarakat yang terdampak

akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Pelaksanaan kegiatan dari pengelolaan kawasan wisata yang diikuti oleh anggota dan masyarakat yang terdampak akan mendapatkan upah sesuai dengan tugas pokok dari masing-masing individu. Selain mendapatkan upah, tiap-tiap individu juga mendapatkan pengetahuan baru, keterampilan dan keahlian yang meningkat dalam proses kegiatan pariwisata. Tahap evaluasi dilaksanakan oleh pihak pengelola desa wisata, BUMDes dan desa pada setiap minggu, bulan, semester dan tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilaksanakan untuk melihat dan menilai kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pariwisata. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dengan keikutsertaan penuh dari anggota dan masyarakat yang terdampak akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata.

Tabel 14 Besaran tingkat partisipasi (*participation*) unit usaha BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan

Besaran tingkat partisipasi unit usaha BUMDes	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Rendah	0	0,00	16	45,71	0	0,00
Sedang	0	0,00	11	31,43	9	25,71
Tinggi	35	100,00	8	22,86	26	74,29
Total	35	100	35	100	35	100

Besaran tingkat partisipasi akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran untuk anggota dan masyarakat terdampak tergolong ke dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 100 persen. Tingginya besaran tingkat partisipasi disebabkan oleh seluruh anggota dan masyarakat terdampak diikuti sertakan dalam tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil dan tahap evaluasi. Selain diikuti sertakan dalam berbagai tahap, anggota dan masyarakat juga diberikan hak yang sama untuk memberikan usulan, kritik dan saran di setiap tahapnya. Pemberian hak yang sama di setiap tahapan yang dilalui membuat anggota dan masyarakat yang terdampak lebih pro aktif terkait dengan kegiatan pariwisata yang dijalankan. Besarnya tingkat partisipasi juga membuat kegiatan atau program kerja dari unit usaha pengelolaan kawasan wisata berada pada jalur pertumbuhan yang positif.

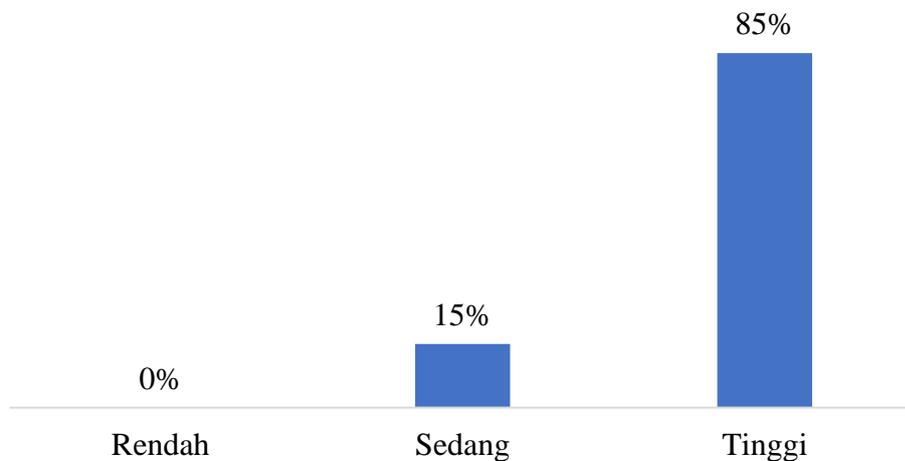
Besaran tingkat partisipasi akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco untuk anggota dan masyarakat terdampak tergolong dalam kategori rendah dengan besaran persentase mencapai sebesar 46 persen. Rendahnya besaran tingkat partisipasi tersebut dikarenakan banyak anggota dan masyarakat terdampak tidak ikut serta dalam tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil dan tahap evaluasi. Ketidakikutsertaan anggota dan masyarakat terdampak disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

desa dan BUMDes kepada pihak pengelola desa wisata. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dan masyarakat berdampak menyebabkan tidak berjalan lancarnya seluruh kegiatan atau program dari unit usaha pengelolaan kawasan wisata, akibatnya wisata yang berada di Desa Banyusoco mengalami pertumbuhan yang sama sekali tidak naik dan turun.

Sementara itu, besaran tingkat partisipasi akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan untuk anggota dan masyarakat terdampak tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 74 persen. Tingginya besaran tingkat partisipasi tersebut disebabkan oleh banyaknya anggota dan masyarakat yang terdampak ikut serta dalam tahapan partisipasi seperti tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil hingga tahap evaluasi. Hal tersebut terjadi karena anggota dan masyarakat terdampak menginginkan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh unit usaha pengelolaan kawasan wisata dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama dari BUMDes Maju Mandiri Pulutan. Selain itu, anggota dan masyarakat mendapatkan hak yang sama untuk memberikan usulan, kritik dan saran dalam setiap tahapan yang dilaksanakan. Pemberian hak yang sama tersebut pada akhirnya memperlancar kegiatan atau program wisata yang dilaksanakan oleh unit usaha pengelolaan kawasan wisata.

Efektivitas Unit Usaha BUMDes Pengelolaan Kawasan Wisata



Gambar 21 Persentase hasil efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

Mengacu kepada gambar 21 yang memuat persentase efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata, mayoritas responden menyatakan bahwa efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 85 persen. Besaran persentase tersebut didapat melalui pengakumulasian semua indikator yang berkaitan dengan efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata. Melalui nilai persentase tersebut dapat dinyatakan bahwa unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata memiliki efektivitas yang tinggi. Efektivitas unit usaha BUMDes

pengelolaan kawasan wisata tergolong dalam kategori tinggi dapat dibuktikan melalui indikator kebermanfaatan, indikator kesesuaian, indikator keberlanjutan, indikator signifikansi tingkat pemberdayaan dan indikator besaran tingkat partisipasi tergolong dalam kategori tinggi. Sementara itu, untuk indikator besaran dan luasan akibat positif berada pada kategori sedang. Unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata yang dibentuk oleh BUMDes sebagai sarana untuk memberikan lapangan pekerjaan baru, mengoptimalkan potensi desa serta sebagai sarana kepedulian sosial dan lingkungan disekitar wilayah desa sudah efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Hal tersebut dibuktikan melalui unit usaha yang berkolaborasi bersama desa dengan memberikan pelatihan, fasilitas umum, sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata. Secara keseluruhan unit usaha ini mampu untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan dari anggota dan masyarakat terdampak, selain itu juga unit usaha ini mampu untuk meningkatkan kreativitas, status sosial, ekonomi dan lingkungan.

Tabel 15 Besaran efektivitas unit usaha BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan

Efektivitas unit usaha BUMDes	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Rendah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sedang	0	0,00	16	45,71	0	0,00
Tinggi	35	100,00	19	54,29	35	100,00
Total	35	100	35	100	35	100

Besaran efektivitas akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran untuk anggota dan masyarakat terdampak tergolong ke dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 100 persen. Hal ini disebabkan karena dari seluruh indikator efektivitas yang dinilai pada responden di Desa Nglanggeran keseluruhannya tergolong dalam kategori tinggi. Selain itu juga Desa Nglanggeran sudah termasuk ke dalam kategori Desa Mandiri untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan, pengelolaan dan pemanfaatan unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Permasalahan lahan yang tidak efektif, pengangguran, permasalahan transmigrasi dan penambangan ilegal di Desa Nglanggeran menjadi bahan evaluasi yang membuat masyarakat beserta karang taruna mulai bergerak untuk menjadikan masalah tersebut sebagai peluang. Perlahan demi perlahan wisata yang diinisiasi oleh masyarakat dan karang taruna serta berdasarkan kepada permasalahan yang terjadi di Desa Nglanggeran sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Nglanggeran. Geliat usaha pariwisata perlahan juga mampu untuk membangun Desa Nglanggeran

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

menjadi desa yang mandiri. Hal tersebut disebabkan oleh berulangkalnya wisata di Desa Nglanggeran menjuarai perlombaan wisata baik secara regional, nasional hingga internasional. Melalui perlombaan tersebut pengelola desa wisata beserta BUMDes dan desa mengevaluasi serta memperbaiki apa saja kekurangan yang terdapat dalam wisata di Desa Nglanggeran sehingga wisata di Desa Nglanggeran mampu untuk terus tumbuh berkembang hingga maju seperti pada saat ini. Konsep wisata *community-based tourism* berjalan dengan lancar di dalam paket wisata yang ditawarkan oleh pengelola desa wisata Desa Nglanggeran. Konsep tersebut bertumpu pada kolaborasi antar kelompok masyarakat yang menekankan kepada masyarakat itu sendiri untuk mampu mengembangkan serta memajukan sendiri wisata di Desa Nglanggeran. Melalui konsep tersebut, masyarakat diberikan keuntungan untuk menambah atau memperbaiki perekonomiannya dengan tidak menghilangkan pekerjaan utama dan tidak mengganggu privasi mereka. Saat ini pengelola desa wisata menjalankan industri pariwisata dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Nglanggeran yaitu Gunung Api Purba, Air Terjun Kandang, Kampung Pitu, Tlogo Guyangan, Sumber Comberan, Gunung Pendem untuk wisata alamnya. Wisata budaya yang dijalankan oleh pengelola desa wisata Desa Nglanggeran antara lain Karawitan, Gejog Lesung, Rasulan, Tingalan, *Videomaker*, Permainan Rakyat Tradisional. Sementara itu, untuk wisata buatan yang dijalankan atau dikelola oleh pengelola desa wisata Desa Nglanggeran antara lain Agrowisata Embung, Ngekong dan Hidroponik.

Besaran efektivitas akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco untuk anggota dan masyarakat yang terdampak tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 54 persen. Hal ini dikarenakan dari ke enam indikator efektivitas hanya indikator kesesuaian dan indikator signifikansi tingkat pemberdayaan yang tergolong ke dalam kategori tinggi. Sementara itu, untuk indikator kebermanfaatan, indikator keberlanjutan serta indikator besaran dan luasan geografis akibat positif tergolong dalam kategori sedang. Selanjutnya, untuk indikator besaran tingkat partisipasi masuk ke dalam kategori rendah. Pembentukan, pengelolaan dan pemanfaatan unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Awal dari pembentukan, pengelolaan dan pemanfaatan unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco didasari oleh banyaknya potensi yang bisa dioptimalkan untuk membantu mengembangkan dan memajukan desa. Permulaan pergerakan dari unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco dengan membentuk rintisan wisata. Wilayah dari rintisan wisata yang dibentuk keseluruhannya merupakan tanah milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibawah pengelolaan Balai KPH Yogyakarta. Terdapat wilayah yang tidak dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibawah pengelolaan Balai KPH Yogyakarta yaitu berupa aliran Sungai Oya. Oleh sebab itu, BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan



Kehutanan Provinsi Daerah Yogyakarta untuk memanfaatkan jasa lingkungan wisata alam di kawasan hutan produksi. Kerjasama tersebut tertuang dalam surat bernomor 199/29037 dan 02/bumdesbangkit/x/2020. Pengelolaan rintisan wisata yang sudah dikemas oleh BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco dalam perjalanannya mendapatkan beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang rata-rata memiliki pekerjaan sebagai petani hutan kayu sono keling serta rendahnya kesadaran dari karang taruna untuk mengembangkan Desa Banyusoco. Kendala selanjutnya berupa permodalan, masalah permodalan tersebut terjadi karena dalam rintisan wisata yang dibentuk oleh BUMDes serta bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi atas dua wilayah. Dua wilayah tersebut harus bergantian menerima bantuan permodalan yang keseluruhannya berasal dari dana desa. Perjalanan yang tidak mudah untuk BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco dalam mengembangkan rintisan wisatanya. Hadirnya kendala tersebut bukan hal yang serius. Hal tersebut dikarenakan untuk mengembangkan sumber daya manusia BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco dibantu dengan Desa Banyusoco, Balai KPH Yogyakarta dan komunitas wisata mulai melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan keahlian dari anggota dan masyarakat desa dalam mengembangkan industri pariwisata di Desa Banyusoco. Saat ini, unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco telah memiliki konsep untuk industri pariwisatanya. Konsep tersebut adalah *community-based tourism*, konsep yang sama dengan konsep wisata dari Desa Nglanggeran. Unit usaha ini juga telah memiliki beberapa wisata, wisata yang berkembang antara lain Taman Madu Bronto dan Wanatirta Kedungwanglu. Akan tetapi pada prosesnya, hanya beberapa anggota dan kelompok masyarakat saja yang masih aktif untuk mengembangkan wisata di Desa Banyusoco.

Sementara itu, besaran efektivitas akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan untuk anggota dan masyarakat terdampak tergolong dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 100 persen. Hal ini disebabkan oleh dari ke enam indikator efektivitas hanya indikator besaran dan luasan geografis positif saja yang berada dalam kategori sedang. Pembentukan, pengelolaan dan pemanfaatan unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan, pengelolaan dan pemanfaatan unit usaha ini beraawal dari banyaknya lahan pertanian yang potensial untuk dijadikan industri pariwisata dengan menerapkan konsep eduwisata. Tahun 2018 sebagai awal dibangunnya unit usaha ini untuk mengelola dan pemanfaatan lahan yang potensial tersebut, akan tetapi selama berjalan 2 tahun tidak ada perkembangan sama sekali. Baru pada tahun 2021, setelah pergantian pengurus BUMDes unit usaha ini mulai dikembangkan. Wisata Lembah Desa Pulutan yang dikembangkan menekankan kepada pemberdayaan masyarakat sekitar. Hal tersebut tercermin dari petani mina padi yang masih bekerja di dalam wisata Lembah Desa Pulutan. Selain itu juga, penyediaan 25 kios pedagang juga dibentuk untuk memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

mendapatkan akses pekerjaan. Pembangunan kedua dari wisata Lembah Desa Pulutan ini menelan anggaran mencapai 140 juta rupiah yang keseluruhan anggarannya merupakan dana dari pihak ke tiga. Hal ini disebabkan karena Desa Pulutan tidak memberikan fokus dana desa untuk pembangunan wisata Lembah Desa Pulutan. Bukan tanpa alasan Desa Pulutan tidak memberikan fokus dana desa tersebut, alasan utamanya adalah kegagalan pada pengurus BUMDes Maju Mandiri Pulutan sebelumnya yang gagal memberikan perkembangan pada unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Pembuktian dan keseriusan dilakukan oleh pengurus BUMDes Maju Mandiri Pulutan dalam membangun dan mengembangkan kembali potensi yang terdapat di dalam wisata Lembah Desa Pulutan. Hasil pembuktian dan keseriusan tersebut membawa angin segar untuk BUMDes Maju Mandiri Pulutan, karena berkat keseriusan dan pembuktian yang dilakukan unit usaha ini mampu memberikan peningkatan perekonomian kepada masyarakat yang terdampak serta mampu untuk memberikan peningkatan terbesar kedua untuk pendapatan asli desa. Pengelola desa wisata dan BUMDes Maju Mandiri Pulutan memberikan target untuk wisatawan yang berkunjung ke wisata Lembah Desa Pulutan dalam sebulan mencapai 5.000 jiwa. Selama 3 bulan berturut-turut hingga saat ini, pengelola desa wisata dan BUMDes Maju Mandiri Pulutan mampu menarik wisatawan yang berkunjung ke wisata Lembah Desa Pulutan melebihi target. Anggota dan masyarakat yang terdampak akan hadirnya unit usaha ini sudah sangat merasakan hasilnya melalui peningkatan kreativitas, peningkatan keahlian dan kemampuan, perubahan status sosial dan perubahan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ihsan dan Setiyono (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep yang menghasilkan pernyataan bahwa seluruh elemen yang berperan di dalam BUMDes seperti masyarakat, pemerintah desa dan pengelola BUMDes itu sendiri sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga meskipun BUMDes baru berdiri kurang lebih satu tahun sudah banyak menghasilkan pernyataan dari berbagai pihak akan prestasi yang ditorehkan melalui pengelolaan dan pengembangan unit usaha BUMDes Gerbang Lentera. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan BUMDes Gerbang Lentera menjadi efektif antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia serta potensi-potensi yang dimiliki desa lainnya. Selain itu juga, dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan unit usaha BUMDes. Hal yang serupa pun dinyatakan oleh Zunaidah *et al.* (2021) melalui penelitiannya yang berjudul Peran Usaha BUMDes Berbasis Pertanian dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan menghasilkan pernyataan bahwa dampak dari keberadaan BUMDes di Desa Keboireng sudah sangat baik terhadap masyarakat. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa keboireng untuk menanggulangi permasalahan ekonomi masyarakat melalui mobilisasi pengelolaan aset kekayaan yang dimiliki oleh Desa Keboireng serta memberikan bantuan dan dukungan kepada UMKM yang dikelola oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup melalui pengolahan hasil pertanian berupa pisang dan



ketela. BUMDes tidak hanya memberikan dampak kepada masyarakat saja, akan tetapi BUMDes juga memberikan dampak kepada pemerintah Desa Keboireng melalui terciptanya lapangan pekerjaan baru serta kesejahteraan yang dihasilkan dengan meningkatnya pendapatan asli desa dan menurunnya keluarga pra sejahtera.

@Hak cipta milik IPB University

5.4 Tingkat Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat Terdampak Unit Usaha BUMDes Pengelolaan Kawasan Wisata

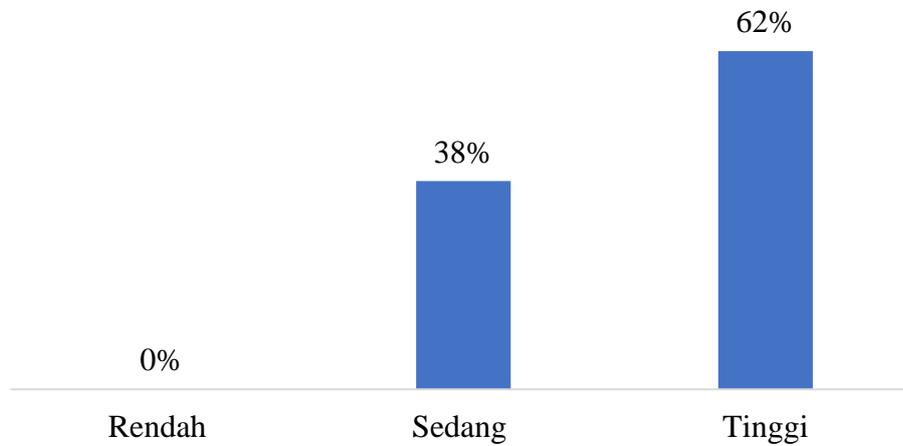
Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam menjaga dan membina stabilitas sosial serta ekonomi, dimana stabilitas sosial dan ekonomi diperlukan guna meminimalisir akan terjadinya kecemburuan sosial. Hakikatnya, setiap individu memerlukan kesejahteraan baik secara materil maupun non-materil. Kesejahteraan haruslah selalu dijadikan sebagai prinsip utama bagi seluruh unit-unit yang ada di dalam pemerintahan ataupun korporasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian untuk memberikan pelayanan sosial. Kesejahteraan juga merupakan sistem yang terorganisir dari setiap institusi dan pelayanan sosial guna membantu setiap individu atau kelompok dalam mencapai standar hidup serta kesehatan yang lebih baik (Friedlander 1961; Ambadar 2008; Tsabit 2019). Melalui UU No. 11 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan sebuah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat melalui bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar dari setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Penelitian ini dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat terdampak akan hadirnya unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata mengacu kepada indikator IPM dan kesejahteraan yang telah dikemukakan oleh BPS Kabupaten Gunungkidul (2021) dan BPS (2022), dimana indikator tersebut dikolaborasikan, sehingga menghasilkan enam indikator untuk penilaian tingkat kesejahteraan: 1) pendapatan; 2) pengeluaran atau konsumsi; 3) kesehatan dalam rumah tangga; 4) kemampuan dalam mendapatkan akses fasilitas kesehatan; 5) kualitas pendidikan; 6) kemampuan dalam mendapatkan akses pendidikan.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan tersebut, maka hasil yang terkait dengan tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat yang terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dimuat dalam Gambar 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tingkat Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat Terdampak Unit Usaha BUMDes



Gambar 22 Persentase tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

Berdasarkan hasil temuan yang dimuat dalam Gambar 22, mayoritas responden dalam penelitian tergolong ke dalam tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 62 persen. Hal ini disebabkan oleh hampir keseluruhan dari responden telah merasa memiliki hidup yang sejahtera serta telah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil ini juga merupakan jumlah kumulatif pendapatan yang diperoleh dari waktu ke waktu sehingga dapat dipergunakan guna memperbaiki kebutuhan hidup seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Terdapat 38 persen responden masih tergolong ke dalam tingkat kesejahteraan yang sedang, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa responden yang belum dapat mencapai tingkat kesejahteraan sesuai dengan skoring yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Tabel 16 Jumlah dan persentase anggota dan masyarakat terdampak hadirnya unit usaha BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan

Tingkat Kesejahteraan	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Rendah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sedang	0	0,00	25	71,43	15	42,86
Tinggi	35	100,00	10	28,57	20	57,14
Total	35	100	35	100	35	100

Tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat yang terdampak akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Tunas Mandiri

Nglanggeran tergolong ke dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 100 persen. Hal ini disebabkan oleh mayoritas responden sudah merasa memiliki hidup yang sejahtera serta telah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tingginya besaran persentase tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran juga disebabkan oleh terciptanya lapangan pekerjaan baru melalui pengelolaan kawasan wisata di Desa Nglanggeran yang dapat menyerap angkatan kerja produktif di Desa Nglanggeran. Komunikasi dan koordinasi yang baik juga dilakukan oleh masyarakat, pengelola desa wisata, BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran dan aparat Desa Nglanggeran guna terciptanya keadaan yang harmonis serta dapat meminimalisir konflik sosial yang terjadi antar masyarakat di Desa Nglanggeran.

Tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat yang terdampak akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco tergolong ke dalam kategori sedang dengan besaran persentase mencapai sebesar 71 persen. Hal ini disebabkan oleh mayoritas responden belum mencapai skoring yang ditetapkan dalam penelitian ini terkait dengan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan hasil pengamatan langsung, memang mayoritas responden sudah merasa memiliki hidup yang sejahtera akan tetapi banyak dari responden yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk sehari-hari. Hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyosoco memang membawa angin segar kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan, melalui unit usaha pengelolaan kawasan wisata tercipta lapangan pekerjaan baru di Desa Banyusoco guna mengurangi jumlah pengangguran dari angkatan kerja produktif di Desa Banyusoco. Sayangnya angin segar tersebut tidak dapat dioptimalkan semaksimal mungkin, dikarenakan kurangnya komunikasi dan koordinasi dari masyarakat, pengelola kawasan wisata, BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco dan Desa Banyusoco. Akibat dari kurangnya komunikasi dan koordinasi timbul rasa ketidakpercayaan terhadap unit usaha pengelolaan kawasan akibatnya terjadilah konflik sosial antara pemuda, masyarakat, pengelola desa wisata, BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco dan aparat Desa Banyusoco.

Sementara itu, tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat yang terdampak akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan tergolong ke dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai 57 persen. Hal ini disebabkan oleh mayoritas dari responden telah merasa memiliki hidup yang sejahtera serta telah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tingginya besaran tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan juga disebabkan oleh terciptanya lapangan pekerjaan baru melalui pengelolaan kawasan wisata di Desa Pulutan guna menyerap tenaga kerja usia produktif di Desa Pulutan. Meskipun besaran tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan tergolong ke dalam kategori tinggi, tetapi masih terdapat anggota ataupun masyarakat yang belum mencapai skoring tingkat kesejahteraan yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat masih belum dapat mengoptimalkan peluang yang tercipta melalui unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Selain itu juga, masih terdapatnya beberapa anggota dan masyarakat yang terdampak unit usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan ke dalam tingkat kesejahteraan sedang dikarenakan kurang terciptanya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, pengelola kawasan wisata, BUMDes Maju Mandiri Pulutan dan aparatur Desa Pulutan sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat belum optimal. Akibat dari kurang harmonisnya kehidupan bermasyarakat mengakibatkan masih terdapat konflik sosial di masyarakat. Konflik sosial yang terjadi disebabkan dari masih berkembangnya unit usaha ini sehingga belum mampu untuk benar-benar memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Pulutan lainnya.

5.4.1 Pendapatan

Pendapatan merupakan imbalan atau upah yang diterima oleh individu melalui aktivitas yang dilakukan berupa penjualan barang ataupun jasa kepada pihak lain. Penelitian ini melihat pendapatan pada anggota dan masyarakat yang terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata. Pendapatan yang diperoleh oleh anggota dan masyarakat dapat dilihat melalui kegiatan yang menghasilkan imbalan atau upah seperti pemandu wisata, petugas loket wisata, petugas parkir, penyedia penginapan, penjual cinderamata serta penjual makanan dan minuman. Data pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini diukur melalui pemberian skor pendapatan kepada anggota dan masyarakat yang terdampak baik sebelum maupun sesudah.

Tabel 17 Jumlah dan rata-rata perbedaan pendapatan responden sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

	Pendapatan Sebelum		Pendapatan Sesudah	
	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata
Desa Nglanggeran	35	3,09	35	9,14
Desa Banyusoco	35	3,20	35	8,74
Desa Pulutan	35	3,66	35	9,06

Tabel 17 memuat dan menjelaskan perbedaan rata-rata pendapatan responden pada kondisi sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata, dimana dalam tabel tersebut rata-rata pendapatan dari anggota dan masyarakat terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata meningkat setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Besaran rata-rata pendapatan responden untuk Desa Nglanggeran sebesar 3,09 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 9,14 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya kawasan wisata yang dibentuk dan dikelola langsung oleh masyarakat tanpa melalui pihak ketiga serta konsep pariwisata yang digunakan tidak meninggalkan pekerjaan utama dari masyarakat itu sendiri. Selain itu juga, masyarakat dituntut untuk terus mengembangkan inovasi dan kreativitas guna menambah pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya, peningkatan pendapatan juga dapat dilihat melalui jumlah kumulatif pengeluaran dari pengunjung wisata di Desa Nglanggeran. Kumulatif wisatawan yang berkunjung untuk melakukan kegiatan wisata di Desa Nglanggeran dalam

kurun waktu 1 tahun dapat membelanjakan uangnya kurang lebih mencapai 3 – 4 miliar rupiah.

Besaran rata-rata pendapatan responden untuk Desa Banyusoco sebesar 3,20 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta mengalami peningkatan menjadi 8,74 setelah terdampak dari hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya pengelolaan kawasan wisata yang dibentuk dan dikelola langsung oleh masyarakat tanpa melalui pihak ke tiga. Akan tetapi melalui pengamatan langsung dilapang, peningkatan pendapatan tersebut belum seluruhnya dirasakan secara optimal oleh anggota dan masyarakat yang terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan pendapatan secara optimal hanya dirasakan oleh anggota dan masyarakat yang terdampak kawasan wisata dengan tingkat partisipasi mengikuti setiap tahapan dari kegiatan unit usaha pengelolaan kawasan wisata tergolong ke dalam tingkat partisipasi yang tinggi. Selanjutnya, peningkatan pendapatan yang terjadi dapat dilihat melalui jumlah kumulatif pengeluaran wisatawan di Desa Banyusoco Jumlah kumulatif wisatawan yang berkunjung untuk melaksanakan kegiatan berwisata di Desa Banyusoco dalam kurun waktu 1 bulan dapat membelanjakan uangnya kurang lebih mencapai 10 juta rupiah.

Besaran rata-rata pendapatan responden untuk Desa Pulutan sebesar 3,66 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta mengalami peningkatakn menjadi 9,06 pada saat setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh hadirnya kawasan wisata yang dibentuk oleh BUMDes dan dikelola langsung oleh masyarakat serta konsep yang digunakan tidak merubah mata pencaharian utama dari setiap anggota dan masyarakat yang terdampak unit usaha tersebut. Masyarakat telah diberikan kesempatan yang sama untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan yang dihasilkan melalui inovasi serta kreativitas masing-masing individu. Selanjutnya, peningkatan pendapatan juga dapat dilihat melalui jumlah kumulatif pengeluaran wisatawan di Desa Pulutan. Jumlah kumulatif wisatawan yang berkunjung untuk berwisata di Lembah Desa Pulutan dalam kurun waktu 1 bulan kurang lebih sebanyak 5.000 jiwa dan menghasilkan pendapatan untuk pengelola Lembah Desa Pulutan mencapai 40 – 60 juta rupiah per bulan.

Tabel 18 Hasil uji beda Paired Sample T-test responden antara pendapatan sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

	Jumlah	
	N	Sig. (2-tailed)
Pendapatan sebelum – Pendapatan sesudah	105	.000

Tabel 18 memuat uji beda pendapatan sebelum dengan pendapatan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata. Perhitungan statistik tersebut menghasilkan nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dibawah batas kritis 0,05. Hasil nilai tersebut memiliki arti bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat pendapatan dari anggota dan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

sebelum dengan sesudah hadirnya unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata.

5.4.2 Pengeluaran atau Konsumsi

Pengeluaran atau konsumsi merupakan salah satu indikator dalam menentukan kesejahteraan disuatu wilayah. Sampai saat ini, pengertian yang berkembang terkait dengan pengeluaran dan kesejahteraan adalah besar kecilnya proporsi dalam pengeluaran untuk kebutuhan pangan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga non-pangan dapat dengan mudah memberikan gambaran terkait dengan kesejahteraan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka akan semakin kecil proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan, begitupun sebaliknya semakin rendah pendapatan yang diperoleh maka akan semakin besar proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Perubahan pada pendapatan yang diperoleh individu maka akan berpengaruh kepada pergeseran pola pengeluaran. Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat guna mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan yang terjadi digunakan sebagai petunjuk terkait dengan perubahan tingkat kesejahteraan (Ismardani 2019).

Tabel 19 Jumlah dan rata-rata perbedaan pengeluaran atau konsumsi responden sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

	Pengeluaran Sebelum		Pengeluaran Sesudah	
	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata
Desa Nglanggeran	35	3,11	35	5,6
Desa Banyusoco	35	2,80	35	4,51
Desa Pulutan	35	3,51	35	5,23

Tabel 19 memuat dan menjelaskan perbedaan rata-rata pengeluaran responden pada kondisi sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata, dimana dalam tabel tersebut rata-rata pengeluaran anggota dan masyarakat terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata mengalami peningkatan setelah hadirnya unit usaha tersebut. Besaran rata-rata pengeluaran responden untuk Desa Nglanggeran sebesar 3,11 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 5,6 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan pada pendapatan yang dihasilkan. Peningkatan pengeluaran yang terjadi pada responden di Desa Nglanggeran dipergunakan untuk mengkonsumsi barang atau jasa non-pangan seperti memperbaiki dan melengkapi keadaan serta fasilitas rumah tangga, meningkatkan fasilitas penunjang dalam sektor industri pariwisata dan lainnya. Pengeluaran untuk konsumsi pangan didapatkan melalui pendapatan dari pekerjaan utama anggota dan masyarakat terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata.

Besaran rata-rata pengeluaran responden untuk Desa Banyusoco sebesar 2,80 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 4,51 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan pengeluaran yang terjadi sejalan dengan peningkatan pendapatan yang dihasilkan. Peningkatan pengeluaran yang terjadi pada responden di Desa Banyusoco dipergunakan untuk konsumsi barang atau jasa non-pangan seperti membeli ternak tambahan, membeli benih atau bibit pertanian pendamping pertanian utama, menyulam tanaman di kawasan wisata, memperbaiki dan melengkapi keadaan serta fasilitas rumah tangga, meningkatkan fasilitas penunjang dalam sektor industri pariwisata dan lainnya. Sementara itu, untuk pengeluaran konsumsi pangan didapatkan melalui pendapatan dari mata pencaharian utama anggota dan masyarakat terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata.

Besaran rata-rata pengeluaran responden untuk Desa Pulutan sebesar 3,51 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 5,23 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan pengeluaran yang terjadi sejalan dengan peningkatan pendapatan yang dihasilkan. Mayoritas responden mengeluarkan pendapatan mereka guna mengkonsumsi barang atau jasa non-pangan. Mayoritas pengeluaran yang digunakan oleh responden di Desa Pulutan dipergunakan untuk membeli ternak tambahan, memperbaiki dan melengkapi fasilitas penunjang industri wisata, memperbaiki dan melengkapi keadaan serta fasilitas rumah tangga dan lainnya. Sementara itu, untuk pengeluaran konsumsi pangan didapatkan melalui mata pencaharian utama anggota dan masyarakat terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata.

Tabel 20 Hasil uji beda Paired Sample T-test responden antara pengeluaran sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan Kawasan wisata

	Jumlah	
	N	Sig. (2-tailed)
Pengeluaran Sebelum – Pengeluaran Sesudah	105	.000

Tabel 20 memuat uji beda pengeluaran sebelum dengan pengeluaran sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata. Perhitungan statistik tersebut menghasilkan nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dibawah batas kritis 0,05. Hasil nilai tersebut memiliki arti bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat pengeluaran dari anggota dan masyarakat sebelum dengan sesudah hadirnya unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata.

5.4.3 Kesehatan Rumah Tangga

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan jasmani yang harus selalu dimiliki oleh setiap individu. Pembangunan pada sektor kesehatan yang mendorong *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki keterikatan dengan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, parlemen, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, media

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

massa, lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (BAPPENAS 2022).

Tabel 21 Jumlah dan rata-rata perbedaan kesehatan rumah tangga responden sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

	Kesehatan Rumah Tangga Sebelum		Kesehatan Rumah Tangga Sesudah	
	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata
Desa Nglanggeran	35	4,86	35	8,26
Desa Banyusoco	35	3,29	35	7,80
Desa Pulutan	35	4,83	35	8,20

Tabel 21 memuat dan menjelaskan perbedaan rata-rata pengeluaran responden pada kondisi sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata, dimana dalam tabel tersebut rata-rata kesehatan rumah tangga anggota dan masyarakat terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata mengalami peningkatan setelah hadirnya unit usaha tersebut. Besaran rata-rata kesehatan rumah tangga responden untuk Desa Nglanggeran sebesar 4,86 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 8,26 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan kesadaran akan kesehatan rumah tangga pada setiap individu. Peningkatan kesehatan rumah tangga yang terjadi pada responden di Desa Nglanggeran sejalan dengan program kesehatan masyarakat hasil dari kolaborasi antara BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran, pengelola desa wisata Nglanggeran, aparatur Desa Nglanggeran serta pihak pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas Kecamatan Patuk. Program tersebut bertujuan untuk menjamin kesehatan rumah tangga mulai bagi seluruh kalangan usia. Program jaminan kesehatan rumah tangga tersebut dilaksanakan rutin setiap bulannya di rumah masing-masing penduduk Desa Nglanggeran.

Besaran rata-rata kesehatan rumah tangga responden untuk Desa Banyusoco sebesar 3,29 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 7,80 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan kesadaran akan kesehatan rumah tangga yang terjadi pada responden di Desa Banyusoco. Peningkatan kesadaran tersebut terjadi karena tuntutan untuk terus hidup sehat demi mendapatkan penghasilan tambahan melalui unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Selain itu juga, BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco berkolaborasi dengan aparatur Desa Banyusoco guna mengadakan sosialisasi terkait dengan kesehatan yang mengundang pihak badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

Besaran rata-rata kesehatan rumah tangga responden untuk Desa Pulutan sebesar 4,83 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan

kawasan wisata serta meningkat menjadi 8,20 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan kesadaran untuk kesehatan rumah tangga dari tiap individu baik anggota maupun masyarakat yang terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan kesadaran akan kesehatan rumah tangga tersebut terjadi disebabkan oleh masyarakat dan anggota yang tidak ingin melewatkan setiap tahapan dari perkembangan kawasan wisata yang terjadi di Desa Pulutan.

Tabel 22 Hasil uji beda Paired Sample T-test responden antara kesehatan rumah tangga sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

	Jumlah	
	N	Sig. (2-tailed)
Kesehatan rumah tangga sebelum – Kesehatan rumah tangga sesudah	105	.000

Tabel 22 memuat uji beda kesehatan rumah tangga sebelum dengan kesehatan rumah tangga sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata. Perhitungan statistik tersebut menghasilkan nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dibawah batas kritis 0,05. Hasil nilai tersebut memiliki arti bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat kesehatan rumah tangga dari anggota dan masyarakat sebelum dengan sesudah hadirnya unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata. Data tersebut juga didukung oleh data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Gunungkidul (2023) terkait dengan peningkatan yang terjadi pada angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Gunungkidul pada rentang waktu tahun 2020 – 2022.

Tabel 23 Data angka harapan hidup Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 - 2022

	Angka Harapan Hidup (Tahun)		
	2020	2021	2022
Kabupaten Gunungkidul	74,12	74,19	74,23

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul (2023)

Berdasarkan Tabel 23, angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Gunungkidul dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dimulai dari rumah tangga. Angka harapan hidup yang meningkat juga menjadi salah satu indikator adanya peningkatan pada IPM di Kabupaten Gunungkidul selain melalui kependudukan dan pendapatan.

5.4.4 Kemampuan Mengakses Fasilitas Kesehatan

Kemampuan dalam mengakses fasilitas kesehatan merupakan keadaan dari responden di dalam mengakses fasilitas kesehatan yang dipergunakan

untuk diri sendiri ataupun anggota keluarganya. Penelitian ini dalam mengukur kemampuan mengakses fasilitas kesehatan dilihat melalui kemampuan responden dalam pemilihan akses pengobatan seperti rumah sakit, klinik dokter mandiri, puskesmas, obat-obatan warung atau obat tradisional. Selain itu, penelitian ini dalam mengukur kemampuan mengakses fasilitas kesehatan juga dilihat dari kemampuan penggunaan dana dalam mengakses fasilitas kesehatan seperti BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan lain serta dana pribadi non-BPJS dan non-asuransi kesehatan lain.

Tabel 24 Jumlah dan rata-rata perbedaan kemampuan mengakses fasilitas kesehatan responden sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

	Kemampuan Mengakses Fasilitas Kesehatan Sebelum		Kemampuan Mengakses Fasilitas Kesehatan Sesudah	
	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata
Desa Nglanggeran	35	4,91	35	7,51
Desa Banyusoco	35	3,11	35	6,09
Desa Pulutan	35	4,51	35	7,00

Tabel 24 memuat dan menjelaskan perbedaan rata-rata kemampuan mengakses fasilitas kesehatan responden pada kondisi sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata, dimana dalam tabel tersebut rata-rata kemampuan mengakses fasilitas kesehatan anggota dan masyarakat terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata mengalami peningkatan setelah hadirnya unit usaha tersebut. Besaran rata-rata kemampuan mengakses fasilitas kesehatan responden untuk Desa Nglanggeran sebesar 4,91 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 7,51 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan tersebut terjadi disebabkan oleh mudahnya responden di Desa Nglanggeran guna memilih fasilitas kesehatan sesuai dengan yang diinginkan. Aparatur Desa Nglanggeran yang dibantu oleh BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran dan pengelola desa wisata telah mempermudah masyarakatnya dalam mengakses fasilitas kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui kerjasama yang dilakukan oleh Desa Nglanggeran dengan pihak puskesmas Kecamatan Patuk untuk melakukan pengecekan kesehatan rutin masyarakat Desa Nglanggeran. Masyarakat Desa Nglanggeran lebih memilih untuk melakukan pengobatan lebih lanjut di rumah sakit serta klinik dokter mandiri dari pada melalui puskesmas Kecamatan Patuk, akan tetapi tidak sedikit juga yang masih memilih melakukan pengobatan lebih lanjut ke puskesmas Kecamatan Patuk. Penggunaan dana dalam memilih fasilitas kesehatan dari masyarakat di Desa Nglanggeran mayoritas menggunakan BPJS Kesehatan, akan tetapi tidak sedikit juga yang menggunakan dana pribadi atau non-BPJS Kesehatan dan non-asuransi kesehatan lainnya.

Besaran rata-rata kemampuan mengakses fasilitas kesehatan responden untuk Desa Banyusoco sebesar 3,11 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 6,09 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan tersebut terjadi dikarenakan mudahnya responden di Desa Banyusoco dalam memilih fasilitas kesehatan sesuai dengan yang diinginkan. Masyarakat Desa Banyusoco mayoritas memilih fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik dokter mandiri. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Desa Banyusoco percaya bahwa apabila melakukan pengobatan di rumah sakit atau klinik dokter mandiri lebih cepat pulih dibandingkan melakukan pengobatan di puskesmas. Akibat dari mayoritas masyarakat Desa Banyusoco yang memiliki keyakinan lebih cepat pulih dengan melakukan pengobatan di rumah sakit atau klinik dokter mandiri, puskesmas pembantu di Desa Banyusoco sepi pasien. Sepinya pasien yang melakukan pengobatan di puskesmas pembantu mengakibatkan puskesmas pembantu tersebut tutup. Penggunaan dana dalam memilih fasilitas kesehatan dari masyarakat di Desa Banyusoco mayoritas menggunakan dana pribadi dari pada menggunakan BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.

Besaran rata-rata kemampuan mengakses fasilitas kesehatan responden untuk Desa Pulutan sebesar 4,51 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 7,00 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan tersebut terjadi disebabkan oleh mudahnya responden di Desa Pulutan dalam memilih fasilitas kesehatan sesuai dengan yang diinginkan. Mayoritas masyarakat di Desa Pulutan lebih memilih mengakses fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik dokter mandiri. Hal tersebut dikarenakan posisi dari Desa Pulutan yang dekat dengan Kecamatan Wonosari atau ibukota Kabupaten Gunungkidul sehingga pilihan dari fasilitas kesehatan lebih beragam. Penggunaan dana dalam memilih fasilitas kesehatan dari masyarakat di Desa Pulutan mayoritas menggunakan BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya dari pada menggunakan dana pribadi non-BPJS Kesehatan atau non-asuransi kesehatan lainnya.

Tabel 25 Hasil uji beda Paired Sample T-test responden antara kemampuan mengakses fasilitas kesehatan sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

	Jumlah	
	N	Sig. (2-tailed)
Kemampuan mengakses fasilitas kesehatan sebelum – Kemampuan mengakses fasilitas kesehatan sesudah	105	.000

Tabel 25 memuat uji beda kemampuan mengakses fasilitas kesehatan sebelum dengan kemampuan mengakses fasilitas kesehatan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata. Perhitungan statistik tersebut menghasilkan nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dibawah batas kritis 0,05. Hasil nilai tersebut memiliki arti bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara kemampuan dalam mengakses fasilitas kesehatan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

anggota dan masyarakat sebelum dengan sesudah hadirnya unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sesuai dengan tindak lanjut dari Peraturan Bupati No. 106 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kalurahan Sehat guna menindak lanjuti dinamika kesehatan yang terjadi dilapangan serta menindaklanjuti pencabutan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Desa. Perbup No. 106 Tahun 2021 tersebut dibuat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, peduli, serta tanggap dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan secara mandiri sesuai dengan wilayahnya. Kalurahan sehat merupakan kondisi dari kalurahan yang masyarakatnya sehat, peduli, tanggap dan mampu untuk meyelesaikan permasalahan kesehatan secara mandiri melalui peran aktif masyarakat dengan pengawasan yang berbasis kepada masyarakat, penyelenggaraan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBDM), penerapan dari perilaku hidup bersih dan sehat serta kemudahan dari akses pelayanan kesehatan. Tujuan dari penyelenggaraan kalurahan sehat itu sendiri ialah untuk meningkatkan komitmen serta kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar (Dinkes Kabupaten Gunungkidul 2022).

5.4.5 Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bagian yang terpenting di dalam kehidupan manusia. Pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu sarana sosial guna pencapaian tujuan sosial itu sendiri. Selain itu, melalui pendidikan kelangsungan hidup dari seseorang atau individu dapat terjamin. Pendidikan merupakan salah satu bagian atau indikator dari penilaian kesejahteraan masyarakat, dimana melalui tingkat pendidikan seseorang yang tinggi diharapkan untuk mampu memiliki kualitas hidup yang tinggi juga sehingga pada akhirnya mampu untuk mencapai kesejahteraan (Aini *et al.* 2018).

Tabel 26 Jumlah dan rata-rata perbedaan kualitas pendidikan responden sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

	Kualitas Pendidikan Sebelum		Kualitas Pendidikan Sesudah	
	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata
Desa Nglanggeran	35	5,69	35	9,69
Desa Banyusoco	35	5,29	35	9,37
Desa Pulutan	35	5,60	35	9,54

Tabel 26 memuat dan menjelaskan perbedaan rata-rata kualitas pendidikan responden pada kondisi sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata, dimana dalam tabel tersebut rata-rata kualitas pendidikan anggota dan masyarakat terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata mengalami peningkatan setelah hadirnya unit usaha tersebut. Besaran rata-rata kualitas pendidikan responden untuk Desa Nglanggeran sebesar 5,96 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 9,69 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan tersebut

terjadi karena terjadinya peningkatan kesadaran akan pentingnya kualitas individu yang didapatkan melalui pendidikan baik jalur formal maupun non-formal. Peningkatan yang terjadi juga sejalan dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara rutin oleh pihak pengelola desa wisata, BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran, Desa Nglanggeran, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pihak swasta.

Besaran rata-rata kualitas pendidikan responden untuk Desa Banyusoco sebesar 5,29 pada saat sebelum terdampak hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 9,37 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan yang terjadi disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan guna mendorong kualitas yang dimiliki oleh anggota dan masyarakat terdampak unit usaha. Peningkatan yang terjadi juga merupakan efek dari kebutuhan di dalam industri pariwisata serta sejalan dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara rutin oleh pihak pengelola kawasan wisata, BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco, Desa Banyusoco, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, Balai KPH Yogyakarta dan pihak swasta.

Besaran rata-rata kualitas pendidikan responden untuk Desa Pulutan sebesar 5,60 pada saat sebelum terdampak hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 9,54 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan yang terjadi disebabkan oleh kesadaran dari anggota dan masyarakat terdampak unit usaha akan pentingnya mengembangkan kualitas diri melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Peningkatan yang terjadi juga sejalan dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara rutin oleh pihak pengelola kawasan wisata, BUMDes Maju Mandiri Pulutan, Desa Pulutan, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul serta pihak swasta.

Tabel 27 Hasil uji beda Paired Sample T-test responden antara kualitas pendidikan sebelum dan sesudah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata

	Jumlah	
	N	<i>Sig. (2-tailed)</i>
Kualitas pendidikan sebelum – Kualitas pendidikan sesudah	105	.000

Tabel 27 memuat uji beda kualitas pendidikan sebelum dengan kualitas pendidikan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata. Perhitungan statistik tersebut menghasilkan nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dibawah batas kritis 0,05. Hasil nilai tersebut memiliki arti bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara kualitas pendidikan dari anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

dan masyarakat sebelum dengan sesudah hadirnya unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sejalan dengan peningkatan dari mutu pendidikan disatuan pendidikan guna memperbaiki hasil dari penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah dirancang serta ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi proses serta aktivitas pendidikan yang dilaksanakan. Cara menganalisis kualitas pendidikan dalam satu wilayah dapat dilihat melalui angka rata-rata lama sekolah. Kabupaten Gunungkidul mulai memperhatikan permasalahan pendidikan. Melalui data yang dikemukakan oleh BPS Kabupaten Gunungkidul (2023b) terkait dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan pada setiap tahunnya namun masih dalam kategori rendah.

Tabel 28 Rata-rata lama sekolah (tahun), 2020 – 2022 Kabupaten Gunungkidul

	Rata-rata Lama Sekolah		
	2020	2021	2022
Kabupaten Gunungkidul	7,21	7,30	7,31

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul (2023)

5.4.6 Kemampuan Mengakses Pendidikan

Pendidikan digunakan untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan mengakses pendidikan dalam penelitian ini dilihat melalui kemampuan dari individu maupun anggota keluarganya dalam mengakses fasilitas pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal dengan menggunakan pendapatan yang telah diterima.

Tabel 29 Jumlah dan rata-rata perbedaan kemampuan mengakses pendidikan responden sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

	Kemampuan Mengakses Pendidikan Sebelum		Kemampuan Mengakses Pendidikan Sesudah	
	Jumlah	Rata-rata	Jumlah	Rata-rata
Desa Nglanggeran	35	5,03	35	8,83
Desa Banyusoco	35	5,06	35	8,43
Desa Pulutan	35	5,71	35	8,66

Tabel 29 memuat dan menjelaskan perbedaan rata-rata kemampuan mengakses pendidikan responden pada kondisi sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata, dimana dalam tabel tersebut rata-rata kemampuan mengakses pendidikan anggota dan masyarakat terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata mengalami peningkatan setelah hadirnya unit usaha tersebut. Besaran rata-rata kemampuan mengakses pendidikan responden untuk Desa Nglanggeran

sebesar 5,03 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 8,83 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan ini terjadi dikarenakan sudah terciptanya kesadaran akan pentingnya pendidikan baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarganya. Mayoritas responden menuntut untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya dalam mendapatkan pendidikan yang layak baik secara formal maupun non-formal guna mengembangkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Besaran rata-rata kemampuan mengakses pendidikan responden untuk Desa Banyusoco sebesar 5,06 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 8,43 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan yang terjadi dikarenakan sudah terciptanya kesadaran akan pentingnya pendidikan baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarganya. Mayoritas responden mementingkan dan memperjuangkan pendidikan untuk diri sendiri maupun anggota keluarganya dalam mendapatkan pendidikan yang layak baik secara formal maupun non-formal guna mengembangkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Besaran rata-rata kemampuan mengakses pendidikan responden untuk Desa Pulutan sebesar 5,71 pada saat sebelum terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata serta meningkat menjadi 8,66 setelah terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Peningkatan yang terjadi disebabkan oleh peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarganya. Mayoritas responden mementingkan dan memperjuangkan pendidikan untuk diri sendiri maupun anggota keluarganya dalam mendapatkan pendidikan yang layak baik secara formal maupun non-formal guna mengembangkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Tabel 30 Hasil dan uji beda Paired Sample T-test responden antara kemampuan mengakses pendidikan sebelum dan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

	Jumlah	
	N	Sig. (2-tailed)
Kemampuan mengakses pendidikan sebelum – Kemampuan mengakses pendidikan sesudah	105	.000

Tabel 30 memuat uji beda kemampuan mengakses pendidikan sebelum dengan kemampuan mengakses pendidikan sesudah terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata. Perhitungan statistik tersebut menghasilkan nilai *Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 dibawah batas kritis 0,05. Hasil nilai tersebut memiliki arti bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara kemampuan mengakses pendidikan dari anggota dan masyarakat sebelum dengan sesudah hadirnya unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sejalan dengan angka harapan lama sekolah yang telah dikemukakan oleh BPS Kabupaten Gunungkidul (2023c) dari Kabupaten Gunungkidul yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan angka harapan lama sekolah terjadi berkat sosialisasi yang dilaksanakan secara berkala dilaksanakan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul guna menyadarkan orang tua dan murid akan pentingnya pendidikan. Kabupaten Gunungkidul juga terus melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya memperoleh ijazah dari berbagai satuan pendidikan. Selain itu, Kabupaten Gunungkidul juga memberikan kemudahan dalam mengakses fasilitas pendidikan seperti melalui beasiswa serta kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta untuk membuka kampus di Kabupaten Gunungkidul atau yang lebih dikenal sebagai kampus diluar domisili. Selain bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul juga mengoptimalkan kampus Universitas Gunungkidul sebagai pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 31 Angka harapan lama sekolah (tahun), 2020 – 2022 Kabupaten Gunungkidul

	Angka Harapan Lama Sekolah		
	2020	2021	2022
Kabupaten Gunungkidul	12,97	12,98	13,33

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul (2023)

5.5 Hubungan dan Dampak Efektivitas Unit Usaha BUMDes Pengelolaan Kawasan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pembahasan yang dimuat dan dijelaskan dalam sub-bab ini merupakan uraian dari hasil yang telah didapatkan melalui pengamatan langsung dilapang terkait dengan hubungan dan dampak efektivitas unit usaha BUMDes dengan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dalam mengukur efektivitas menggunakan indikator efektivitas yang telah dikemukakan oleh Dale (2004), bahwa efektivitas dapat diukur melalui enam pendekatan yang terdiri dari kebermanfaatan (*effectivity*), kesesuaian (*relevance*), keberlanjutan (*sustainability*), besaran dan luasan geografis akibat positif (*impact*), signifikansi tingkat pemberdayaan (*empowerment*) serta besaran tingkat partisipasi (*participation*). Selanjutnya, pengukuran kesejahteraan di dalam penelitian ini menggunakan indikator kolaborasi terkait dengan kesejahteraan dan IPM yang telah dikemukakan oleh BPS Kabupaten Gunungkidul (2021) dan BPS (2022) yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, kesehatan dalam rumah tangga, kemampuan dalam mendapatkan akses fasilitas kesehatan, kualitas pendidikan serta kemampuan dalam mendapatkan akses pendidikan.

Tabel 32 Tabel silang jumlah dan persentase efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan tingkat kesejahteraan masyarakat

		Kesejahteraan Masyarakat							
		Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Efektivitas	Rendah	0	0	0	0	0	0	0	0
Unit Usaha	Sedang	0	0	13	12	3	3	16	15
BUMDes	Tinggi	0	0	27	26	62	59	89	85
Total		0	0	40	38	65	62	105	100

Berdasarkan hasil temuan dalam pengamatan langsung di lapang yang dimuat di dalam Tabel 32 di atas, dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat responden yang memiliki tingkat kesejahteraan dalam kategori rendah. Persebasaran dari data penelitian menunjukkan responden dalam penelitian yang memiliki tingkat kesejahteraan tergolong dalam kategori sedang didominasi oleh responden yang menilai bahwa efektivitas dari unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata tergolong dalam kategori tinggi dengan jumlah 27 jiwa atau 26 persen. Sementara itu, terdapat 13 jiwa atau 12 persen yang memiliki tingkat kesejahteraan tergolong dalam kategori sedang dengan penilaian terhadap efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata termasuk ke dalam kategori sedang. Dominasi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan penilaian terhadap efektivitas unit usaha BUMDes termasuk ke dalam kategori tinggi dengan jumlah 64 jiwa atau 61 persen.

Penilaian tersebut didasari oleh pendapat dari responden yang menyatakan bahwa BUMDes telah berupaya semaksimal mungkin guna mengangkat tingkat kesejahteraan, memperbaiki keadaan perekonomian dan memperbaiki lingkungan masyarakat yang terdampak melalui unit usahanya. Responden yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi dan menilai efektivitas unit usaha BUMDes termasuk ke dalam kategori tinggi merupakan responden yang mampu untuk menangkap peluang serta memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan mengikuti berbagai tahapan dalam mengembangkan unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata.

Selanjutnya, pada uji korelasi rank *Spearman* dapat diterima melalui korelasinya apabila nilai $\alpha < 0,05$ dimana dapat dinyatakan bahwa variabel-variabel pengujian didalamnya dianggap berhubungan, akan tetapi apabila nilai $\alpha > 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel-variabel pengujian didalamnya dianggap tidak memiliki hubungan. Kemudian terdapat penanda lainnya yang dapat menunjukkan adanya hubungan antar variabel serta memiliki kekuatan, penanda tersebut ialah bintang dua (***) dengan pengertian bahwa terdapat hubungan yang memiliki kekuatan dengan taraf nyata sangat nyata, serta apabila terdapat penanda bintang satu (*) dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang memiliki kekuatan dengan taraf nyata hanya nyata. Sementara itu, apabila tidak memiliki sama sekali penanda bintang maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan.

Tabel 33 Koefisien korelasi efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan tingkat kesejahteraan masyarakat

Efektivitas Unit Usaha BUMDes	Kesejahteraan Masyarakat		
	N	Koefisien Korelasi	Sig. (2-tailed)
	105	.519**	.000

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Tabel 33 menyatakan bahwa koefisien korelasi yang terjadi antara efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil dari olahan data rank *Spearman* menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan batas kritis yaitu 0,01 yang memiliki arti bahwa terdapat hubungan yang positif antara efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan nilai koefisien korelasi mencapai 0,519 yang mengindikasikan bahwa hubungan yang terjadi antara efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang sedang. Selain itu, terdapat juga tanda dua bintang (**) yang menunjukkan bahwa korelasi pada penelitian efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki kekuatan yang sangat nyata.

Mendasar kepada hasil dari penelitian yang telah didapatkan, hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh anggota dan masyarakat terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata merasakan adanya peningkatan dari kualitas hidup setelah hadirnya unit usaha tersebut. Peningkatan kualitas hidup tersebut mendasar kepada 3 aspek yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Peningkatan yang terjadi melalui aspek sosial dikarenakan mayoritas dari responden yang memiliki kegiatan positif serta mendapatkan pengalaman baru dalam bertemu, mengelola, serta memanfaatkan peluang melalui perkembangan industri pariwisata. Peningkatan yang terjadi melalui aspek ekonomi dikarenakan mayoritas responden telah mampu untuk meningkatkan penghasilan melalui keikutsertaan dalam pengelolaan unit usaha maupun memanfaatkan peluang yang hadir melalui perkembangan industri pariwisata. Peningkatan yang terjadi melalui aspek lingkungan dikarenakan unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata mengajarkan dan menuntut kepada seluruh masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa menjadi sebuah kawasan wisata yang menarik bagi wisatawan sehingga wisatawan memiliki beragam pilihan dalam menentukan tujuannya. Selain itu juga, unit usaha ini mampu untuk mengajarkan kepada anggota dan masyarakat terdampak untuk terus meningkatkan keahlian dan kemampuan dalam membaca peluang guna meningkatkan penghasilan.

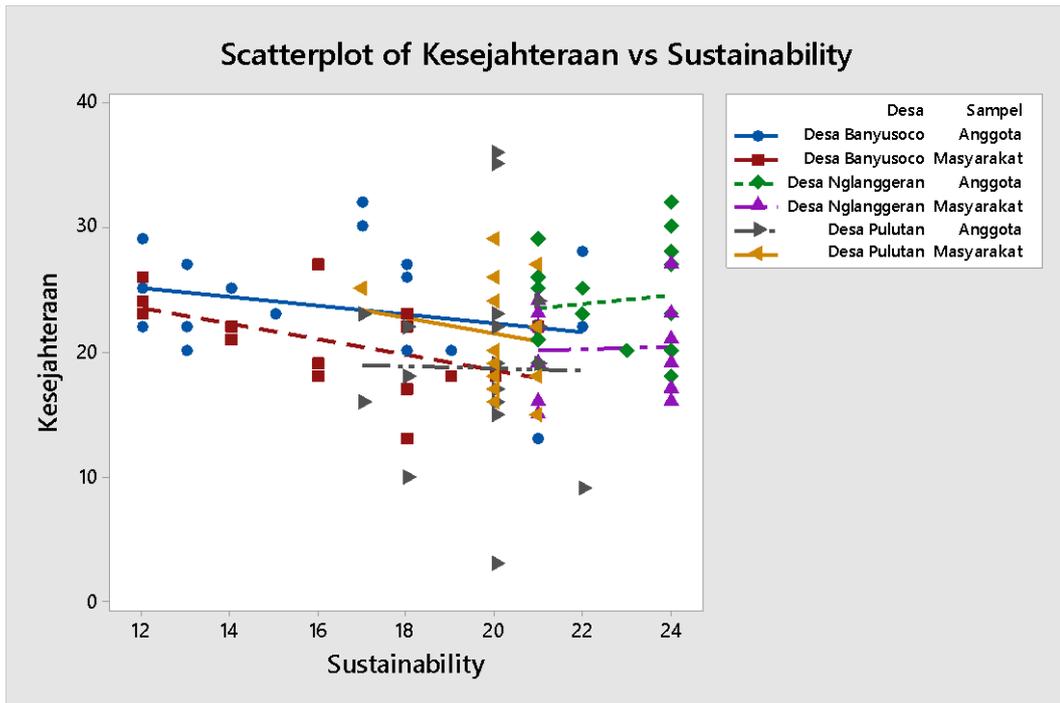
Sementara itu dampak efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui melalui uji regresi dengan nilai $\alpha < 0,05$.

Tabel 34 Hasil uji regresi efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat

Variabel	Koefisien	Probabilitas
(Constant)	28,34	0,000
Kebermanfaatan (effectivity)	-0,448	0,122
Kesesuaian (relevance)	0,277	0,384
Keberlanjutan (sustainability)	-0,702**	0,040
Besaran dan luasan akibat geografis akibat positif (impact)	-0,958***	0,000
Signifikansi pemberdayaan (empowerment)	0,940***	0,009
Tingkat partisipasi (participation)	0,468**	0,011

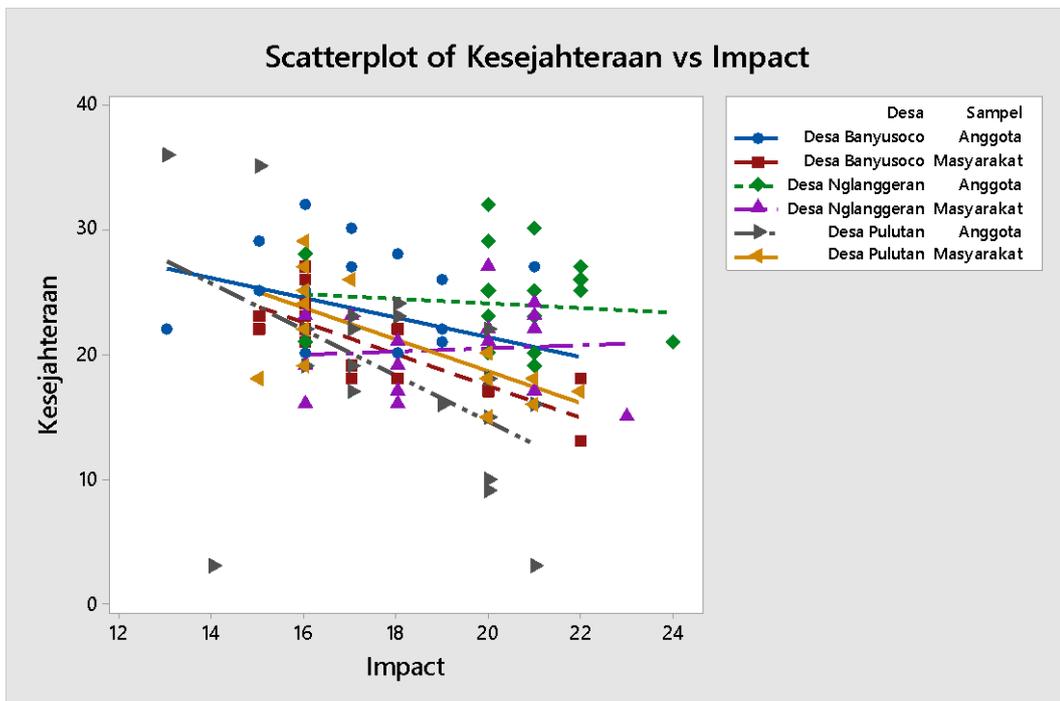
Keterangan: **) signifikan pada taraf nyata 5%, (***) signifikan pada taraf nyata 1%

Tabel 34 memuat dan menjelaskan hasil uji regresi dari efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana pada tabel tersebut terdapat 4 variabel efektivitas yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan (*sustainability*) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan melalui nilai probabilitas dari variabel keberlanjutan (*sustainability*) sebesar 0,040. Nilai tersebut berada dibawah taraf nyata 5 persen. Berdasarkan kepada nilai koefisien dari variabel tersebut yang mencapai sebesar -0,702 memiliki makna bahwa keberlanjutan (*sustainability*) berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada keberlanjutan (*sustainability*) sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebesar 0,702 persen.



Gambar 24 Scatterplot antara kesejahteraan dengan sustainability

Hal ini dikarenakan oleh ke dua BUMDes dari objek penelitian merupakan BUMDes dengan kategori berkembang dan dasar sehingga keberlanjutan (*sustainability*) yang alih-alih memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, ke dua BUMDes dari objek penelitian justru memberikan dampak yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.



Gambar 23 Scatterplot antara kesejahteraan dan impact

Besaran dan luasan geografis akibat positif (*impact*) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan melalui nilai probabilitas dari variabel besaran dan luasan geografis akibat positif (*impact*) sebesar 0,000. Nilai tersebut berada dibawah taraf nyata 1 persen. Berdasarkan kepada nilai koefisien dari variabel tersebut yang mencapai sebesar -0,958 memiliki makna bahwa besaran dan luasan geografis akibat positif (*impact*) berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada besaran dan luasan geografis akibat positif (*impact*) sebesar 1 persen maka akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebesar 0,958 persen.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian diatas adalah apabila semakin jauh populasi masyarakat dari pusat unit usaha pengelolaan kawasan wisata maka dampak positif yang dirasakan atas kesejahteraan semakin sulit untuk tercapai.

Signifikansi pemberdayaan (*empowerment*) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan melalui nilai probabilitas dari variabel signifikansi pemberdayaan (*empowerment*) sebesar 0,009. Nilai tersebut berada dibawah taraf nyata 1 persen. Berdasarkan kepada nilai koefisien dari variabel signifikansi pemberdayaan (*empowerment*) yang mencapai sebesar 0,940 mengindikasikan bahwa signifikansi pemberdayaan (*empowerment*) berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada signifikansi pemberdayaan (*empowerment*) sebesar 1 persen maka akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebesar 0,940 persen. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Setiawati (2016) yang menghasilkan pernyataan bahwa salah satu strategi yang sukses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan sendiri memiliki tujuan guna meningkatkan kemampuan serta kemandirian dari masyarakat di kawasan perbatasan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Melalui konsep pemberdayaan tersebut, masyarakat dipandang sebagai subjek dari pembangunan, bukan objek dari pembangunan. Hal tersebut menjadikan masyarakat mampu untuk menikmati dari hasil pembangunan yang dilaksanakan secara nyata. Sinergi yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat serta pihak swasta yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat merupakan aspek terpenting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Melalui perspektif ilmu pertahanan, pemberdayaan dijadikan salah satu wujud dari bela negara yang dilaksanakan oleh masyarakat di kawasan perbatasan. Kondisi tersebut mampu untuk mendukung terwujudnya perbatasan sebagai serambi terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki daya saing, berdaulat serta aman.

Selanjutnya, tingkat partisipasi (*participation*) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan melalui nilai probabilitas dari variabel tingkat partisipasi (*participation*) sebesar 0,011. Nilai tersebut berada dibawah taraf nyata 5 persen. Berdasarkan kepada nilai koefisien dari variabel tingkat partisipasi (*participation*) yang mencapai sebesar 0,468 mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi (*participation*) berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada tingkat partisipasi (*participation*) sebesar 1 persen maka akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebesar 0,468 persen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono *et al.* (2021) yang menghasilkan pernyataan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi dari masyarakat maka akan semakin banyak jumlah masyarakat yang mengalami perubahan, perubahan yang dimaksud tersebut dapat berupa perubahan pekerjaan dan perubahan pendapatan. Keterlibatan langsung dari masyarakat dalam program wisata mampu membuka akses dalam mendapatkan pekerjaan serta meningkatkan penghasilan guna memperbaiki tingkat kesejahteraan.

5.6 Implikasi Manajerial

Penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi manajerial atau rekomendasi yang ditunjukkan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan BUMDes di Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan. Beberapa implikasi manajerial atau rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan antara lain:

1. Seluruh indikator pada penelitian yang terkait dengan efektivitas unit usaha BUMDes sudah tergolong dalam kategori tinggi terkecuali indikator besaran dan luasan geografis akibat positif (*impact*). Hal ini disebabkan oleh kurang meratanya akses kesempatan untuk bekerja atau mendapatkan peluang dari hadirnya unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata. Pemangku kepentingan harus lebih memperhatikan terkait dengan akses kesempatan memperoleh pekerjaan atau memperoleh peluang terhadap masyarakat yang benar-benar terdampak langsung dari hadirnya unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata.
2. Penelitian ini masih terdapat banyak keluhan terkait dengan sulitnya mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa yang tercermin melalui indikator besaran dan luasan geografis akibat positif (*impact*). Pemangku kepentingan harus lebih bijak dan selektif dalam memberikan akses pelatihan perkembangan kemampuan dan keahlian dari setiap individu yang benar-benar terdampak akan hadirnya unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata.
3. Melalui hasil dari indikator kesesuaian (*relevance*), Pemerintah Desa Nglanggeran sesegera mungkin untuk melaksanakan muserembang (musyawarah perencanaan pembangunan) guna merumuskan, membentuk dan menjalankan program yang terkait dengan 4 pilar desa mandiri budaya, dimana terdapat 2 pilar yang belum diberikan surat keputusan dan pengelolaannya belum optimal. Kekurangan 2 pilar tersebut adalah desa rintisan '*preneur*' dan desa rintisan '*prima*'.
4. Melalui hasil dari indikator signifikansi tingkat pemberdayaan (*empowerment*) dan indikator tingkat partisipasi (*participation*), Pemerintah Desa Nglanggeran harus menjaga pondasi semangat gotong royong dan semangat kebersamaan dalam merangkul serta bermusyawarah dengan masyarakat Desa Nglanggeran agar meminimalisir terjadinya konflik akibat kecemburuan sosial.
5. Melalui indikator kesesuaian (*relevance*), Pemerintah Desa Banyusoco harus melaksanakan integritas dengan seluruh elemen masyarakat mulai dari pengurus BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco, pengelola desa wisata, kepala padukuhan guna mendorong pelaksanaan industri pariwisata yang telah dirintis melalui kerjasama dengan Balai KPH Yogyakarta.

6. Melalui hasil dari indikator signifikansi tingkat pemberdayaan (*empowerment*) dan tingkat partisipasi (*participation*), Pemerintah Desa Banyusoco dan pengurus BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco sesegera mungkin untuk merangkul karangtaruna di Desa Banyusoco guna memaksimalkan sumber daya manusia yang terdapat di desa dalam menjalankan industri kepariwisataan.
7. Melalui hasil dari indikator keberlanjutan (*sustainability*), pengurus BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco harus kembali menjalankan program kerjasama antara BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul terkait dengan budidaya ikan air tawar menggunakan sistem bioflok. Hal tersebut guna menambah luas akses kepada pengusaha mikro guna melakukan budidaya ikan air tawar di Desa Banyusoco dan menambahkan pendapatan kepada masyarakat yang terjun langsung di dalam program tersebut.
8. Melalui hasil dari indikator keberlanjutan (*sustainability*), pengurus BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco harus mengoptimalkan kerjasama antara BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco dengan Balai KPH Yogyakarta serta Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna mengoptimalkan kawasan-kawasan yang dijadikan sebagai kawasan rintisan wisata melalui program perindangan kawasan dengan memanfaatkan tanaman buah-buahan.
9. Melalui hasil dari indikator kebermanfaatan (*effectivity*), BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco harus melaksanakan kerjasama dengan Balai KPH Yogyakarta guna mengoptimalkan produksi cuka kayu, agar produk tersebut mampu melakukan penetrasi pasar.
10. Melalui hasil dari indikator keberlanjutan (*sustainability*), pengurus BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco harus melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul guna memberikan pelatihan lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan lebah madu, agar industri lebah madu mampu menjadi industri yang berkelanjutan serta kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat dihindari.
11. Melalui hasil dari indikator kebermanfaatan (*effectivity*), Pemerintah Desa Pulutan harus lebih peduli terhadap kemajuan yang telah dilaksanakan oleh BUMDes Maju Mandiri Pulutan terkait dengan industri pariwisata.
12. Melalui hasil dari indikator kesesuaian (*relvance*), pengurus BUMDes Maju Mandiri Pulutan harus menjaga kerjasama dengan pengelola Desa Wisata Lembah Desa Pulutan agar meminimalisir terjadinya konflik akibat kecemburuan sosial.
13. Melalui hasil dari indikator keberlanjutan (*sustainability*), pengurus BUMDes Maju Mandiri Pulutan bersama dengan pengelola Desa Wisata Lembah Desa Pulutan harus meningkatkan kreativitas yang berkesinambungan dalam mengembangkan wisata Lembah Desa Pulutan guna menarik lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung.
14. Hasil dari efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata menuntut kepada pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan bijak, terarah dan terukur sehingga seluruh masyarakat desa dapat merasakan hasil dari unit usaha tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

15. Hasil dari efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata memerlukan sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMDes dan masyarakat harus terus disosialisasikan guna meminimalisir konflik yang mungkin terjadi dimasyarakat.
16. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan perkembangan dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui dinas terkait harus secara berkala melakukan pengawasan dan evaluasi serta membuat kebijakan yang tepat agar segala kegiatan dari unit usaha tersebut berjalan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
17. Pemerintah daerah harus melaksanakan Permendagri No. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal guna memudahkannya tingkat kesejahteraan masyarakat tercapai. Melalui pelaksanaan permendagri tersebut juga secara langsung dapat meningkatkan IPM didaerah yang dimaksud.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University





@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Mendasar kepada hasil pembahasan dan data-data yang telah disajikan dan dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas dari unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata sudah tergolong kedalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 85 persen. Hal tersebut didasari melalui kontribusi yang diberikan oleh BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran, BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco, BUMDes Maju Mandiri Pulutan kepada anggota dan masyarakat terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata dengan memberikan pelatihan, peluang dan lapangan pekerjaan baru. Unit usaha pengelolaan kawasan wisata yang dimiliki oleh BUMDes mampu meningkatkan keahlian serta kemampuan dari anggota dan masyarakat terdampak, selain itu juga unit usaha pengelolaan kawasan wisata yang dimiliki oleh BUMDes telah mampu meningkatkan status sosial, ekonomi dan lingkungan. Penilaian efektivitas unit usaha BUMDes merujuk kepada 6 indikator yaitu *effectivity*, *relevance*, *sustainability*, *impact*, *empowerment* dan *participation*.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terdampak akan hadirnya unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata sudah tergolong kedalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 62 persen. Hal ini didasari oleh mayoritas dari anggota dan masyarakat yang terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata telah mampu untuk meningkatkan pendapatannya secara akumulatif melalui industri pariwisata yang dihadirkan di desa, sehingga mayoritas responden sudah dapat menabung untuk kehidupan kedepannya.
3. Studi ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang positif serta signifikan antara efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hubungan yang terjadi tergolong kedalam kategori sedang ($r=0,519$). Selain itu, studi ini menunjukkan terdapat empat indikator yang memiliki pengaruh signifikan antara efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut ialah keberlanjutan (*sustainability*), besaran dan luasan geografis akibat positif (*impact*), signifikansi pemberdayaan (*empowerment*) serta tingkat partisipasi (*participation*) masing masing memiliki nilai signifikansi mencapai (0,040), (0,000), (0,009) dan (0,011) dengan koefisien mencapai (-0,702), (-0,958), (0,940) dan (0,468) pada taraf nyata sebesar 5 persen dan 1 persen.

6.2 Saran

Mendasar kepada hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan atau bahan pertimbangan untuk perkembangan kedepannya, yaitu:

1. Bagi BUMDes perlu untuk memaksimalkan implikasi dan keterlibatan terhadap masyarakat secara langsung agar BUMDes mampu menjadi katalisator kesejahteraan masyarakat yang efektif yang tercermin melalui indikator *impact* dan *empowerment*.
2. Studi ini menekankan perlunya untuk memperluas ruang lingkup penelitian tentang peranan BUMDes yang melibatkan lebih dari satu unit usaha serta

mencakup seluruh provinsi atau bahkan nasional dan mempertimbangkan indikator kesejahteraan masyarakat seperti fasilitas tempat tinggal, keamanan dan akses teknologi. Penelitian selanjutnya harus juga mengeksplorasi serta menganalisis kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha HH, Sartika M, Kadarningsih A. 2018. Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya di Indonesia. *J Hum Falah*. 5(1):28–48.
- Aini EN, Isnaini I, Sukamti S, Amalia LN. 2018. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia J*. 3(1):58–72. doi:10.33050/tmj.v3i1.333.
- Alsos GA, Ljunggren SCE, Welter F. 2011. *The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Ambadar J. 2008. *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Anggraeni MRRS. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*. 28(2):155. doi:10.24002/modus.v28i2.848.
- Arindhawati AT, Utami ER. 2020. Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akunt dan Bisnis Indones*. 4(1):43–55. doi:10.18196/rab.040152.
- Arlan AS. 2019. Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. *Al'iidara Balad.*, siap terbit. <http://ojs-al-iidara-balad.web.id/index.php/ANE2018/article/view/63>.
- [BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2022. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia). 3., siap terbit. [diakses 2023 Mar 1]. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-3/>.
- [BKKBN] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 1992. *Buku Pengantar Kader KB*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015. *Indikator Tingkat Kesejahteraan Rakyat 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/960>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. Indeks Pembangunan Manusia. [diakses 2023 Mar 4]. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2021. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2021*. Munir AM, editor. Gunungkidul: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2023a. Angka Harapan Hidup (Tahun), 2020 - 2022. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/26/83/1/angka-harapan-hidup.html>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2023b. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2020 - 2022. [diakses 2023 Mar 3]. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/26/84/1/rata-rata-lama->

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

sekolah.html.

- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2023c. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2020 - 2022. [diakses 2023 Mar 3]. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/26/82/1/angka-harapan-lama-sekolah.html>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. 2022. Indeks Pembangunan Manusia 2019-2021. [diakses 2022 Jul 18]. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/26/316/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>.
- Campbell JP, Dunnette MD, Lawler EE, Weick KE. 1970. *Managerial Behavior, Performance, and Effectiveness*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Cohen JM, Uphoff NT. 1980. Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity. *World Dev.* 8(3):213–235. doi:10.1016/0305-750X(80)90011-X.
- Cutler A, Waine B. 1994. *Managing the Welfare State: The Politics of Public Sector Management*. Oxford: Berg Publishers.
- Dale R. 2004. *Evaluating Development Programmes and Projects*. California: Sage Publication, Ltd.
- Davies A, Quinlivan G. 2006. A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development. *J Socio Econ.* 35(5):868–876. doi:<https://doi.org/10.1016/j.socec.2005.11.048>.
- Desa Banyusoco. 2014. Profil Potensi Desa. [diakses 2023 Feb 28]. <https://desabanyusoco.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/59>.
- Desa Nglanggeran. 2013. Profil Kalurahan. [diakses 2022 Jul 18]. <https://desanglanggeran.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/32>.
- Desa Pulutan. 2020. Profil Desa Pulutan. [diakses 2023 Feb 28]. <https://desapulutan.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/59>.
- Desiati R. 2013. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Program Desa Wisata. *Diklus J Pendidik Luar Sekol.* 17(1):253–262. <https://journal.uny.ac.id/index.php/diklus/article/view/2894>.
- Deter M. 2021. Hartz and Minds: Happiness Effects of Reforming an Employment Agency. *J Happiness Stud.* 22:1819–1838. doi:<https://doi.org/10.1007/s10902-020-00297-7>.
- Dewi ASK. 2014. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *J Rural Dev.*(1):1–14.
- [Dinkes] Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul. 2022. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kalurahan Sehat dalam Perencanaan Pembangunan Kesehatan Tingkat Kalurahan Bagi Pembina Wilayah UPT PUSKESMAS Se-Kabupaten Gunungkidul. [diakses 2023 Mar 1]. <https://dinkes.gunungkidulkab.go.id/bimbingan-teknis-penyelenggaraan-kalurahan-sehat-dalam-perencanaan-pembangunan-kesehatan-tingkat-kalurahan-bagi-pembina-wilayah-upt-puskesmas-se-kabupaten-gunungkidul/>.
- [Disdukcapil] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. 2022. *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester II Tahun 2021*. Gunungkidul: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- Elvina, Musdhalifah. 2019. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektifitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *JSHP J Sos Hum dan Pendidik*. 3(1):1–9. doi:10.32487/jshp.v3i1.509.
- Faedlulloh D. 2018. BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. *J Gov*. 3(1):1–17. doi:10.31506/jog.v3i1.3035.
- Fahrudin A. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Fatwa AM. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kompas Media.
- Friedlander W. 1961. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Garbero A, Muttarak R. 2013. Impacts of the 2010 droughts and floods on community welfare in rural Thailand: Differential effects of village educational attainment. *Ecol Soc*. 18(4). doi:10.5751/ES-05871-180427.
- Gerlich R, Wolbring T. 2021. “In Good Times and in Bad, in Sickness and in Health”: A Longitudinal Analysis on Spousal Caregiving and Life Satisfaction. *J Happiness Stud*. 22:1481–1516. doi:https://doi.org/10.1007/s10902-020-00281-1.
- Hall CM, Page S. 1999. *The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space*. Fourth Edi. London: UK: Routledge.
- Handoko. 2001. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, Sutarna IT. 2018. Management Of Village Business Enterprises In Improving Community Welfare Resilience Of Gold Mining Areas In Sumbawa Barat District Ibrahim 1 , Iwan Tanjung Sutarna 2. *J TATALOKA*. 20(3):309–316.
- Ihsan AN, Setiyono B. 2018. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *J Polit Gov Stud*. 7(04):221–230. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>.
- Ismardani Y. 2019. Pola Konsumsi, Cerminan Kesejahteraan Masyarakat. 4., siap terbit. [diakses 2023 Mar 1]. <http://bappeda.lamandaukab.go.id/pola-konsumsi-cerminan-kesejahteraan-masyarakat/>.
- Istiyanti D. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening. *J Pus Inov Masy*. 2(1):53–62.
- Jung IJ. 2009. A Critical Perspective on the Integration of Service Delivery Systems in Child-Youth Policy. *Korean J Soc Welf Stud*. 40:297–322. doi:10.16999.
- Kartika NKDC, Sinarwati NK, Wahyuni MA. 2017. Efektivitas Pengelolaan Dana pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara di Desa Songan A. *e-Journal SI Ak Univ Pendidik Ganessa*. 8(2):1–10.
- Kendall J, Knapp M, Julien F. 2006. Social Care and the Nonprofit Sector in the Western Developed World. Di dalam: *In The Nonprofit Sector: A Research Handbook*. New Heaven: Yale University Press.
- Kusbandrijo B, Tjahjono E, Rochim AI. 2018. Pengelolaan Kawasan Wisata Terintegrasi Di Kabupaten Ponorogo. *DIA J Ilm Adm Publik*. 16(1):50. doi:10.30996/dia.v16i1.1927.
- Lee JS. 2010. A Study on the Strategy of Korean Post-NPM Reform. *Korean Soc Public Adm*. 21:29–47.
- Lee M, Majer M, Kim B. 2019. The Social Welfare Service Delivery System to Reinforce Sustainable Social Participation. *Soc Sci*. 8(9).



doi:10.3390/socsci8090258.

- Lestanata Y, Pribadi U. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015. *J Gov Public Policy*. 3(3):368–389. doi:10.18196/jgpp.2016.0063.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mangantar M. 2018. An Analysis of the Government Financial Performance Influence on Community Welfare in North Sulawesi Province Indonesia. *Int J Econ Financ Issues*. 8(6):137–143. <http://www.econjournals.com>.
- Mariani N, Suryani L. 2021. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Masintan, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. *JAPB J Adminstrasi Publik Adm Bisnis*. 4(2):995–1006. <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB>.
- Muller F. 1997. State-of-the-art in ecosystem theory. *Ecol Modell*. 100(1–3):135–161. doi:[https://doi.org/10.1016/S0304-3800\(97\)00156-7](https://doi.org/10.1016/S0304-3800(97)00156-7).
- Mustangin, Kusniawati D, Islami NP, Setyaningrum B, Prasetyawati E. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji. *SOSIOGLOBAL J Pemikir dan Penelit Sociol*. 2(1):59–72.
- Nasikun. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Natori N. 2001. *A Guide Book for Tourism Based Community Development*. Osaka, Japan: APTEC Publisher.
- Ndakularak E, Setiawina ND, Djayastra IK. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *J Agribisnis*. 11(6):183–201.
- Nugroho DA. 2015. Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014 – April 2015). *JESP J Ekon dan Stud Pembang*. 7(2):79–84.
- O'Brien D, Scott PS. 2012. *Correlation and Regression*. Oxford: OAK Tree Press.
- Pangestu AT. 2020. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. <http://repository.untag-sby.ac.id/5564/>.
- [Pembkab] Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. 2022. Kedudukan Gunung Kidul. [diakses 2022 Jul 15]. <https://gunungkidulkab.go.id/D-9055270d7eb02ff55b8d46a5f9a41f4f-NR-100-0.html#:~:text=Potensi pariwisata di Kabupaten Gunungkidul,wisata budaya maupun wisata religi>.
- [Perbup] Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul No. 56 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Desa. 2011. Gunungkidul: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- [Perbup] Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul No. 106 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kalurahan Sehat. 2021. Gunungkidul: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- [Perda] Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 - 2025. 2014. Gunungkidul: Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul.

- [Perdes] Peraturan Desa Nglanggeran No. 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Mandiri Desa Nglanggeran. 2017. Gunungkidul: Pemerintah Desa Nglanggeran.
- [Permendagri] Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. 2010. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- [Permendagri] Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 2021. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- [Permendes] Peraturan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 2015. Jakarta: Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- [Permenkes] Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016 - 2019. 2016. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- [PKDSP] Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Departemen Pendidikan Nasional, editor. Malang: RPDN (Relawan Pemberdayaan Nusantara).
- [PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. 2021. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pradnyani NLPSP. 2019. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *J Ris Akunt.* 9(2):39–47. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/602/570>.
- Prihatin RB, Mulyadi M, Suni NSPS. 2018. *BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Nurhayati C, editor. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Purnamasari H, Yulyana E, Ramdani R. 2016. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang. *J Polit Indones.* 1(2):31–42.
- Purnomo R, Maftukhatusolikah, Rusydi M. 2021. Badan Usaha Milik Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Rotan Mulya. *J Intelekt Keislaman, Sos dan Sains.* 10(2):301–310. doi:10.19109/intelektualita.v10i1.8911.
- Rafsanzani H, Supriyono B, Suwondo. 2013. Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). *J Adminstrasi Publik.* 1(4):67–72.
- Rilla E. 1999. Bring the City & County Together. *Calif Coast Ocean.* 15(2):10.
- Rosni. 2017. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *J Geogr.* 9(1):53. doi:10.24114/jg.v9i1.6038.
- Sajogyo. 1998. *Menuju Kemandirian Masyarakat. Prisma No. 1 Tahun XVII*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sari MEP, Pratiwi DA. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan

Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. *J Trias Polit.* 2(2):137. doi:10.33373/jtp.v2i2.1464.

Sasauw C, Gosal R, Waworundeng W. 2018. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Masyarakat di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Eksek J Jurusan Ilmu Pemerintahan.* 1(1):1–10.

Satria D. 2009. Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang. *J Indones Appl Econ.* 3(1):37–47. doi:10.21776/ub.jiae.2009.003.01.5.

Setiawati P. 2016. Pemberdayaan Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Perbatasan. *Sisi Lain Realita.* 1(2):13–22. doi:10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(2).1380.

Sheikh YA. 2018. Implementation of Rural Development Programmes in Jammu and Kashmir. *J Gov Public Policy.* 5(1). doi:10.18196/jgpp.5191.

Skoufias E, Vinha K. 2013. The Impacts of Climate Variability on Household Welfare in Rural Mexico. *Popul Environ.* 34:370–399. <https://doi.org/10.1007/s11111-012-0167-3>.

Soekanto S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres.

Sohier L, Ootegem L Van, Verhofstadt E. 2021. Well-Being During the Transition from Work to Retirement. *J Happiness Stud.* 22:263–268. doi:<https://doi.org/10.1007/s10902-020-00228-6>.

Spearman CE. 1904. The Proof and Measurement of Association between Two Things. *Am J Psychol.* 15:72–101.

Subandriyo B. 2020. *Bahan Ajar Analisis Korelasi dan Regresi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Subehi F, Luthfi A, Mustofa MS, Gunawan. 2018. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pongkok, Kabupaten Klaten. *Umbara Indones J Anthropol.* 3(1):34–43. doi:10.24198/umbara.v3i1.25670.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumiasih K. 2018. Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *J Magister Huk Udayana (Udayana Master Law Journal).* 7(4):565. doi:10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p10.

Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta: UAI Press.

Sutrisno E. 2007. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suwecantara IM, Surya I, Riady G. 2018. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Bumdes Madani Di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara). *J Pemerintah Integr.* 6(4):624–634.

Syah F. 2017. Strategi Mengembangkan Desa Wisata. *Pros Semin Nas Multi Disiplin Ilmu Call Pap UNISBANK.* 3:335–341.

Sykes AO. 1993. An Introduction to Regression Analysis. Report No.: 20. Chicago. Tama DOE, Yanuardi. 2013. Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. *J Chem Inf Model.* 53(9):1689–1699.

- Tandililing P, Ismail R. 2021. *Pengantar Statistika Terapan*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Taqquidin HU, Zuhilmi MR. 2020. Efektivitas Penyaluran Modal Usaha dalam Meningkatkan Usaha Kecil di BUMDes Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. *Econotica*. 2. <https://unu-ntb.e-journal.id/econotica/article/view/107/54>.
- Teja M. 2015. Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. *J Aspir*. 6(6):63–76.
- Tsabit AM. 2019. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat. *AMALJurnal Ekon Syariah*. 1(1):1–17.
- US Congress. 1992. Science and Technology Issues in Coastal Ecotourism. *Sci Technol Issues Coast Ecotourism-backgr Pap OTA-BP-F-86.*, siap terbit.
- [UU] Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014.
- ____ Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Pasal 87 Tentang Desa. 2014.
- ____ Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Pasal 88 Tentang Desa. 2014.
- ____ Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Pasal 89 Tentang Desa. 2014.
- ____ Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. 2009.
- ____ Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 2009.
- ____ Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2004.
- Utama IGBR. 2021. Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif. *Ris Kebencanaan Ideathon Bali Kembali.*, siap terbit.
- Utami FP. 2020. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *J Samudra Ekon*. 4(2):101–113. <https://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/view/2303>.
- Utami KS, Tripalupi LE, Meitriana MA. 2019. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial. *J Pendidik Ekon*. 11(2):498–508. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/21545/14001>.
- Wibhisana YP. 2021. Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas dalam Program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo. *Aspir J Masal Sos*. 12(1):31–45. doi:10.46807/aspirasi.v12i1.1741.
- Wicaksono GS, Subagiyo A, Prayitno G. 2021. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Penduduk Desa Wisata Krebet. *Plan Urban Reg Environ*. 10 April:1–10.
- Widiyanto KR. 2021. Workshop Pengembangan Bumdesa Inklusi bagi Kalurahan Tepus dan Songbanyu. [diakses 2022 Sep 9]. <https://pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id/berita-938/workshop-pengembangan-bumdesa-inklusi-bagi-kalurahan-tepus-dan-songbanyu.html>.
- Widyastuti A. 2012. Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Econ Dev Anal J*. 1(2). doi:10.15294/edaj.v1i2.472.
- Windrawanto Y, Irawan S, Setyorini. 2019. Pelatihan dan Pendampingan

Kelompok Pemuda dalam Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Kawasan Obyek Wisata Candi Cetho. *CARADDE J Pengabdian Kpd Masy.* 1(2):167–173. doi:10.31960/caradde.v1i2.38.

- Wu F. 2020. An Examination of the Effects of Consumption Expenditures on Life Satisfaction in Australia. *J Happiness Stud.* 21:2735–2771. doi:<https://doi.org/10.1007/s10902-019-00161-3>.
- Wuri J, Hardanti YR, Hartono LB. 2015. Dampak Keberadaan Kampung Wisata terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat. *J Penelit.* 18(2):143–156. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/JP/article/view/818/629>.
- Yani A, Heriyadi, Rosnani T, Listiana E, Panggabean M. 2019. Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Di Desa Karuminting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang). *Pros SATIESP.*, siap terbit.
- Yasa PGPD, Widiati IAP, Arthanaya I wayan. 2021. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sari Amertha Sudha Sidakarya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *J Interpret Huk.* 2(1):115–120. doi:10.22225/juinhum.2.1.3103.115-120.
- Yektiningsih E. 2018. Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *J Ilm Sosio Agribis.* 18(2):32–50. doi:10.30742/jisa.v18i2.528.
- Zar JH. 1972. Significance Testing of the Spearman Rank Correlation Coefficient. *J Am Stat Assoc.* 67(339):578–580.
- Zunaidah A, Askafi E, Daroini A. 2021. Peran Usaha BUMDes Berbasis Pertanian dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Manaj Agribisnis J Agribisnis.* 21:47–57.



RIWAYAT HIDUP



@Hak cipta milik IPB University

Penulis dilahirkan di Kota Tasikmalaya pada tanggal 2 Agustus 1998 sebagai anak ke-2 dari pasangan Bapak Aman Setiawan dan Ibu Reni Rosliani. Pendidikan sarjana ditempuh di Program Studi Bisnis, Sekolah Bisnis, IPB University dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa program magister (S-2) di Program Studi Sains Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University.

Penulis bekerja sebagai *general affair* di PT. Dakota Penta Sinergi yang bergerak dalam bidang *digital marketing*, perdagangan, konstruksi dan penyedia jasa lainnya sejak tahun 2021 dan ditempatkan di Kota Bogor.

Selama mengikuti program S-2, penulis aktif menjadi staf *public relation* di Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB University. Karya ilmiah berjudul “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” telah diterima dan siap terbit pada jurnal E-Bisma (Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi). Karya-karya ilmiah tersebut merupakan bagian dari program S-2 penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.